



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018-2023**

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

PALANGKA RAYA
Kota Cantik



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
33. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
34. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
35. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
36. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA, adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Palangka Raya.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah.

9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palangka Raya adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Palangka Raya untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
16. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
17. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

18. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
26. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan:

- a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028; dan
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam:

- a. penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD dan perencanaan penganggaran; dan
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota.

BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Gambaran Keuangan Daerah;
- d. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
- e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

- g. Kinerja Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. Penutup.

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya 2018-2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Jabatan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan yang bersifat parsial terhadap dokumen RPJMD, dan tidak mempengaruhi terhadap perubahan capaian sasaran, serta tidak mengubah target capaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan dan target indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat indikatif sehingga apabila terjadi penyesuaian dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Maret 2019



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Maret 2019



Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,34 /2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023

I. UMUM

RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Selain itu, RPJMD tersebut memuat Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Palangka Raya.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinir oleh Bappeda.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.



DAFTAR ISI

	Halaman
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
BAB I PENDAHULUAN	I - i
1.1 Latar Belakang	I - i
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 1
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 5
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 6
1.5 Sistematika Penulisan	I - 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 Aspek Geografis dan Demografis	II - 1
2.1.1 Geografi	II - 1
2.1.2 Aspek Demografis	II - 5
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 6
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	II - 6
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	II - 6
2.2.1.2 Inflasi	II - 12
2.2.1.3 PDRB Perkapita	II - 13
2.2.1.4 Angka Kemiskinan	II - 13
2.2.1.5 Tingkat pengangguran terbuka	II - 13
2.2.1.6 Indeks Gini	II - 14
2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II - 14
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	II - 15
2.2.2.1 Pendidikan	II - 15
2.2.2.2 Kesehatan	II - 16
2.2.2.3 Ketenagakerjaan	II - 19
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II - 19
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II - 19
2.3.1.1 Pendidikan	II - 19
2.3.1.2 Kesehatan	II - 22



2.3.1.3 Pekerjaan Umum	II - 26
2.3.1.4 Perhubungan	II - 28
2.3.1.5 Lingkungan Hidup	II - 29
2.3.1.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II - 30
2.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..	II - 31
2.3.1.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II - 32
2.3.1.9 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II - 32
2.3.1.10 Penanaman Modal	II - 33
2.3.1.11 Kebudayaan dan Pariwisata	II - 34
2.3.1.12 Kesatuan Bangsa dan Politik	II - 35
2.3.1.13 Satuan Polisi Pamong Praja	II - 36
2.3.1.14 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	II - 38
2.3.1.15 Ketahanan Pangan	II - 39
2.3.1.18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II - 40
2.3.1.19 Komunikasi dan Informatika	II - 40
2.3.1.20 Persandian dan Statistik	II - 49
2.3.2 Urusan Pilihan	II - 49
2.3.2.1 Pertanian Tanaman Pangan	II - 49
2.3.2.2 Kehutanan dan Perkebunan	II - 50
2.3.2.3 Peternakan dan Perikanan	II - 51
2.3.2.4 Kepariwisata	II - 52
2.3.2.5 Perdagangan	II - 53
2.3.2.6 Perindustrian	II - 54
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II - 54
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 54
2.4.2 Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur	II - 56
2.4.3 Perkembangan Investasi	II - 57
2.4.4 Sumber Daya Manusia	II - 57
2.4.5 Iklim Berinvestasi	II - 58
2.4.6 Pertanian	II - 59
2.4.7 Peternakan	II - 59
2.4.8 Perikanan	II - 60
2.4.9 Industri	II - 61
2.4.10 Angka Kriminalitas	II - 61
2.4.11 Sumber Daya Manusia	II - 62
2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2013-2017	II - 63



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III - 1
3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah	III - 1
3.1.1.2 Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III - 9
3.1.2 Analisis Neraca Daerah	III - 15
3.1.2.1 Aset Daerah	III - 22
3.1.2.2 Kewajiban	III - 23
3.1.2.3 Ekuitas Dana	III - 23
3.1.1.4 Analisis Rasio	III - 24
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013- 2017	III - 25
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 28
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III - 33
3.2.3 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	III - 34
3.2.4 Kerangka Pendanaan	III - 36
3.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III - 37
3.3.1 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III - 41
 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH....	 IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV - 1
4.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	IV - 1
4.1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV - 7
4.1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan	IV - 10
4.1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Ekonomi	IV - 14
4.2 Isu Strategis	IV - 18
 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	 V - 1
5.1 Visi	V - 1
5.2 Misi	V - 2
5.3 Tujuan dan Sasaran	V - 3



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH	VI - 1
6.1 Strategi	VI - 6
6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	VI - 19

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH	VII - 1
-------------------------------	----------------

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH	VIII - 1
---------------------	-----------------

BAB IX PENUTUP	IX - 1
-----------------------------	---------------



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2017	II - 3
Tabel 2.2	Jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kota Palangka Raya Tahun 2017.....	II - 3
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017	II - 5
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2013–2017	II - 10
Tabel 2.5	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013–2017	II - 11
Tabel 2.6	Inflasi di Kota Palangka Raya Tahun 2012-2017	II - 12
Tabel 2.7	PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya (juta rupiah) Tahun 2012-2017	II - 13
Tabel 2.8	Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2012-2017	II - 13
Tabel 2.9	Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 (%)	II - 14
Tabel 2.10	Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 14
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 15
Tabel 2.12	Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 15
Tabel 2.13	Rata-rata Lama Sekolah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 16
Tabel 2.14	Angka Usia Harapan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 16
Tabel 2.15	Prevalensi status gizi (BB/U) pada anak umur 0-59 bulan (Balita) Kota Palangka Raya Tahun 2018	II - 17
Tabel 2.16	Angka Kematian Ibu di Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 17
Tabel 2.17	Angka Kematian Bayi di Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 18
Tabel 2.18	Angka Kematian Balita di Kota Palangka Raya tahun 2013-2017	II - 19
Tabel 2.19	Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya tahun 2013-2017	II - 19



Tabel 2.20	Angka Partisipasi Kasar Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017	II - 20
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Murni Kota Palangka Raya, 2013-2017	II - 20
Tabel 2.22	Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Palangka Raya 2013-2017	II - 21
Tabel 2.23	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 22
Tabel 2.24	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 23
Tabel 2.25	Rasio Dokter dan Tenaga Medis per satuan Penduduk di Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 23
Tabel 2.26	Indikator DBD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 24
Tabel 2.27	Angka Kesakitan Malaria Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 25
Tabel 2.28	Angka Prevalensi TB Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 25
Tabel 2.29	Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km) Tahun 2013-2017	II - 27
Tabel 2.30	Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2012-2016	II - 27
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2013-2017	II - 27
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 28
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 29
Tabel 2.34	Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di KotaPalangka Raya Tahun 2007 - 2016	II - 30
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2017	II - 31
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017	II - 31
Tabel 2.37	Tabel Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017	II - 32
Tabel 2.38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017	II - 33



Tabel 2.39	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 34
Tabel 2.40	Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017	II - 35
Tabel 2.41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2013-2017	II - 36
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 36
Tabel 2.43	Capaian kinerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 39
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	II - 39
Tabel 2.45	Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2017	II - 40
Tabel 2.46	Daftar Nama Perangkat Daerah Yang sudah Membentuk PPID	II - 41
Tabel 2.47	Data Akses Jaringan SOPD yang Terintegrasi	II - 42
Tabel 2.48	Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya Tahun 2017	II - 44
Tabel 2.49	Layanan Telepon Selular	II - 44
Tabel 2.50	Surat Kabar	II - 47
Tabel 2.51	Penyiaran Televisi	II - 47
Tabel 2.52	Radio Swasta	II - 47
Tabel 2.53	Radio Pemerintah	II - 48
Tabel 2.54	Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2016	II - 50
Tabel 2.55	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton) .	II - 50
Tabel 2.56	Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015	II - 51
Tabel 2.57	Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2012-2016	II - 52
Tabel 2.58	Kinerja Sektor Perdagangan Tahun 2011-2016	II - 53
Tabel 2.59	Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2010-2016	II - 54
Tabel 2.60	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlakudn Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2016 (Rupiah)	II - 55



Tabel 2.61	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya, 2015	II - 58
Tabel 2.62	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah) .	II - 59
Tabel 2.63	Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2016	II - 59
Tabel 2.64	Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015	II - 60
Tabel 2.65	Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2012-2016	II - 61
Tabel 2.66	Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya Tahun 2010-2016	II - 61
Tabel 2.67	Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya	II - 62
Tabel 2.68	Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2017 Kota Palangka Raya	II - 63
Tabel 2.69	Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 ..	II - 66
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 1
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 3
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 3
Tabel 3.4	Perkembangan Realisasi PAD Pemerintahan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 4
Tabel 3.5	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 5
Tabel 3.6	Perkembangan Realisasi Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 5
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2017 Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 6
Tabel 3.8	Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 8
Tabel 3.9	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Palangka Raya	III - 9



Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya 2015-2017	III - 11
Tabel 3.11	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 13
Tabel 3.12	Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2017	III - 16
Tabel 3.13	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2017	III - 24
Tabel 3.14	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2017	III - 25
Tabel 3.15	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Palangka Raya 2018-2023 (Rp)	III - 29
Tabel 3.16	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 30
Tabel 3.17	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 31
Tabel 3.18	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 32
Tabel 3.19	Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya 2015 - 2017	III - 33
Tabel 3.20	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya 2015-2017	III - 34
Tabel 3.21	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015–2017 ...	III - 35
Tabel 3.22	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015–2017	III - 36
Tabel 3.23	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2018 - 2023	III - 39
Tabel 3.24	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2018-2023	III - 42
Tabel 3.25	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	III - 43
Tabel 4.1	Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di Kota Palangka Raya Tahun 2007 – 2016	IV - 6
Tabel 4.2	Pendapatan Per Kapita antar Sektor dalam Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2016	IV - 14



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Tabel 4.3	Kategori Kelurahan berdasarkan Tipologi Kawasan	IV - 21
Tabel 5.1	Keterkaitan antara visi dan misi Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	V - 2
Tabel 5.2	Kesesuaian dan konsistensi antara Misi RPJMD Kota Palangka Raya dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023	V - 3
Tabel 6.1	Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Berada Dalam Kota Palangka Raya	VI - 1
Tabel 6.2	Kawasan Strategis Kota Palangka Raya	VI - 2
Tabel 6.3	Analisis SWOT Kota Palangka Raya	VI - 10
Tabel 6.4	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	VI - 14
Tabel 6.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	VI - 19
Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Palangka Raya	VI - 20
Tabel 7.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	VII - 2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	VII - 7
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya	VIII - 2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palangka Raya	VIII - 3



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I - 5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Palangka Raya	II - 2
Gambar 3.1	Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah	III - 4
Gambar 3.2	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah	III - 38
Gambar 6.1	Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional	VI - 5
Gambar 6.2	Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi	VI - 6



DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 4.1	Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Kota Palangka Raya, 2017	IV - 2
Diagram 4.2	Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Palangka Raya	IV - 7
Diagram 4.3	Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Palangka Raya	IV - 11
Diagram 4.4	Analisis Permasalahan Ekonomi Makro Kota Palangka Raya	IV - 5



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 70 ayat (2) disebutkan bahwa bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi lingkungan strategis daerah, isu strategis internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028. RPJMD nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

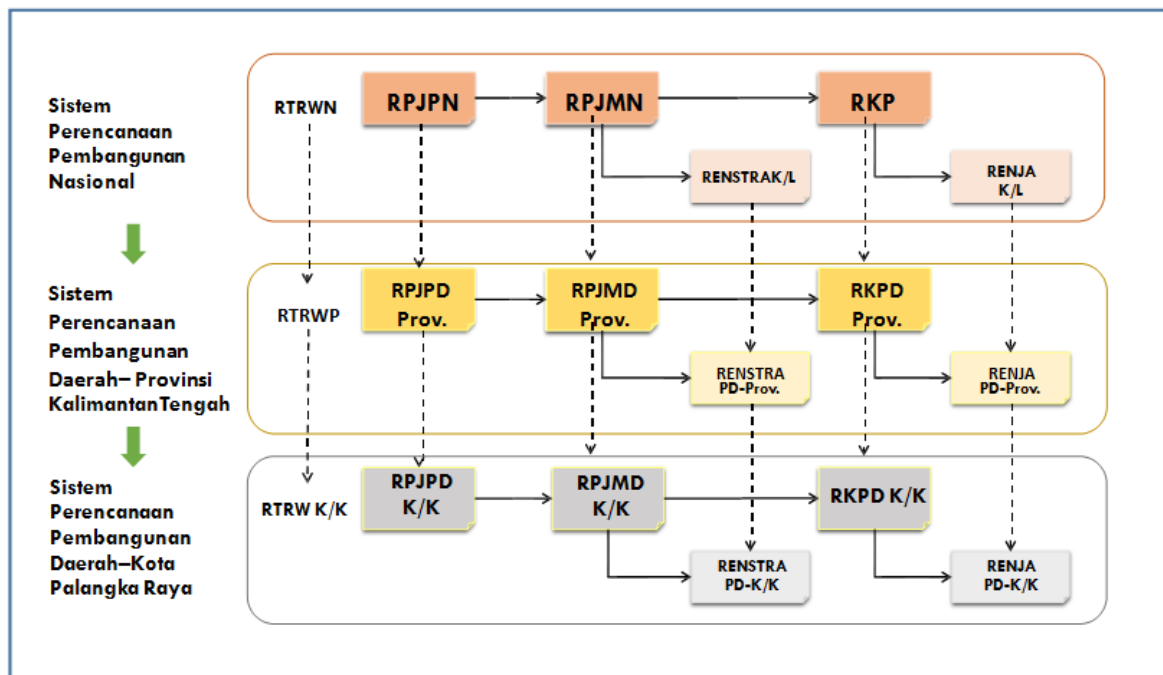


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor.... Tahun.... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun..... (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun... Nomor....)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RPJMD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa:

1. RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Palangka Raya 2008-2028 pada RPJMD tahap ketiga.
2. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kota Palangka Raya dituangkan dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
3. RKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan RPJMD dari tahun ke tahun. Sasaran dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Penyusunan RPJMD didasarkan pada RTRWP Kalimantan Tengah. RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan



pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional dengan memerhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

5. Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya harus berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Kalimantan Tengah dengan memerhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan organisasi perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 tahun yang akan datang sehingga secara nyata dan bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Palangka Raya.

Adapun tujuan dari RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah tahun 2018-2023;
2. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2018-2023 yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan pelaksanaan program-program prioritas.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta RAPBD Tahun 2018-2023.
4. Sebagai tolok ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah.



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu-isu Strategis

BAB V MISI, VISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1 Strategi
- 6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan RPJMD 2019-2023

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Geografi

Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73, Nomor 74, dan Nomor 75 Tahun 2013 luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km² (285.351,28 Ha). Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau

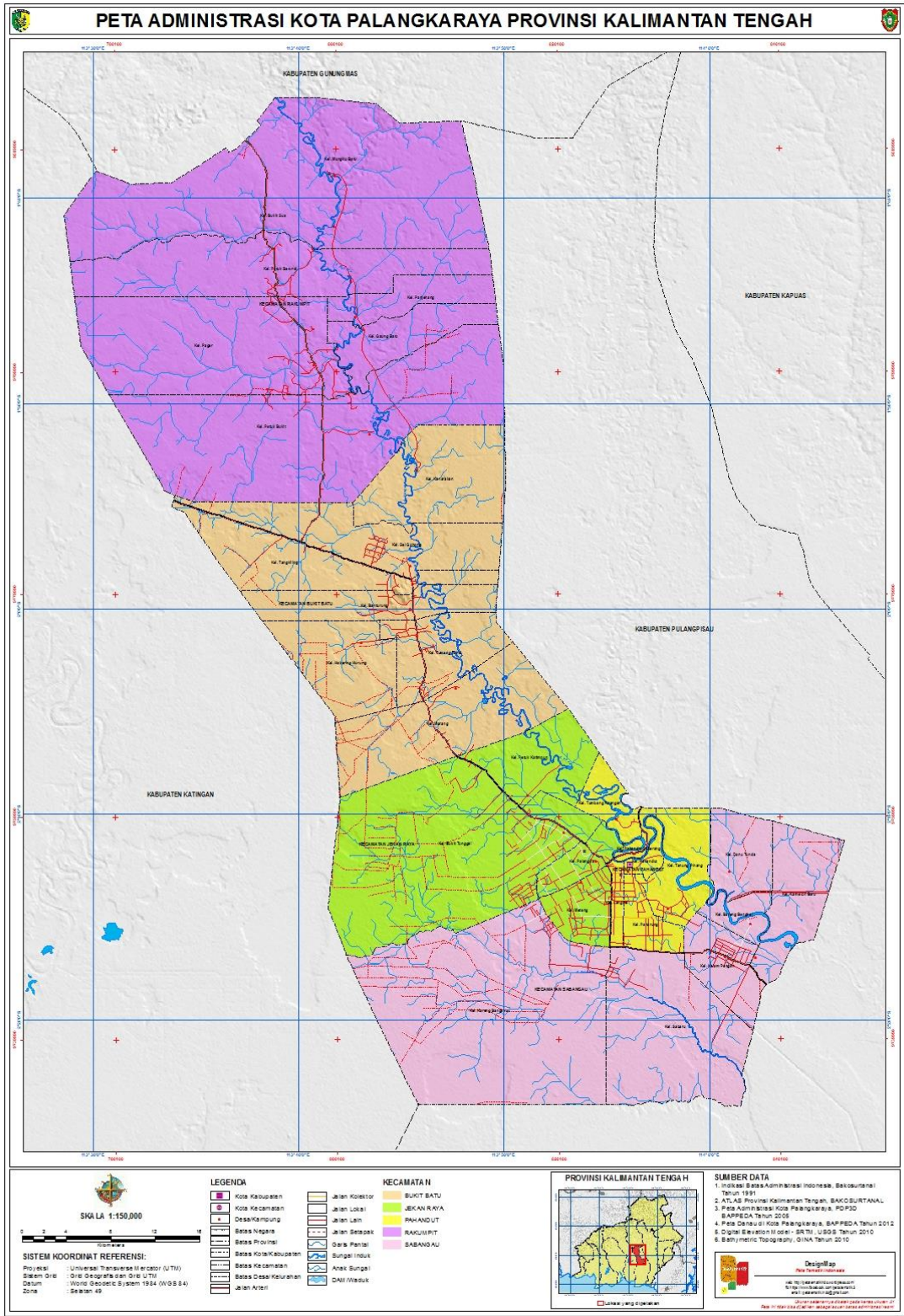
Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 119,41 Km², Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah 641,47 Km², Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 Km², Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 603,16 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan luas wilayah 1.101,95 Km².



Gambar 2.1



Sumber: petatematikindo.files.wordpress.com, 2018



Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas area (Km ²)	%
1.	Pahandut	119,37	4,18
2.	Sabangau	641,51	22,48
3.	Jekan Raya	387,53	13,58
4.	Bukit Batu	603,16	21,14
5.	Rakumpit	1.101,95	38,62
Luas		2.853,52	100

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018

a. Klimatologi

Suhu rata-rata di Kota Palangka Raya selama tahun 2017 berkisar antara 27,00 °C sampai dengan 28,10 °C. Suhu rata-rata tertinggi terjadi di bulan Mei dan September 2017 sebesar 28,10 °C dan terendah di bulan Juli sebesar 27,00 °C. Hari hujan tersebar sepanjang tahun sebanyak 186 hari hujan selama tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kota Palangka Raya Tahun 2017

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
1.	Januari	354,50	16
2.	Februari	166,40	13
3.	Maret	475,70	20
4.	April	235,70	17
5.	Mei	475,70	14
6.	Juni	322,30	13
7.	Juli	134,40	15
8.	Agustus	169,50	11
9.	September	67,10	12
10.	Oktober	237,30	15
11.	Nopember	409,80	20
12.	Desember	403,00	20

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018

b. Geologi dan Tanah

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols). Berdasarkan taksonomi tanah dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol, inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.

Berdasarkan jenis tanah di Kota Palangka Raya terdiri dari podsol dengan luas 10.078 ha, regosol dengan luas 89.955 ha, organosol dengan luas 141.088 ha, aluvial dengan luas 24.635 ha, litosol dengan luas 180 ha, podsolik kuning dengan luas 179 ha serta sungai dan danau dengan luas



4.286 ha. Formasi geologi yang ada di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi Aluvium (Qa) (tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa) dan formasi Batuan Api (Trv) (tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basalt dan rijang). Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota Palangka Raya juga termasuk ke dalam formasi Dahor (TQd) (tersusun atas sebagian besar pasir kuarsa dengandasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit dan lempung).

c. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Palangka Raya memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang. Pola pengembangan wilayah Kota Palangka Raya memperhatikan aspek kecenderungan pengembangan pembangunan, fungsi-fungsi kawasan, karakteristik alam, proyek pertumbuhan penduduk, kecenderungan investasi.

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2029 terdiri dari kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian dengan luas kawasan 36.153 ha; Kawasan Lindung Sungai dan Danau dengan luas kawasan 11.808 ha; Taman Wisata terdiri dari Nyaru Menteng, Bukit Tangkiling, Marang dengan luas kawasan masing-masing 861 ha, 414 ha, 1873 ha, 3.648 ha; Hutan PLG dengan luas kawasan 3.648 ha; Kawasan Sosial Forestry dengan luas kawasan 3.590 ha; Kawasan Hutan Produksi dengan luas kawasan 7.064 ha; Kawasan Pengembangan Produksi dengan luas kawasan 84.353 ha; Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain dengan luas kawasan 117.187 ha.

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang wilayah kota yang terpadu yaitu: mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini, memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing kecamatan tersebut, memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya, mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan, memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2028, memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di Kota Palangka Raya.



2.1.2. Aspek Demografis

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Pahandut

Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.

2. Kecamatan Jekan Raya

Dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

3. Kecamatan Sabangau

Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

4. Kecamatan Bukit Batu

Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

5. Kecamatan Rakumpit

Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,09% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di Kecamatan ini. Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya adalah 370 orang setiap Km². Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk (Orang)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Pahandut	49.418	47.305	96.723	104
Sabangau	9.303	8.619	17.922	108
Jekan Raya	73.311	70.197	143.508	104
Bukit Batu	7.306	6.733	14.039	109
Rakumpit	1.841	1.634	3.475	113
Palangka Raya	141.179	134.488	275.667	104,98

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2013-2017.

1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi kategori Pertanian Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku relatif rendah yaitu sebesar 372,20 miliar rupiah atau hanya sebesar 2,56 persen. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 58,30 persen.

Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Peternakan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah subkategori usaha tersebut yaitu sebesar 84,18 persen, disusul Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 5,78 persen, laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,92 persen. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2017 naik menjadi sebesar 4,31 persen.

2) Pertambangan dan Penggalan

Kategori Pertambangan dan Penggalan dirinci menjadi 4 subkategori, antara lain: subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sublapangan usaha Pertambangan Bijih Logam, dan subkategori Pertambangan dan Penggalan lainnya. Di Palangka Raya hanya ada subkategori yang terakhir. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalan terhadap pembentukan PDRB Palangka Raya relatif rendah tetapi cenderung meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir Kontribusinya hanya sebesar 100,40 miliar rupiah atau sekitar 1,16 persen tahun 2013 dan meningkat menjadi 192,80 miliar rupiah atau sekitar 1,33 persen pada tahun 2017.

3) Industri Pengolahan

Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kota Palangka Raya tahun 2017 mencapai 11,12 persen. Pada Kategori Industri Pengolahan, kontribusi terbesar adalah Subkategori



Industri Makanan dan Minuman mencapai 45,19 persen di tahun 2017. Subkategori lainnya yang memiliki peran besar selanjutnya adalah subkategori Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Kontribusi subkategori ini terhadap pembentukan PDRB Kategori Industri di Palangka Raya tahun 2017 adalah sebesar 28,29 persen. Dalam jangka waktu lima tahun, secara nominal, Kategori Industri Pengolahan berkembang dari 0,95 triliun rupiah menjadi 1,61 triliun rupiah. Pertumbuhannya kategori Industri Pengolahan berfluktuasi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan laju sebesar 8,92 persen, sementara itu laju terendah terjadi pada tahun 2015 dengan laju sebesar 1,55 persen. Pada tahun 2017 Kategori ini menyumbang sebesar 0,72 poin terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2017.

4) Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 46,7 miliar rupiah atau sekitar 0,32 persen terhadap perekonomian Palangka Raya pada tahun 2017, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013. Dari kontribusi tersebut, hampir seluruhnya (sebanyak 98,99 persen) merupakan kontribusi dari subkategori Ketenagalistrikan dan 1,01 persen oleh subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es.

5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, termasuk kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain, tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap Kota Palangka Raya dalam lima tahun terakhir relatif kecil, yaitu sekitar 0,16-0,20 persen. Kontribusi kategori ini pada tahun 2017 hanya 0,17 persen dengan laju sebesar 1,87 persen. Laju pertumbuhannya melambat sebesar 2,63 poin dibandingkan laju pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 4,50 persen. Kinerja kategori ini belum bisa banyak memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya, karena sampai dengan tahun 2017 sumber pertumbuhan dari kategori ini masih kurang dari 0,01 persen.

6) Konstruksi

Pada tahun 2017, kontribusi kategori konstruksi mencapai 1,59 triliun rupiah atau sebesar 10,92 persen terhadap total perekonomian Palangka Raya dan menduduki peringkat keempat. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2013 dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,18 persen per tahun. Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2013-2017 yaitu berkisar 10-11 persen.

7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 16 persen. Pada

tahun 2017, kontribusi kategori ini mencapai 2,62 triliun rupiah atau sekitar 18,03 persen. Dari nilai tersebut, sekitar 95,97 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 4,03 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Secara umum, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat selama periode 2013-2017. Laju pertumbuhan sebesar 5,52 persen di tahun 2013 meningkat menjadi 12,26 di tahun 2017.

8) Transportasi dan Pergudangan

Pada kategori Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 4 (empat) yang ada di Kota Palangka Raya, yaitu Angkutan Darat; Angkutan Sungai dan Penyeberangan; Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir. Kontribusi kategori ini mencapai 1,24 triliun rupiah atau sekitar 8,55 persen terhadap PDRB Palangka Raya pada tahun 2017. Laju pertumbuhan kategori ini relatif meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,8 persen per tahun. Kategori ini didominasi oleh subkategori Angkutan darat dengan andil sebesar 52,94 persen dan angkutan udara sebesar 21,39 persen.

9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2017, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Palangka Raya sebesar 729,5 miliar rupiah atau 5,03 persen. Kategori ini meliputi kegiatan Subsektor Penyediaan Akomodasi dan Subsektor Penyediaan Makan Minum. Subkategori Penyediaan Makan Minum berkontribusi sebesar 72,41 persen terhadap kategori ini, dan 27,59 persen merupakan kontribusi dari Subkategori Penyediaan Akomodasi.

10) Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Palangka Raya selama tahun 2013-2017 relatif stabil, di kisaran 1 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya menunjukkan perlambatan, yaitu sebesar 12,24 persen di tahun 2013 menjadi 6,63 persen di tahun 2017. Pertumbuhan kategori ini tidak lepas dari upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan fiber optic. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet termasuk untuk transaksi online juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi.



11) Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 sebesar 7,23 persen atau senilai 1,05 triliun rupiah. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kategori ini mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 9,18 persen pada tahun 2014. Laju pertumbuhan terendah sebesar 1,89 pada tahun 2015. Laju pertumbuhan kategori ini menguat pada tahun 2017 dengan laju sebesar 9,74 persen.

12) Real Estat

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif tetap bagi PDRB Palangka Raya dengan peranan sekitar 2-3 persen periode tahun 2013-2017. Sumbangan kategori ini di tahun 2017 sebesar 436,8 miliar rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini fluktuatif dan cenderung melambat. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi kategori ini sebesar 4,49 persen, adalah yang terendah selama periode lima tahun ini.

13) Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu sekitar 0,07 persen untuk tahun 2013-2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan kategori ini relatif kecil dan merupakan kategori dengan peranan paling kecil dibandingkan kategori lainnya.

14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2013-2017 peranannya menunjukkan penurunan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 23,50 persen di tahun 2013 persen menjadi 21,04 persen di tahun 2017. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuasi.

15) Jasa Pendidikan

Pada tahun 2017 jasa pendidikan menyumbang sebesar 5,56 persen terhadap total perekonomian Palangka Raya. Kontribusinya relatif stabil dalam kisaran angka 5 persen. Adapun laju pertumbuhannya pada tahun 2017 sebesar 5,81 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang mampu tumbuh pada angka 7,94 persen.

16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2013-2017 peranannya relatif stabil berkisar 2 persen Laju pertumbuhannya pada tahun 2017 sebesar 6,24 persen.



17) Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2017 relatif kecil yaitu 175,7 miliar rupiah. Kontribusinya sejak 2013-2017 relatif stabil di kisaran 1 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,44 persen.

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2013–2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	251,3	283,2	320,3	346,2	372,2
Pertambangan dan Penggalian	100,4	120,6	139,7	164,5	192,8
Industri Pengolahan	951,4	156,2 1	253,9	412,5	614,5
Pengadaan Listrik dan Gas	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,0	19,8	20,1	22,8	25,0
Konstruksi	866,2	1.029,9	1.222,2	1.455,2	1.585,1
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.506,1	1.713,4	1.895,3	2.197,0	2.617,5
Transportasi dan Pergudangan	683,1	798,7	939,6	1.080,4	1.240,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	411,9	445,2	521,5	626,0	729,5
Informasi dan Komunikasi	144,0	163,3	172,2	188,0	208,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	655,9	755,8	798,8	905,7	1.049,5
Real Estate	253,8	280,6	339,2	391,3	436,8
Jasa Perusahaan	5,9	6,5	7,6	8,7	10,1
Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	2.029,8	2.187,9	2.630,4	2.788,9	3.053,7
Jasa Pendidikan	464,7	523,0	606,9	708,9	806,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182,8	214,0	255,2	302,5	349,3
Jasa Lainnya	101,5	112,3	132,5	155,0	175,7
T o t a l	8.637,9	9.829,6	11.289,3	12.792,9	14.514,0

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2018

Ket.: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Palangka Raya didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya yaitu: Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palangka Raya.



Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palangka Raya pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu mencapai 21,04 persen (angka ini menurun dari 23,50 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 18,03 persen (naik dari 17,44 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,12 persen (relatif stabil dari 11,01 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,92 persen (naik dari 10,20 persen di tahun 2013) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 8,48 persen. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, berkisar antara 8 sampai 11 persen.

Salah satu penyebab menurunnya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah seiring berkembangnya perekonomian suatu wilayah maka peranan pemerintah secara ekonomi akan menurun digantikan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Saat ini kategori lapangan usaha yang dominan di Palangka Raya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, meski peranannya masih dibawah dari peranan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tetapi diyakini peranannya akan meningkat mengingat Palangka Raya sebagai Pusat Kota Pemerintahan dengan berbagai sarana dan infrastruktur serta lokasi strategis menjadi motor penggerak dalam percepatan perekonomiannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2013–2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	2,91	2,88	2,84	2,71	2,56
Pertambangan dan Penggalian	8,68	4,50	6,95	8,41	4,57
Industri Pengolahan	4,18	2,95	1,55	7,36	8,92
Pengadaan Listrik dan Gas	6,18	18,84	31,01	12,54	4,98
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46	19,45	-5,10	11,50	1,87
Konstruksi	7,05	8,21	11,15	8,83	6,23
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,25	6,17	3,78	10,43	12,26



Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
Transportasi dan Pergudangan	4,58	8,24	7,32	9,76	8,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,74	4,95	7,71	11,56	7,82
Informasi dan Komunikasi	12,24	11,46	3,63	6,99	6,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,94	9,18	1,89	8,73	9,74
Real Estate	7,04	6,44	7,82	9,36	4,49
Jasa Perusahaan	8,27	5,65	9,46	8,26	6,31
Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	11,63	6,71	12,25	-0,13	1,48
Jasa Pendidikan	8,70	12,60	9,60	7,94	5,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,97	9,13	8,37	7,88	6,24
Jasa Lainnya	8,67	7,03	7,58	9,30	4,63
T o t a l	7,53	6,96	7,19	6,92	6,96

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2018

Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

2.2.1.2. Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dalam kurun waktu 2012-2017 mengalami peningkatan dan juga penurunan. Inflasi di Palangka Raya pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,28 dari semula 6,73 di tahun 2012 menjadi 6,45 di tahun 2013. Selanjutnya, pada Tahun 2014 meningkat kembali menjadi 6,63 atau meningkat sebesar 0,18. Namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 4,20 atau menurun 2,43 dan di tahun 2016 menurun kembali menjadi 1,91 atau menurun 2,29 tetapi meningkat pada tahun 2017 sebesar 3,11, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Inflasi di Kota Palangka Raya Tahun 2012-2017

2012	2013	2014	2015	2016	2017
6,73	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018



2.2.1.3. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Palangka Raya atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,34 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 52,65 juta rupiah (lihat tabel 2.7), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya (juta rupiah) Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
PDRB (miliar rupiah)	7.577,9	8.637,9	9.825,9	11.289,0	12.792,9	14.514,0
Penduduk (jiwa)	236.831	244.454	252.105	259.865	259.865	275.667
PDRB per kapita (juta rupiah)	32,0	35,3	39,0	43,4	47,8	52,7
Pertumbuhan PDRB per kapita	9,87	10,43	10,34	11,46	9,99	9,3

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya Tahun 2017

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2017 naik menjadi Rp. 345.417,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 324.082,- per kapita per bulan. Sebaliknya persentase penduduk miskin turun menjadi 3,62% atau 9,91 ribu orang penduduk miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2012-2017

Tahun	Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk Miskin
2017	345.417	3,62	9,90
2016	324.082	3,75	9,96
2015	307.796	3,91	10,25
2014	299.328	3,81	9,68
2013	281.323	3,94	9,70
2012	258.381	4,24	10,10

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018

2.2.1.5. Tingkat pengangguran terbuka

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas tahun 2017 sebanyak 207.493 orang dengan 129.473 orang termasuk angkatan kerja. Dari jumlah tersebut terdapat 207.493 orang yang bekerja yang terdiri dari 106.315 laki-laki dan 101.178 orang perempuan. Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya sebesar 62,40% dan tingkat pengangguran sebesar 7,26 %.

Tabel 2.9 Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
5,03	3,36	6,30	6,30	7,26

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018

2.2.1.6. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Secara umum Indeks Gini Kota Palangka Raya memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin “tidak merata” dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.10 Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
0,363	0,365	0,338	0,330	0,379

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).



Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kota Palangka Raya merupakan kota dengan IPM tertinggi sebesar 79,21.

Tabel 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
78,02	78,50	78,62	79.21	79.69

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

1) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Dari Tabel 2.12 dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya tahun 2013-2017 telah melampaui target. Perkembangan capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.12 Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
98,45	98,68	99,28	99,47	99,56

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2018

2) Rata-rata Lama Sekolah

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Secara umum Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 mencapai 11,03 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya



(11,02 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Palangka Raya baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 11 SLTA atau putus sekolah di kelas 2 SLTA. Berikut data rata-rata lama sekolah tahun 2013-2017.

Tabel 2.13 Rata-rata Lama Sekolah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
10,69	10,73	10,74	11,02	11,03

Sumber: BPS Palangka Raya Dalam Angka, 2018

2.2.2.2. Kesehatan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang kesehatan ditunjukkan oleh indikator angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian ibu (AKI).

1) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup penduduk di Kota Palangka Raya dalam kurun 2013 hingga 2017 tahun, perkembangan Usia Harapan Hidup penduduk di Kota Palangka Raya dalam kurun 2013 hingga 2017 dapat disimak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14 Angka Usia Harapan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
72,85	72,95	72,97	73,05	73,13

Sumber: BPS Kalimantan Tengah Palangka Raya, 2018

2) Kasus Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan atau pun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 ditemukan 2 kasus gizi buruk, menurun jika dibandingkan pada tahun 2016 ditemukan 3 kasus gizi buruk yang ditimbang baik di puskesmas juga di posyandu. Angka tersebut sama jika dibandingkan tahun 2015, gizi buruk mencapai 2 balita. Namun pemberian PMT Tahun 2017 mencapai 78,9%, menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yaitu 89,59%. Hal tersebut disebabkan beberapa hal antara lain; Pola asuh balita oleh ibu atau keluarganya, dan asupan gizi pada balita perlu mendapatkan perhatian.



Perlunya peningkatan penyuluhan gizi yang lebih intensif di posyandu maupun di puskesmas, secara terpadu antar program kesehatan, atau dengan terintegrasi melalui program lain (lintas sektoral seperti PKK, Dharma Wanita, atau kegiatan sosial lainnya).

Tabel 2.15 Prevalensi status gizi (BB/U) pada anak umur 0-59 bulan (Balita) Kota Palangka Raya Tahun 2018

Gizi Buruk (%)	Gizi Kurang (%)	Gizi Baik (%)	Gizi Lebih (%)	N Tertimbang
5.12	16,40	72,16	6.33	214

Sumber: Riskesdas 2018

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah ibu yang meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup. Sama halnya dengan angka kematian bayi, angka kematian ibu (AKI) juga merupakan indikator yang sangat penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat. Kedua indikator ini menjadi primadona dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian maternal di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 mencapai 19,15/100.000 KH menurun jika dibanding tahun 2016 mencapai 19,65/100.000 KH dan tahun 2015 adalah 52,99/100.000 KH, dengan penyebab kematian ibu adalah komplikasi obstetri yaitu rupture uteri yang menyebabkan pendarahan. Walaupun angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan target Angka Kematian Ibu (AKI) Nasional dalam rangka pencapaian SDGs pada tahun 2019 sebesar 306/100.000 KH, dan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2016 berdasarkan target Renstra sebesar 25/100.000 KH, namun peningkatan angka kematian ibu mencerminkan mutu pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin dan melahirkan, memerlukan perhatian dari pengelola program dan pemerintah daerah. Sistem pelayanan kesehatan rujukan harus diperkuat, sarana dan prasarana PONEC di beberapa puskesmas ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, juga peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melahirkan di sarana pelayanan kesehatan bagi ibu hamil resiko tinggi. Sistem kemitraan dengan dukun bayi perlu digalang kembali, supaya proses pendampingan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini:

Tabel 2.16 Angka Kematian Ibu di Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Capaian	53,9	72,6	52,99	19,65	19,15
Target	25	50	45	35	25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2018

4) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. Menurunnya angka kematian bayi merupakan indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena indikator ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar yang paling awal dan juga menentukan kualitas pelayanan kebidanan yang juga sangat menentukan kualitas generasi yang akan datang. Angka kematian bayi di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 adalah 1,34/1000 KH, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 mencapai 1,18/1000 KH dan tahun 2015 mencapai 3/1000 KH. Penyebab kematian antara lain adalah : asphyxia berat berjumlah 6 neonatus (86%) dan tetanus neonatorum berjumlah 1 bayi (14%). Dalam rangka pencapaian SDGs Tahun 2019, target AKB secara nasional pada tahun 2019 sebesar 24/1000 KH, dan target Renstra/RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebesar 9/1.000 KH, maka AKB Kota Palangka Raya sudah dibawah target atau sudah bisa menekan angka kematian. Namun memperhatikan angka tersebut dan berbagai penyebab kematian bayi, diharapkan kepada pengelola program kesehatan anak/bayi tidak terlena. Kemampuan teknis tenaga kesehatan dalam pertolongan dan pendampingan persalinan perlu terus ditingkatkan, disamping pemantapan supervisi dan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Tabel 2.17 Angka Kematian Bayi di Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Capaian	13,3	11,1	3	1,18	1,34
Target	1,3	13	12	10,5	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2018

5) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita didefinisikan sebagai jumlah balita (0-59 bulan) yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. AKABA di Kota Palangka Raya yang tercatat pada tahun 2017 mencapai angka 1,34/1000 KH, dimana 100% kasus berasal dari kematian bayi (0-11 bulan), dan 0%(nol) kasus kematian pada anak (12 – 59 bulan). Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan angka kematian balita setiap tahunnya yang berarti kinerja program dalam penurunan angka kematian balita berhasil dimana AKABA pada tahun 2016 mencapai 1,96/1000 KH, tahun 2015 mencapai 4/1000 KH, menurun jika dibandingkan tahun 2014 mencapai 0,73/1000 KH, tahun 2013 mencapai 14,5/1000 KH dan tahun 2012 mencapai 10,7/1000 KH.

Walaupun angka tersebut lebih rendah dari target SDGs pada tahun 2019 AKABA sebesar 32/1000 KH, namun keterampilan tenaga kesehatan dan kompetensi teknis dalam pelayanan kesehatan anak yang berkualitas perlu mendapat perhatian, juga penyuluhan kepada ibu balita tentang pola asuh perlu ditingkatkan. Angka Kematian Balita tersebut merupakan angka



yang telah tercatat namun ada kemungkinan bertambah karena pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan yang masih kurang intensif.

Tabel 2.18 Angka Kematian Balita di Kota Palangka Raya tahun 2013-2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Capaian	10,7	14,6	0,73	4	1,96	1.34
Target	35	35	10	10	8	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2018

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang Ketenagakerjaan ditunjukkan oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, di Kota Palangka Raya pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017, Perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19 Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya tahun 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Capaian	tad	59,01	65,72	65,72	62,40

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



Angka Partisipasi Kasar di Kota Palangka Raya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Palangka Raya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Kasar Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	98,33	98,56	98,58	98,61	53,71
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	126,84	106,8	117,4	103,15	103,85
3	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	108,02	107,0	105,9	101,22	102,56
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	102,60	100,6	103,3	105,76	PROV

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, 2018

b. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Murni di Kota Palangka Raya untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun-tahun tertentu terjadi peningkatan dan penurunan.

Tabel 2.21 Angka Partisipasi Murni Kota Palangka Raya, 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	94,00	98,56	98,58	98,61	53,73
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,56	92,56	91,37	96,94	87,97
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,09	95,41	99,17	98,79	70,32
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	90,36	93,10	94,56	PROV	PROV

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, 2018



c. **Indikator kinerja Bidang Pendidikan Lainnya**

Selanjutnya untuk indikator kerja pada bidang pendidikan lainnya seperti Angka putus sekolah, Angka kelulusan, Rasio Ketersediaan Sekolah, Angka Pendidikan yang di tamatkan, Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Guru Terhadap Murid, Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV, Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru, Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi, Angka kelulusan dan indikator lainnya dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.22 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Palangka Raya 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
A	Angka Putus Sekolah					
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,070	0,07	0,07	0,0034	0,19
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,110	0,11	0,11	0,090	0,02
3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,40	0,40	0,11	0,09	PROV
B	Angka Kelulusan					
1	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	99,56
2	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,75	98,81	98,95	99,66	98,88
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95,4	95,47	95,89	98,16	PROV
C	Rasio Ketersediaan Sekolah					
1	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	7,23	4,9	4,6	4,8	0,43
2	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS	5,6	5,9	4,4	4,5	0,46
3	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA	4,23	5,8	3,08	3,40	PROV
D	Angka Pendidikan yang di tamatkan					
1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	100	100	100	100	99,56
2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	56,10	70,20	73,78	89,15	98,88
3	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA	98	96,90	97,7	98,8	PROV
4	Rata-Rata Lama Sekolah					
E	Rasio Guru Terhadap Murid					
1	Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA	12,28	107,2	54,10	108,43	
2	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS	12,04	102,90	75,19	104,98	16,06
3	Rasio Guru terhadap Murid	8,82	93,07	58,76	95,15	17,04



No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
	SD/MI					
4	Rasio Guru terhadap Murid PAUD	14,27	22,23	104,72	106,81	40,63
F	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah (per 1000 Penduduk)					
1	SD/MI	7,23	4,9	4,6	4,8	0,43
2	SMP/MTs	5,6	5,9	4,4	4,5	0,46
3	SMA/SMK/MA	4,23	5,8	3,08	3,40	
G	Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV	90,17	90,17	91,21	93,25	84,70
H	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	50,14	6,24	89,85	65,94	67
I	Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	30	15	25	11	20
J	Angka kelulusan					
1	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	99,56
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	98,75	98,81	98,95	99,66	98,88
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95,4	95,47	95,89	98,16	PROV
	Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya	17	16	16	16	PROV

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, 2018

2.3.1.2 Kesehatan

a) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Rasio puskesmas terhadap penduduk pada tahun 2017 mencapai 3,37/100.000 penduduk, masih jauh di bawah target 5/100.000 penduduk, ini berarti secara kuantitas sarana kesehatan masih harus di tambah seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya yang terus meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk	4,3	4,09	4	4	3,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2018

b) Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk

Indikator dari program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah rasio rumah sakit terhadap penduduk. Tahun 2017 Kota Palangka Raya berhasil meningkatkan rasio RS sebesar 0,37 per 100.000 penduduk, target dalam RPJMD Kota Palangka Raya adalah 0,04 per



100.000 penduduk. Capaian kinerja untuk rasio RS adalah 925 atau berhasil meningkatkan rasio RS 9,25 kali lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD Kota Palangka Raya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	0	0,4	0,4	0,19	0,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2018

c) Rasio Dokter dan Tenaga Medis per satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 sebesar 13,8 masih jauh dari target sebesar 32,8, Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk pada tahun 2017 sebesar 1,87 inidikator ini telah melampaui target sebesar 1,4, Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk pada tahun 2017 sebesar 4,48 masih jauh dari target sebesar 9,8, Rasio Perawat per 100.000 Penduduk pada tahun 2017 sebesar 67,59 masih jauh dari target yaitu sebesar 74,3, dan Rasio Bidan per 100.000 Penduduk sebesar masih dibawah target yaitu 91,8 , berarti Rasio dokter dan tenaga medis di kota Palangka Raya perlu dilakukan penambahan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.25 Rasio Dokter dan Tenaga Medis per satuan Penduduk di Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	15	13,5	16,71	15,02	13,8
2	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk		0,409	0,8	0,75	1,87
3	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	4,8	3,68	5,57	4,8	4,48
4	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk	75,8	67,5	64,65	87,8	67,59
5	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	69,7	116,32	61,48	73,15	73,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2018

d) Demam Berdarah Dengue (DBD)

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes Agepty. Penyakit DBD cenderung meningkat dan menyebar luas dan seringkali disertai kejadian luar biasa (KLB), sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat karena menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan kematian. Penderita DBD di Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir disertai dengan kematian, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.26 Indikator DBD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator DBD	2013	2014	2015	2016	2017	Standar
1	Angka Kesakitan/ 100.000 penduduk	40,9	97,8	111,8	84,7	57,8	50
2	Angka kematian (%)	3,2	0,4	1,1	0,9	2,6	<1%
3	Angka Bebas Jentik (%)	86,7	85,6	85,1	-	-	95%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus DBD pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 57,8/100.000 penduduk dengan 155 kasus DBD dibandingkan pada tahun 2016 mencapai 84,7/100.000 penduduk dan tahun 2015 mencapai 11,7/100.000 penduduk. Meskipun terjadi penurunan namun angka tersebut diatas standar yang ditetapkan yaitu 50/100.000 penduduk dengan angka kematian (CFR) sebesar <1%. Masalah justru pada kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) pada tahun 2016 dan 2017 tidak lagi dilaksanakan, sehingga monitoring terhadap pertumbuhan serta penyebaran nyamuk DBD tidak bisa dipantau. PJB juga membantu kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungan masyarakat. Dengan angka Bebas Jentik yang rendah, memicu suatu lingkungan harus segera diadakan PSN, baik melalui partisipasi dengan masyarakat, maupun dengan mengendalikan pemberantasan nyamuk melalui *fogging* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Kemudahan transportasi dan tingkat mobilitas penduduk mempengaruhi penyebaran penyakit DBD karena di Kota Palangka Raya sebaran kasus umumnya terjadi di daerah perkotaan. Peran serta masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sangatlah rendah. Pengelolaan sampah belum berjalan sesuai ketentuan, hal ini terlihat dari sampah anorganik yang belum terkelola dengan baik akan berpotensi sebagai perindukan vektor. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sangatlah diperlukan, dengan metode yang tepat, sistematis, dan dengan frekuensi yang lebih gencar sehingga menciptakan suatu gebrakan di masyarakat dalam PSN, diharapkan akan berhasil menurunkan kasus DBD secara signifikan Kasus DBD telah menyebar di 19 kelurahan dari 30 kelurahan yang ada; terdiri 8 kelurahan endemis, 10 kelurahan sporadis dan 1 kelurahan potensial DBD. Penularan Kasus DBD pada tahun 2017 terjadi hampir pada 4 kecamatan. Penularan umumnya terjadi di daerah padat penduduk dengan mobilitas cukup tinggi.

e) Malaria

Jumlah kasus malaria di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 telah mengalami penurunan dimana kejadian malaria di Kota Palangka Raya merupakan kasus malaria impor. Malaria impor merupakan kasus malaria positif yang penularannya terjadi di luar wilayah. *Annual parasite incidence* (API) di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 adalah 0,06 per 1000



penduduk. API ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran kasus malaria impor diberbagai wilayah Kota Palangka Raya sehingga dapat dilihat *breeding site* untuk deteksi dalam pencegahan kasus malaria. Pada tahun 2017, pasien yang diduga (*suspect*) terkena malaria langsung dilakukan pemeriksaan dengan RDT (*Rapid Diagnostict Test*) sehingga langsung dapat mengetahui hasilnya sehingga dapat diketahui bahwa terjadi penurunan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 1.764 (*supect*) dan hasil laboratorium sebanyak 32 positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.27 di bawah ini:

Tabel 2.27 Angka Kesakitan Malaria Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk	-	0,35	0,35	0,22	0,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2018

f) TB Paru

Tuberculosis atau sering disebut TB adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang terinfeksi basil TB. Umumnya menyerang organ paru, namun dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Bersama dengan Malaria dan HIV / AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDGs.

Penemuan penderita merupakan langkah pertama dalam kegiatan program penanggulangan TB. Upaya penemuan penderita dilakukan secara pasif dengan promosi aktif, artinya penjarangan penderita dilakukan di unit pelayanan kesehatan pada saat penderita datang untuk berobat didukung dengan penyuluhan aktif. Keberhasilan pengobatan TB Paru diukur antara lain melalui penemuan dan pengobatan penderita dan tingkat kesembuhan penderita yang diobati dengan menggunakan strategi DOTS.

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR) yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Target minimal CDR yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah 70%.

Tabel 2.28 Angka Prevalensi TB Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Penemuan Kasus (<i>Case Detection Rate</i>) TB Di Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	25	48	28,39	25	25,8
2	Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk	-	32	61,3	48,8	54,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2018

Di Kota Palangka Raya angka prevalensi TB-BTA(+) tahun 2017 mencapai 54,04 per-100.000 penduduk, mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka prevalensi TB-BTA(+) pada tahun 2016 yaitu 48,8 per-100.000 penduduk. *Case Detection Rate* (CDR) di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 mencapai 25,8% meningkat dibandingkan tahun 2016 mencapai 25% sehingga CDR di Kota Palangka Raya belum mencapai target nasional.

Di Kota Palangka Raya jumlah penderita TB paru yang berobat di unit pelayanan kesehatan (UPK) serta mendapat pengobatan yang sesuai standar, pada tahun 2017 sebanyak 149 kasus dengan perkiraan jumlah penderita TB paru sebanyak 578 sehingga pemegang program TB Paru diharapkan untuk lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan program pengendalian TB yang berlaku saat ini dengan mengutamakan berfungsinya jejaring diantara fasilitas pelayanan kesehatan.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan yang paling dibutuhkan di Kota Palangka Raya karena ada banyak ketergantungan pengembangan ekonomi, sosial dan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Penyediaan infrastruktur dasar yang merata di seluruh Kota Palangka Raya merupakan hal mutlak untuk mewujudkan kota yang madani, dengan pengelolaan pembangunan fisik kota yang meliputi sistem transportasi yang memiliki interkoneksi antar wilayah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan, air bersih, listrik dan telekomunikasi bagi masyarakat Kota Palangka Raya perlu diidentifikasi dalam bentuk indikator antara lain: perkembangan pembangunan jalan, perkembangan pembangunan jaringan irigasi, perkembangan pembangunan infrastruktur sosial dan kebersihan.

Kondisi umum jalan raya Kota Palangka Raya terdiri dari jaringan jalan regional di Kalimantan Tengah yang menunjukkan ruas-ruas utama yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan kota-kota regional ke barat dan selatan. Jalur utama dari pusat kota adalah arah Sampit sampai ke Pangkalanbun, arah Kuala Kapuas sampai ke Kalimantan Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Palangka Raya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal tetapi juga lalu lintas eksternal. Lalu lintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk dan keluar Kota Palangka Raya.

Prasarana jalan hingga tahun 2017 tercatat sepanjang 911,83 km dengan jenis permukaan aspal sepanjang 472,93 km, tidak diaspal sepanjang 433,334 km, lainnya 5,564 km. Bila dilihat dari jenis kondisi total panjang jalan pada tahun 2017 tercatat dengan panjang 911,83 km, jalan dengan kondisi baik sepanjang 206,23 km, sedang 285,63 km, rusak 215,90 km, rusak berat 204,27 km. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.29 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km) Tahun 2013-2017

Tahun	Jenis Permukaan				Jumlah
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	
2017	472,93	20,340	412,994	5,564	911,83
2016	469,03	21,09	416,14	5,57	911,83
2015	450,56	27,90	430,75	2,62	911,83
2014	333,30	38,77	509,09	30,67	911,83
2013	304,81	25,18	554,84	27,00	911,83

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2018

Tabel 2.30 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2012-2016

Tahun	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
2017	206,03	285,63	215,90	204,27	911,83
2016	180,06	276,51	241,34	213,92	911,83
2015	195,73	207,77	197,94	310,39	911,83
2014	122,26	135,68	404,81	249,09	911,83
2013	104,02	141,56	259,57	406,69	911,83
2013	304,81	25,18	554,84	27,00	911,83

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2018

Capaian kinerja lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (Km)	33	47,2	50,07	53,92	55,16
2	Jembatan dalam kondisi baik	0	0	0	6,03	3,03
3	Drainase dalam Kondisi Baik	40	43	46	49	49,30
4	Rasio Kerusakan Jalan per Tahun	67	52,80	49,93	46,08	44,88
5	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik	20	40,78	51,88	62,66	74,54
6	Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik (Km)	60,93	61,04	61,15	61,30	61,39

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2018

2.3.1.4 Perhubungan

Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan berbagai sarana, fasilitas, dan pelayanan yang ada di Bandara Udara Tjilik Riwut. Terdapat maskapai penerbangan nasional yaitu Garuda, Lion Air, City Link, Batik Air, Wing Air, yang melayani rute Kota Palangka Raya-Jakarta dan Kota Palangka Raya-Surabaya setiap hari, serta 1 (satu) maskapai penerbangan Susi air yang melayani penerbangan perintis dari Kota Palangka Raya ke ibu kota kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya pada tahun 2016, masing-masing sebanyak 3.976 kali dan 3.975 kali. Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Kedatangan penumpang terjadi peningkatan dari 330.523 di tahun 2015 naik menjadi 414.518 pada tahun 2016.

Angkutan darat terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor tahun 2014 sebanyak 117.687 buah, yang terdiri dari Sedan, Jeep (pribadi/personal) 16.784 buah, Sedan, Jepp, Wagon (umum/public) 322 buah, Bus, Mini Bus (pribadi/personal) 82 buah, Bus, Mini Bus (umum/public) 51 buah, Truck, Pick Up (pribadi/personal) 6.519 buah, Truck, Pick Up (umum/public) 690 buah, Kendaraan Khusus, Alat Berat/Berat (pribadi/personal) 5 buah, Kendaraan Khusus, Alat Berat/Berat (umum/public) tidak ada, serta Sepeda Motor Roda Dua sebanyak 93.234 buah.

Lalu lintas kapal keluar masuk dan barang di Pelabuhan Rambang, Dermaga Kereng Bangkirai, dan Dermaga Sabangau Kota Palangka Raya tahun 2016, masing-masing 526 dan 117, sedangkan barang yang masuk tahun 2016 adalah 1.190 ton. Sistem transportasi sungai merupakan transportasi yang bersifat tradisional dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk Kota Palangka Raya sejak dahulu. Kelurahan disebagian wilayah Kota Palangka Raya sebagian berada di tepi sungai sehingga transportasi sungai masih menjadi pilihan oleh sebagian penduduk menjalankan aktifitas perekonomian. Indikator Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji)	12.256	11.516	10.445	10541	10.099
2.	Rasio Ijin Trayek (%)	tad	0,184	0,184	0,184	0,095
3.	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	tad	0,160	1,30	0,472	0.472
4.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	tad	59.350	37,630	63.651	63.651
5.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)	30	30	30	30	30

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, 2018

2.3.1.5 Lingkungan Hidup

Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan lingkungan hidup baik penanganan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kapasitas daya dukung lingkungan dan kehutanan yang terdiri dari 10 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau *supporting* program prioritas.

Permasalahan mendesak dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang daerah antara lain: kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan. Demikian pula budaya hidup di pinggiran sungai akan cenderung kumuh memperbesar kecenderungan musibah banjir; lahan tidur belum termanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan hutan; ketidak disiplin terhadap penggunaan ruang dan banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB.

Tutupan lahan berkaitan erat dengan penggunaan lahan. Data liputan lahan yang juga dapat diasumsikan sebagai data penggunaan lahan diturunkan data penjabarannya hingga didapatkan klasifikasi tutupan lahan oleh vegetasi permanen. Dari hasil interpretasi Peta Penggunaan Lahan (*Land Use*) Kota Palangka Raya Tahun 2015, yang dikompilasi dengan hasil *cross check* di lapangan, didapatkan data kondisi tutupan lahan Kota Palangka Raya yang terkini. Wilayah Kota Palangka Raya didominasi oleh Hutan Rawa Sekunder (49,84 %) dan Belukar Rawa (29,60 %). Sedangkan wilayah pemukiman hanya menempati 4,66% dari luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Indikator Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%)	80	80	80	90	90
2.	Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan (HO) (Ijin Usaha)	362	362	582	573	573
3.	Presentase Penegakan Hukum Lingkungan	100	100	90	87	25
4.	Jumlah Pengambilan Sampel (Kali/Tahun)	4	4	13	6	6
5.	Peningkatan Mutu Udara/ISPU (Hari/ Tahun)	289	289	180	310	310
6.	Persentase Sampah yang Tertangani	Tad	Tad	65	48,72	48,72
7.	Jumlah TPS terhadap Penduduk (Unit)	Tad	Tad	Tad	121	121
8.	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Unit)	1	1	1	1	1
9.	Jumlah PKL yang Dibina per Tahun	587	587	650	700	700

Sumber: Badan lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 2018

Tabel 2.34 Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di Kota Palangka Raya Tahun 2007 - 2016

Tahun	Banjir	Kebakaran	Tanah Longsor	Angin Puyuh	Disambar Petir	Jumlah
2016	-	16	-	-	-	16
2015	2	124	-	5	-	131
2014	-	23	-	2	-	25
2013	1	21	-	2	-	24
2012	2	31	-	2	-	35
2011	1	13	8	-	-	22
2010	29	16	-	-	1	46
2009	-	42	-	4	-	46
2008	3	33	-	-	-	36
2007	12	15	-	2	-	29

Sumber: BPS Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2017

Banjir yang kerap terjadi di Kota Palangka Raya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti (1) Meluapnya arus Sungai Kahayan dan Sungai Sabangau; (2) Kondisi topografi Kota Palangka Raya yang relatif datar; (3) Jaringan drainase yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan konsep penanganan banjir. Meskipun banjir menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan, namun pembangunan jaringan drainase belum cukup menjadi perhatian. Pemerintah Kota Palangka Raya belum memiliki kajian dan *masterplan* sistem drainase serta *database* pendukung di bidang pengairan sebagai bahan mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir; (4) Belum terdapat upaya pengelolaan kelebihan air, seperti membuat kolam retensi, biopori, maupun sumur- sumur resapan. Sedangkan bencana kebakaran biasanya terjadi di kawasan perkotaan dan kawasan hutan.

2.3.1.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tolok ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis potensi kependudukan adalah melalui jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Komponen jumlah penduduk digunakan untuk menganalisis proporsi sebaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan laju pertumbuhan pertumbuhan berdasarkan kewilayahan. Sedangkan, komponen distribusi kepadatan penduduk digunakan untuk melakukan analisis kecenderungan distribusi kepadatan penduduk per wilayah kecamatan, aksesibilitas fasilitas publik, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk yang besar menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi di suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan sosial ekonomi. Pada satu sisi, kepadatan penduduk yang tinggi di suatu wilayah menunjukkan potensi sosial ekonomi wilayah yang besar, kemudahan aksesibilitas fasilitas publik yang ada dan tingginya aktivitas sosial ekonomi penduduk.



Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pengelolaan informasi dan penataan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 9 program, terdiri dari 5 program prioritas dan 4 program yang merupakan operasional atau *supporting* program prioritas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk (%)	56	56	51	60	60
2.	Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%)	78	78	89	95	95
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)	65	65	56,88	65	65
4.	Kepemilikan KTP (%)	66	66	64	70	70
5.	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	37	37	46	56	56

Sumber: RKPD Kota Palangka Raya 2017

2.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Program-program yang dilaksanakan baik dilakukan secara langsung oleh Perangkat Daerah teknis maupun program yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan keterampilan, untuk peningkatan kapasitas perempuan secara khusus untuk mendorong peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga sejalan dengan kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya di Kota Palangka Raya, akan tetapi diintegrasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio KDRT	7	6	0	0	0
2.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	1	0	0	5	4
3.	Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan	Tad	40,50	40,25	42,25	43,25
4.	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	85	6	100	100	21,42



5.	Persentase Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah	62,54	23	62,49	0,27	64,83
6.	Partisipatif Perempuan di Lembaga Swasta	Tad	tad	1.145	0,27	Tad
7.	Jumlah Forum Anak	Tad	35	36	12	Tad
8.	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Tad	4	31	0	Tad
9.	Indeks Pemberdayaan Gender	93,56	93,80	94,30	Tad	Tad

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, 2017

2.3.1.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga Berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program Keluarga Berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan.

Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Untuk capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.37 Tabel Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	2,8	2,4	2,3	1,87	0,25
2.	Persentase Akseptor KB	88	40,55	92,96	85,5	86,89
3.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	31.253	40.565	43.715	37.098	Tad
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	10.986	11.186	11.136	10.25	9.960
5.	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Tad	Tad	Tad	1	Tad

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, 2017

2.3.1.9 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kota Palangka Raya mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pengembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Untuk melihat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.38 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran - Skala Nasional - Skala Lokal	tad	4 30	26 210	29 240	6 305
2.	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah -Koperasi -UMKM	tad	5	23	28	6 15.865
3.	- Jumlah Koperasi Sehat - Jumlah Koperasi Berkualitas	tad	4 3	48 21	52 24	
4.	Persentase Koperasi Aktif	tad	3	88,19	88,28	253
5.	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan	tad	30	360	30	70 120

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, Tahun 2017

2.3.1.10 Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM - PTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2017 ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat guna menyediakan mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih akurat yang bertanggung jawab, transparan dan apa adanya.

Untuk tahun 2014, target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 400,00 M dengan capaian realisasi sebesar Rp. 394.130.000.000,- atau sebesar 98,53 %. Untuk tahun 2015 target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 440,00 M dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.171.850.000.000,- atau sebesar 266 %. Untuk tahun 2016 target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 484,00 M dengan capaian realisasi sebesar Rp. 616.120.000.000,- atau sebesar 127,3 %. Sedangkan untuk tahun 2017 mengalami penurunan hasil nilai investasi dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 532.40 M dan hanya memenuhi nilai realisasi sebesar Rp. 259.260.000.000,- atau 48,7 %. Untuk capaian kinerja indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.39 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	Tad	PMDN = 394.130 PMA = 19.097.090	PMDN =Rp. 1,171 T PMA = US\$ 9.989.000	PMDN=Rp .616,12M PMA = US\$-	259,26 M
	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Tad	PMDN =99,99PMA = 99,88	PMDN = 68% PMA = 26%	PMDN = - PMA = -	Tad
	Jumlah investor PMA/PMDN	PMDN= 7 PMA = 26	PMDN = 6 PMA =22	PMDN =68 PMA =26	PMDN = 101 PMA = -	PMDN= 73 PMA = -
	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan)	Tad	0% perusahaan menyampaikan LKPM nya secara berkala	24% perusahaan menyampaikan LKPM nya secara berkala	17,82% perusahaan menyampaikan LKPM nya secara berkala	44,69% perusahaan menyampaikan LKPM nya secara berkala

Sumber: LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2017

2.3.1.11 Kebudayaan dan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan. Berikut beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Palangka Raya,

1. Destinasi Wisata Budaya:

Batang Mandala Wisata, Sandung Bawi Kuwu, Desa Wisata Sei Gohong, Museum Balanga.

2. Destinasi Wisata Buatan:

Fantasy Beach, Danau Tahai, Kalawa Waterpark, Kapal Wisata Susur Sungai.

3. Destinasi Wisata Alam:

Batu Banama, TWA Bukit Tangkiling, Taman Nasional Sebangau, Pulau Kaja, Monumen Soekarno, Objek Wisata Kum-Kum, Danau Tahai, Sanggar Seni, Rungan Sari Resort, Bumi Perkemahan Nyaru Menteng, Bumi Perkemahan Tuah Pahoe, Kolam Renang dan Golf Isen Mulang,



Pasar Blauran, Kawasan Souvenir Shop Jalan Batam, Hutan Ulin Mungku Baru, Danau Kereng Bangkirai, Sei Batu, Arboretum Nyaru Menteng dan BOSF, Kapal dan Klotok Wisata Susur Sungai, Wisata Terpadu Flamboyan, Wisata Outbond dan Outdoor Anak Himba

4. Destinasi Wisata Religi:

Tajahan Tjilik Riwut, Makam Kubah Kuning, Sandung Ngabe Sukah, Bukit Karmel, Pura Sali Paseban Batu, Hindu Kaharingan

Secara umum Kota Palangka Raya memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Potensi pariwisata yang ada dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk melihat capaian kinerja dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40 Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan wisata(orang)	100.450	110.455	43.875	390.152	341.203
2.	Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan dan Dilestarikan (ODTW)	0	0	9	8	0
3.	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata	15	17	21	80	23
4.	Jumlah Promosi (Kali)	8	8	9	32	5
5.	Jumlah SDM Pariwisata (Orang)	75	89	68	301	40

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Tahun 2017

2.3.1.12 Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional badan, mengendalikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dibidang kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	10	12	12	11	12
2.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	10	30	50	65	90
3.	Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga	tad	98/666	92/666	582/666	582/666
4.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	tad	0,11	0,004	0,12	0,12

Sumber: LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Palangka Raya, 2017

2.3.1.13 Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah terkait dengan perangkat daerah di Kota Palangka Raya selama periode 2013-2017 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	8,71	6,78	8,84	7,42	7,63
2.	Persentase Jumlah Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol. PP	tad	12,04	8,07	8,07	22,39
3.	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	47,04	tad	tad	0,12	46,79
4.	Rasio Poskamling per Jumlah RT	31,00	tad	tad	852/666	297/666
5.	Jumlah demo yang dikendalikan (kegiatan)	tad	5	3	0	0
6.	Persentase Penegakkan PERDA (%)	tad	50,00	61,53	82,78	97,67
7.	Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	tad	90,00	92,00	93,33	94,44
8.	Persentase Penanganan konflik di masyarakat (%)	tad	90,00	92,00	92,54	94,44
9.	Cakupan patroli petugas Satpol.PP (Wilayah)	4	4	4	4	4
10.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100

Sumber: LAKIP Satpol PP Kota Palangka Raya, 2017

- a) Indikator kinerja 1: Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk hanya mencapai 7,63 dan ini mengalami penurunan realisasi kinerja dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan variabel jumlah penduduk yang semakin bertambah sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja berkurang. Pada tahun 2017 terdapat jumlah



- Personil 195 orang (PNS dan PTT) sebanyak 67 orang PNS dan 128 orang PTT berbanding dengan jumlah penduduk sebanyak 255.450 jiwa, dengan capaian Kinerja Tahun 2017 sebesar 89,66 %.
- b) Indikator kinerja 2: Persentase Jumlah Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol PP bernilai 22,39 dan ini mengalami penurunan realisasi kinerja jika berdasarkan pada target tahun 2017 yang bernilai 29,47. Karena jumlah yang mengikuti diksar Satpol PP sebanyak 15 orang berbanding dengan jumlah PNS sebanyak 67 orang, sehingga terdapat nilai realisasi 22,39 dengan Capaian Kinerja 75,97 %.
 - c) Indikator kinerja 3: Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk pada tahun 2017 bernilai 46,97 tapi jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang bernilai 0,01 hal ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dan itu sangat tidak relevan dengan fakta lapangan. Jika berdasarkan hal tersebut diatas capaian realisasi dianggap 100%.
 - d) Indikator kinerja 4: Rasio Jumlah Poskamling per Jumlah RT pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai 297/666. Penurunan target kinerja yang terjadi pada tahun 2017 sangat drastis sehingga target realisasi tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan rasio yang ditetapkan RPJMD sebanyak 1084/666.
 - e) Indikator kinerja 5: Jumlah demo yang dikendalikan (kegiatan) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selama Tahun 2017 bernilai 0. Walaupun jumlah demo yang terjadi di wilayah Kota Palangka Raya berjumlah 6 kali. Namun demo masih dapat ditangani oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan jumlah pendemo berbanding terbalik dengan jumlah aparat kepolisian. Maka dari hal itulah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tidak pernah dilibatkan secara langsung. Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam posisi siaga jika aparat kepolisian meminta secara khusus untuk membantu pengamanan demo. Kategori : Tidak Berhasil.
 - f) Indikator kinerja 6: Persentase Penegakkan PERDA mengalami kenaikan realisasi kinerja di tahun 2017, hal ini disebabkan karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya melakukan kegiatan patroli dan penertiban serta pengecekan terhadap pelanggaran Perda, prioritas utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah menegakan Peraturan Daerah yang antara lain (1) Perda Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan PKL; (2) Perda Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir; (3) Perda Kota Palangka Raya Nomor 09 tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan; dan (4) Perda Kota Palangka Raya Nomor 03 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dari kegiatan Patroli/Penertiban, pengecekan dan peninjauan pelanggaran Perda ditambah jumlah pengaduan masyarakat berjumlah sebanyak 86 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 84 kasus, Nilai capaian indikator untuk Penegakan Peraturan Daerah bernilai 97,67 dari target 77,60. Dengan capaian kinerja sebesar 125,86%.

- g) Indikator kinerja 7: Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditangani berjumlah 36 kasus pengaduan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2017. Kasus yang dapat ditangani 34 kasus, sehingga realisasi bernilai 94,44 dan ini mengalami penurunan dari target. Berdasarkan rasio target yang ditetapkan pada tahun 2017 yang bernilai 97,57, maka nilai capaian indikator ini adalah 96,79%.
- h) Indikator kinerja 8: Persentase Penanganan konflik di masyarakat berdasarkan surat pengaduan yang masuk ke Satpol PP selama Tahun 2017 tercatat 18 kasus, Konflik masyarakat yang terjadi hal ini disebabkan laporan pengaduan masyarakat berhubungan dengan masalah polusi udara yaitu adanya ternak hewan baik unggas maupun ternak yang bias dipelihara di tengah masyarakat yang menyebabkan bau tidak enak dan suara yang mengganggu, dan hal ini ditangani baik melalui sosialisasi perda maupun tindakan langsung seperti pelaku membongkar sendiri, penutupan maupun penyegelan, sehingga kasus ini bisa ditangani walaupun masih ada kasus yang belum selesai tertangani. Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja bernilai 94,44 dari target 97,70. Dan ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan dari target yang diharapkan. Maka capaian Kinerja pada tahun 2017 sebesar 96,66%.
- i) Indikator kinerja 9: Cakupan patroli petugas Satpol PP di wilayah Kota Palangka Raya pada Tahun 2017 hanya bisa mengcover 4 kecamatan dari 5 Kecamatan, kecamatan yang belum bisa tercover itu adalah Kecamatan Rakumpit. Hal ini dikarenakan medan tempuh yang jauh dan adanya beberapa wilayah yang harus menggunakan transportasi air untuk mencapai beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Rakumpit tersebut. Adapun 4 (empat) wilayah yang tercover patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya meliputi Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Sebangau. Maka realisasi cakupan untuk Patroli.
- j) Indikator kinerja 10: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Pada Tahun 2017 sebesar 46 kasus yang penyelesaian melalui Tipiring melalui Pengadilan. Sehingga nilai realisasi yang didapat pada Tahun 2017 adalah 100, dengan target yang dicapai tersebut Satpol PP memiliki nilai capaian 100 %. Jika melihat kondisi yang ada di wilayah Kota Palangka Raya dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi hal ini bisa menjadikan salah satu indikator tingkat K3 yang aman dan kondusif.

2.3.1.14 Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan taget kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kota Palangka Raya. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2017 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 sesuai dengan agenda Walikota Palangka Raya *road to WTP 2017*.



Tabel 2.43 Capaian kinerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
2.	Nilai Evaluasi Kinerja	C	C	C	CC	CC
3.	Produk Hukum Daerah (Legislasi)	10	13 (3 Perda 10 Perwali)	4	12	10

Sumber: LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, 2017

2.3.1.15 Ketahanan Pangan

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2015-2017 ketersediaan pangan antara 25.319,88 ton/tahun dalam bentuk beras. Dari aspek jumlah menunjukkan bahwa pangan yang ada telah mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya yang memerlukan pangan dalam bentuk beras sebesar antara 23.018,07-23.765,59 ton/tahun. Dengan demikian kalau dilihat dari kebutuhan dan ketersediaan beras yang ada masih ada kelebihan beras sebesar antara 2301,81- 2376,56 ton/tahun. Melihat kondisi yang demikian itu maka Kota Palangka Raya tidak kekurangan beras, tetapi beras yang beredar justru sebagian besar bukan berasal dari Kota Palangka Raya atau didatangkan dari luar misalnya dari Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kalimantan Selatan bahkan dari Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan karena produksi di Kota Palangka Raya belum mampu mencukupi kebutuhan pangan utama masyarakat. Kontradiktif dengan luasnya Kota Palangka Raya, kurangnya produksi beras tersebut disebabkan karena untuk menanam padi dan memeliharanya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh petani. Sebagai kota yang berkembang cepat, tentu memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah dengan areal pertanian yang pemanfaatan untuk sektor lain misalnya jasa, perdagangan tentu berakibat makin sempitnya lahan pertanian. Untuk melihat capaian kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)	33,759	102,49	35.638	35.638
2.	Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%)	tad	82	91,6	91,6
3.	Persentase Konsumsi(Kg/Kapita/Tahun)	tad	35	41	41
4.	Konsumsi Energi	tad	2000	2118,6	2118,6
5.	Konsumsi Protein	tad	25	66	66
6.	Pangan Utama (Ton)	33,759	26.639	35.638	35.638



7.	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr)	2,770	2.748	2.938	2.938
8.	Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	88,42	89.91	97,25	97,25

Sumber: RKPd Kota Palangka Raya, 2016

2.3.1.16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah perpustakaan yang berada di Kota Palangka Raya pada tahun 2014 sebanyak 50 perpustakaan, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 49, pada tahun 2016 tetap sebanyak 49 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 50 perpustakaan. Dari tahun 2014-2016 koleksi buku perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Jumlah pengunjung Perpustakaan pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45 Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dibina	50	49	49	50
2.	Jumlah Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	14.018	18.851	23.546	18.124
3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	1.848	16.907	16.931	16.626
4.	Pengelolaan arsip secara baku	2,86	100	12,12	22,23
5.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	tad	103 orang	100 orang	28 orang

Sumber: LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, 2017

2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informasi layanan komunikasi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan intelektual masyarakat dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi yang semakin pesat, keberadaan layanan komunikasi dan informasi ini dapat mendukung kemajuan usaha diberbagai sektor bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Pada Tahun 2017 Jumlah Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi adalah 4 OPD dari 36 OPD / Kecamatan atau sebesar 11% dari Target 40%. Artinya Indikator Kinerja diatas dikategorikan kurang berhasil, untuk melihat capaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

Kinerja Pelayanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangannya seperti yang tertuang dalam Revisi RPJMD dengan mengacu pada indikator kinerja sesuai dengan target SDG's dan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut disampaikan detail data capaian kinerja pelayanan yang dikategorikan per bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya:

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Berdasarkan Nomenklatur baru pada Tahun 2017 Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi baru bergabung pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Dan pencapaian kinerja baru ada pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 telah membuka kran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembuka yang ada di setiap SOPD dan Kecamatan sebagai penyedia informasi publik.

Tabel 2.46 Daftar Nama Perangkat Daerah Yang sudah Membentuk PPID

No	Nama Perangkat Daerah
1.	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
2.	Inspektorat Kota Palangka Raya
3.	Dinas Kesehatan
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10.	Dinas Tenaga Kerja
11.	Dinas Perikanan
12.	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14.	Dinas Pendidikan
15.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
16.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Pool Truk)
17.	Dinas Perhubungan
18.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.	Dinas Sosial
20.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
21.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22.	Dinas Lingkungan Hidup
23.	Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah
24.	Satuan Polisi Pamong Praja



25.	Dinas Penelitian dan Pengembangan
26.	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
27.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah
28.	Dinas Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
29.	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
30.	Dinas Pengelola Pajak dan retribusi Daerah

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Tahun 2018

2. Bidang Penyelenggaraan E-Government

a. Akses Jaringan OPD yang terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan E- Government. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pembangunan dan berbagai layanan pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Tabel 2.47 Data Akses Jaringan SOPD yang Terintegrasi

No	Nama Perangkat Daerah	Koneksi Internet		Jumlah Jaringan TIK OPD yang Terintegrasi	Jumlah Jaringan TIK OPD yang Belum Terintegrasi
		Nama	Mbps		
1.	Sekretariat Daerah	Icon +	10	1	0
2.	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	Indi Home	10	0	1
3.	Inspektorat Kota Palangka Raya	Speedy	500 kbps	0	1
4.	Dinas Kesehatan	Indi Home	10	0	1
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indi Home	10	0	1
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	--	--	0	1
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Speedy	2	0	1
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indi Home	10	0	1
9.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Speedy	5	0	1
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Speedy	5	0	1
11.	Dinas Tenaga Kerja	Speedy	500 kbps	0	1
12.	Dinas Perikanan	Indi Home	20	0	1
13.	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Indi Home	20	0	1
14.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Indi Home	10	0	1
15.	Dinas Pendidikan	Speedy	20	0	1
16.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Indi Home	10	0	1



17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Pool Truk)	Indi Home	50	0	1
18.	Dinas Perhubungan	Indi Home	10	0	1
19.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Indi Home	10	0	1
20.	Dinas Sosial	Indi Home	10	0	1
21.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Icon +	55	1	0
22.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indi Home	10	0	1
23.	Dinas Lingkungan Hidup	Indi Home	20	0	1
24.	Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah	Icon +	10	1	0
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	Indi Home	10	0	1
26.	Dinas Penelitian dan Pengembangan	Speedy	4	0	1
27.	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Icon +	--	1	0
28.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	Indi Home	10	0	1
29.	Dinas Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indi Home	40	0	1
30.	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	Indi Home	40	0	1
31.	Dinas Pengelola Pajak dan retribusi Daerah	Indi Home	10	0	1
32.	Kecamatan Pahandut	Indi Home	20	0	1
33.	Kecamatan Jekan Raya	---	---	0	1
34.	Kecamatan Sebangau	---	---	0	1
35.	Kecamatan Bukit Batu	---	---	0	1
36.	Kecamatan Rakumpit	---	---	0	1

Sumber: Bidang Penyelenggaraan E-Government

Pada Tahun 2017 Jumlah Akses Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi adalah 8 SOPD dari 36 SOPD / Kecamatan atau sebesar 22 % dari Target 40%. Adapun kendala yang dihadapi adalah:

- Belum adanya komitmen seluruh SOPD akan Akses Jaringan Terpusat yang dikelola pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
- Belum adanya Program/ Kegiatan yang menunjang pengintegrasian jaringan.

b. Jaringan Komunikasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dalam program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan layanan jasa akses telekomunikasi sangat diperlukan keterlibatan berbagai unsur seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat.

Perkembangan jaringan komunikasi di Kota Palangka Raya terhadap teknologi informasi yang tinggi ini dengan banyaknya



jaringan komunikasi yang dibedakan menjadi seluler dan telepon stationer. Jumlah operator jaringan seluler (telpon genggam) di Kota Palangka Raya sebanyak 7 Operator sedangkan operator jaringan telepon stationer sebanyak 1 operator. Di Kota Palangka Raya jaringan komunikasi yang ada diantaranya AXIS, 3 (Tri), Indosat, Star One, Telkomsel, XL, Flexy.

Jaringan komunikasi seluler tersebut tidak semua dapat dimanfaatkan di 5 (lima) Kecamatan di Kota Palangka Raya hanya jaringan Indosat (Mentari) dan Telkomsel (HALO, Simpati dan AS) yang dapat dimanfaatkan di 4 (empat) Kecamatan (Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, Bukit Batu) dan Kecamatan Rakumpit sebagian wilayah yang terjangkau oleh operator.

Sedangkan jaringan komunikasi dalam bentuk telepon dengan operator dari Telkom Indonesia yang dapat dimanfaatkan di 2 (dua) Kecamatan (Kecamatan Pahandut, Jekan Raya). Dengan banyaknya jaringan komunikasi di Kota Palangka Raya membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi dimasyarakat, kita bisa tepat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan ruang dan waktu.

Tabel 2.48 Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya Tahun 2017

No	Operator	Jumlah Menara
1.	PT. TELKOMSEL	137
2.	PT. INDOSAT	10
3.	PT. EL AXIATA	6
4.	PT. HUTCHINSON Cp Tel. (Three)	16
5.	PT. TELKOM (FLEXY)	1
6.	Menara Bersama	52
7.	Menara Tidak Aktif	7
Jumlah		229

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, 2017

Tabel 2.49 Layanan Telepon Selular

No.	Uraian	Kecamatan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kelurahan terlayani	Pahandut	5	6	6	6
		Jekan Raya	4	4	4	4
		Sabangau	4	5	5	5
		Rakumpit	2	2	2	2
		Bukit Batu	5	5	5	5
2	Jumlah Kelurahan yang belum terlayani	Pahandut	1	0	0	0
		Jekan Raya	0	0	0	0
	(Kategori Susah Sinyal)	Sabangau	2	1	1	1
		Rakumpit	5	5	5	5
		Bukit Batu	2	2	2	2



3	Jumlah BTS* BTS adalah perangkat terpasang dan beroperasi pada satu tiang menara telekomunikasi	Pahandut	46	57	75	80
		Jekan Raya	129	174	185	190
		Sabangau	13	14	14	14
		Rakumpit	2	2	2	2
		Bukit Batu	12	14	17	17
4	Jumlah Provider** Provider adalah perusahaan pemilik menara telekomunikasi	Pahandut	10	10	10	10
		Jekan Raya	10	10	10	10
		Sabangau	5	5	5	5
		Rakumpit	3	3	3	3
		Bukit Batu	7	7	7	7

Sumber : DKISP Kota Palangka Raya Tahun 2017

- Nb. * = BTS adalah peralatan milik operator terpasang pada sebuah menara telekomunikasi, Operator yang ada di Kota Palangka Raya adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Axis, H3I, Flexi (Tidak Aktif)
- ** = Provider yang terdapat di Kota Palangka Raya adalah Telkom, Telkomsel, H3i, Protelindo, Mitratel, Indosat, XL Axiata, CMI (Retower Asia), Tower Bersama, Solusi Tunas Pratama.

3. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Dengan adanya Media Center “Isen Mulang” yang bertempat di Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Jalan Yos Sudarso No.2, sebagai pengelola Media Center dapat memposisikan diri sebagai “Pusat Informasi dan Komunikasi Publik Kota Palangka Raya” yang menampung berbagai aspirasi masyarakat, mengembangkan wawasan melalui informasi yang bermanfaat, maupun fasilitas lain yang akan dikembangkan.

a. Domain dan Sub Domain

Web Site yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya diantaranya :

Domain :

- www.Palangkaraya.go.id



Sub Domain ada 36 :

Jumlah Sub Domain yang aktif dan update s/d 31 Desember 2018 berjumlah 20 (dua puluh), yaitu :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas sosial
4. Dinas perhubungan
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7. Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
8. Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian
9. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Inspektorat
14. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
15. Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah
16. Badan Penelitian dan Pengembangan
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Kecamatan Jekan Raya
19. Badan Pertahanan Kota
20. Badan Narkotika Kota

Sumber: Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, DKISP Kota Palangka Raya, Tahun 2017

Dengan adanya website milik pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu, namun informasi yang disampaikan tersebut tentunya harus Up to date.

b. Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat Kabar yang ada dibedakan media nasional dan lokal dikalangan masyarakat Kota Palangka Raya. Media Nasional yang beredar antara lain:



Tabel 2.50 Surat Kabar

Media Lokal	Media Nasional
1. Palangka Pos 2. Kalteng Pos 3. Tabengan 4. Dayak Pos 5. Radar Palangka 6. Palangka Expres 7. Borneo News	1. Kompas 2. Jawa Pos 3. Republika 4. Seputar Indonesia (Sindo) 5. Banjarmasin Post

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

Kesemuanya itu memberikan informasi yang terjadi didalam dan diluar negeri sehingga masyarakat dapat memilih dengan bijak informasi yang diperlukan untuk informasi baik bisnis maupun sosial, ditambah dengan adanya penyediaan surat kabar elektronik yang telah dapat dinikmati oleh warga melalui perangkat internet/mobile, dari media lokal, nasional ataupun mancanegara.

c. Penyiaran Televisi Nasional dan Lokal

Terdapat beberapa stasiun televisi, baik lokal, nasional maupun TV Kabel yang salurannya dapat ditangkap di Kota Palangka Raya melalui antena diantaranya:

Tabel 2.51 Penyiaran Televisi

Televisi Nasional		Televisi Lokal	Televisi Kabel
- TVRI, - TV ONE, - METRO TV, - RCTI, - SCTV, - MNCTV, - G TV,	- ANTV, - TRANS TV - TRANS 7, - RTV - NET TV - iNEW TV	- TVRI Kalteng	- PT.Citra Ilham Mandiri, - PT Provision Mandiri Netlink, - PT. Permata Citra Kahayan.

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

d. Penyiaran radio Nasional dan Lokal

Terdapat sejumlah stasiun radio lokal maupun nasional yang salurannya dapat ditangkap di Kota Palangka Raya melalui antena diantaranya:

Tabel 2.52 Radio Swasta

No.	Nama Radio/Perusahaan	Alamat
1.	PT. Masa Depan Bumi (Kalaweit FM)	Jl. Pinus Raya No. 8
2.	Stars FM	Palangka Raya
3.	PT. Radio Evella Rosisonia	Jl.Cut Nyak Dien No. 19
4.	PT. Radio Suara Sangkakala	Jl. RTA. Milono Km. 3,5



5.	PT. Radio Dian Mandiri Barigas	Jl. Aries No. 233
6.	PT. Radio Borneo Citra Vocalia Rasisonia	Jl. Punai No. 14
7.	PT. Radio Cindranada Awigra	Jl. Sam Ratulangi No. 85
8.	PT. Radio Garantung	Jl. Tjilik Riwut Km. 6
9.	PT. Radio Duta Suara Indah Pratama	Jl. Sam Ratulangi No. 85
10.	PT. Radio Suara Navaria Gemilang	Jl. Raden Saleh IV No. 3B
11.	Kalteng Pos FM	Jl. Cilik Riwut Km. 2,5
12.	Canisa FM	Jl. Pangrango No. 6

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

Tabel 2.53 Radio Pemerintah

Nama Radio	Frekwensi
- RRI PRO I Palangka Raya	- FM 89,2 MHz
- RRI PRO II Palangka Raya	- FM 92,4 MHz
- RRI PRO III Palangka Raya	- FM 95,1 MHz
- RRI PRO IV Palangka Raya	- FM 95,9 MHz

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

e. Jumlah Pameran atau Expo

Dimulai dari peringatan HUT Koperasi dan Hari Jadi Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dilaksanakan di beberapa tempat yang berbeda di Lapangan Mantikei, Gedung Tambun Bungai, Gedung KONI berkembang menjadi Palangka Raya Fair yang merupakan agenda tahunan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kegiatan Pameran ini bertujuan memberikan informasi hasil pembangunan, pengembangan ekonomi kerakyatan untuk peluang investasi atau permodalan bagi pengembangan UMKM, sarana promosi agribisnis dan industri, menarik investor untuk menanamkan investasi di Kota Palangka Raya.

Pada Tahun 2013 Kota Palangka Raya melaksanakan Palangka Raya Fair dengan mengundang pelaku usaha yang ada di Palangka Raya dengan konsep menggunakan stand untuk pelaku usaha dan pasar rakyat untuk masyarakat umum. Akan tetapi total pameran yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya hanya sebanyak 1 kegiatan dan angka ini terus sama dari tahun 2010 sampai 2017.

2.3.1.18 Persandian dan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, bergabungnya bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, sehingga pengelolaan data statistik sektoral yang semula masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) otomatis akan dilaksanakan pada dinas yang baru.

Penyediaan informasi dan data yang akurat, relevan dengan cakupan yang lengkap merupakan kebutuhan yang kita tempatkan pada prioritas yang utama. Oleh karena itu merupakan tantangan bagi kita untuk terus menggali dan menyediakan informasi/data yang menyangkut potensi wilayah untuk kepentingan pembangunan maupun pembinaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 10 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah Informasi di lingkungan instansi pemerintah merupakan aset Negara, perlu di kelola secara khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran, baik sebagai akibat kelalaian sendiri maupun karena adanya ancaman pihak lain yang tidak memiliki otorisasi.

Adapun informasi yang dikelola sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari informasi publik yang dikecualikan sebagaimana di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tata Kelola Informasi Berklasifikasi dilakukan guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan ketersediaan informasi, sehingga informasi dapat menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan organisasi atau institusi.

2.3.2. Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian Tanaman Pangan

Pada tahun 2014 hingga 2016, perbandingan antara produksi dan luas panen (produktivitas) tanaman bahan makanan terutama untuk jenis padi sawah dan padi ladang mengalami penurunan. Luas panen tahun 2014 sebesar 70 ha menurun menjadi 59 ha di tahun 2015 dan menurun kembali menjadi 15 ha pada tahun 2016. Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah palawija, hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) dan sebagian tanaman padi gogo. Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong, lombok, tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan meliputi rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya.



Tabel 2.54 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2016

Tahun	Padi Ladang Ton	Padi sawah	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2017	8	-	-	-	-
2016	15	-	4	31	3
2015	123	-	149	46	3
2014	120	-	-	86	5
2013	17	-	605	115	35
Jumlah	218	-	870	118	35

Sumber: Statistik Palangka Raya, 2016

2.3.2.2. Kehutanan dan Perkebunan

Untuk perkebunan, luas areal tanaman perkebunan besar negara, perkebunan swasta dan perkebunan rakyat tahun 2016 sebagian meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral terutama dalam penanaman modal di perkebunan, jenis tanaman perkebunan karet luas arealnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2016, luas areal karet sebanyak 5.008,00 ha di banding tahun 2014 seluas 4.518,50 ha.

Pada tahun 2015 terdapat 8 (delapan) perusahaan perkebunan besar swasta kelapa sawit dengan luas lokasi secara keseluruhan berjumlah sekitar 71.000 ha, dimana semuanya sudah berstatus memiliki izin usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan kehutanan, makin berkurangnya kawasan hutan di Kota Palangka Raya tercermin dengan menurunnya hasil produksi kayu bundar dan kayu olahan dari tahun ke tahun. Untuk memperbaiki keseimbangan ekosistem hutan ditetapkan kawasan seluas ±1.635 ha yang terletak di belakang pusat pemerintahan Kota Palangka Raya telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman yang terbesar di dunia.

Tabel 2.55 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton)

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit
01.Pahandut	25,25	8.50	2.00
02.Sabangau	280.00	8.00	20.00
03.Jekan Raya	65.00	25.00	9.00
04.Bukit Batu	380.00	65.00	30.00
05.Rakumpit	2.150	5.10	150.00
Jumlah	2.900,25	111,60	211,00

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2017



2.3.2.3. Peternakan dan Perikanan

Jumlah populasi ternak pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2014, sektor peternakan yang dilaksanakan diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dipinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan diluar Kota Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras. Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2016 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 17.498 ekor sedangkan untuk jenis unggas, ayam broiler merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya. Tabel di bawah ini populasi ternak Kota Palangka Raya:

Tabel 2.56 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kuda
2016	1.883	12	1.134	-	17.498	11
2015	1.793	13	1.007	-	13.036	-
2014	1.741	7	1.148	-	13.036	5
2013	2.065	37	2.787	100	14.510	3
2012	1.919	37	2.970	-	13.036	-
2011	1.707	37	2.308	-	13.080	3

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017

Kota Palangka Raya sangat banyak jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk dikembangkan dan mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.

Di Kota Palangka Raya terdapat lebih kurang 104 buah danau, dengan total luas sekitar 636,10 Ha. Danau-danau tersebar di berbagai wilayah Kota Palangka Raya. Pada Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha), Kecamatan Rakumpit 42 buah (167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha), Kecamatan Pahandut 4 buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha).

Secara umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow, dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman, Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan, perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi perikanan darat. Produksi perikanan tangkap di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.57 Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya
Tahun 2012-2016`**

Tahun	Sungai	Danau	Rawa
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	824,0	970,1	817,5
2015	815,4	911,1	771,0
2014	667,0	823,0	647,0
2013	437,1	492,7	410,7
2012	473,1	571,3	300,5

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017

2.3.2.4. Kepariwisataan

Kota Palangka Raya merupakan daerah yang mempunyai tempat wisata, upacara adat keagamaan, tari keagamaan, nyanyian keagamaan dan wisata kuliner. Tersebar di lima kecamatan, antara lain:

- 1. Jembatan Kahayan**, diantaranya taman pinggir sungai Kahayan yaitu Pasuk Kameluh.
- 2. Kum-Kum**, terdapat beberapa jenis binatang seperti buaya, beruang, monyet dan burung;
- 3. Monumen Tugu Soekarno;**
- 4. Sandung Ngabe Sukah**, makam yang berbentuk rumah kecil persegi panjang beratap, bertiang terbuat dari kayu ulin atau beton, tempat menyimpan tulang belulang orang yang telah meninggal;
- 5. Rumah Betang**, rumah panjang, rumah besar merupakan rumah adat Dayak;
- 6. Museum Balanga**, berbagai koleksi peninggalan budaya suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku Dayak seperti ethnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan magis;
- 7. Kawasan Bundaran Besar;**
- 8. Taman Nasional Sabangau**, terletak di antara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau ini memiliki luas sekitar 568.700 Ha. Salah satu ekosistem hutan rawa gambut terdapat sekitar 166 jenis flora, 106 jenis burung, 36 jenis ikan dan 35 jenis mamalia dengan spesies kunci orang utan yang diperkirakan berjumlah 2.500-4.500 ekor;
- 9. Batu Banama**, terdapat situs Kaharingan, Pura Agung Sali Paseban/ Satya Dharma;
- 10. Arboretum Nyaru Menteng**, kawasan pelestarian plasmanutfah ekosistem hutan rawa, terdapat klinik orang utan;
- 11. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling**, pemandangan alam dan melihat satwa liar yang dilindungi seperti buaya dan rusa. Luas keseluruhan kawasan wisata ini adalah 2.594 Ha dengan rincian Cagar Alam seluas 2.061 Ha dan Taman Wisata Alam seluas 533 Ha;
- 12. Kawasan Hutan Ulin**, kawasan ini tumbuh pohon kayu ulin yang sudah sangat sulit ditemukan di wilayah Kota Palangka Raya;



13. Perahu Wisata Susur Sungai, Perahu wisata yang diberi nama Rahai'i Pangun ini. Terdapat 4 (empat) rute wisata yaitu rute pemancingan (lokasi danau tundai, sungai rungan dan sekitarnya), atraksi burung elang (lokasi sungai kahayan), orang utan (lokasi pulau kaja tangkiling). Surapati (lokasi pulau monyet).

2.3.2.5. Perdagangan

Kota Palangka Raya memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, walaupun sebagian besar barang/jasa yang diperdagangkan didatangkan dari daerah luar daerah. Pengembangan dan pembinaan terhadap sektor perdagangan dan jasa ditujukan untuk meningkatkan dan menjamin lancarnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis. Posisi strategis sebagai transit perdagangan barang dan jasa, pengembangan infrastruktur difokuskan pada pembangunan pasar-pasar tradisional semi modern dan pembangunan depo sembako yang dilakukan di beberapa tempat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dan barang-barang strategis lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di samping untuk menstabilkan harga pasar dan menekan laju inflasi.

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat dominan di Kota Palangka Raya, baik dilihat dari pangsaanya maupun tingkat pertumbuhannya. Dilihat dari unit usaha yang ada, jumlahnya terus mengalami penurunan, namun demikian nilai perdagangan yang dihasilkan justru terus mengalami peningkatan. Hasil akhir yang kemudian terlihat adalah meningkatnya produktivitas untuk setiap perusahaan. Kinerja perdagangan yang terus membaik tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh kota ini untuk terus meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, seperti pasar dan daerah pertokoan yang terus ditata dan dibeinahi.

Tabel 2.58 Kinerja Sektor Perdagangan Tahun 2011-2016

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unit Usaha	746	968	933	592	541	694
PDRB (Rp juta)	1,215,233	1,377,601	1,506,051	1,713,372	1,905,227	2,220,715
PDRB per perusahaan (Rp juta)	1,628.99	1,423.14	1,614.20	2,894.20	3,521.67	3,199.87
Peran sektor Perdagangan dalam PDRB (%)			17.44	17.43	16.88	17.36
Pertumbuhan per tahun (%)			5.52	6.17	3.78	10.43

Sumber: BPS Kota Palangka Raya dalam Angka, 2017



2.3.2.6. Perindustrian

Pada tahun 2016 terdapat 1.065 unit usaha industri kecil dan 3.620 tenaga kerja. Jumlah ini meliputi industri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka (IKA) dan industri logam mesin dan kimia.

Tabel 2.59 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2010-2016

Tahun	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Industri Aneka	Industri Logam Mesin dan Kimia	Jumlah
2010	405	105	409	919
2011	485	207	263	955
2012	509	210	269	988
2013	448	261	228	937
2014	520	271	228	1.019
2015	367	460	230	1.057
2016	370	464	231	1.065

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017

Kerajinan Rakyat

Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah berusaha memajukan industri kecil atau kerajinan rakyat dengan menerapkan program-program pengembangan usaha industri kecil. Program-program pengembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewiraswastaan, proses produksi barang, kualitas, desain produk serta ketrampilan pemasaran. Banyak sudah corak jenis-jenis hasil produksi industri kecil dari Kota Palangka Raya yang asli maupun motif baru yang telah dapat dikenal di dunia. Kerajinan rakyat dengan sumber bahan baku lokal diarahkan menjadi sektor unggulan pengembangan ekonomi lokal.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Variabel-variabel yang diukur dalam pengukuran tingkat daya saing pada penelitian ini adalah variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia dan membandingkannya dengan kebijakan (fungsi kawasan strategis, struktur wilayah dan sektor unggulan) masing-masing kabupaten/kota.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kota Palangka Raya merupakan kota dengan IPM tertinggi sebesar 79,21.



Dalam analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, Kota Palangka Raya bersama Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Barito Utara memiliki rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dari sisi hubungan antara nilai IPM dengan pertumbuhan, Kota Palangka Raya bersama Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lamandau memiliki rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kota Palangka Raya pada tahun 2016 sebesar Rp 12.792.940,0 juta rupiah. Lapangan usaha dengan PDRB terbesar adalah kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,80% dan kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,36% dari total PDRB Kota Palangka Raya.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 6,92% dibanding tahun sebelumnya. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas tumbuh 12,52% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib turun 0,13%.

Tabel 2.60 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlakudan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2016 (Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita	
	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2011	6.679.663,1	6.264.961,21
2012	7.577.867,8	6.721.508,70
2013	8.637.942,4	7.227.378,70
2014	9.829.624,2	7.730.526,90
2015*	11.289.343,5	8.286.033,40
2016**	12.792.940,0	8.859.548,20

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2015

Keterangan : *) Angka sementara**) Angka sangat sementara

2.4.2 Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Fokus infrastruktur bisa digambarkan dari sarana dan prasarana perhubungan, aspek tata ruang dan aspek pendukung seperti bank, pertokoan, perhotelan serta lingkungan hidup. Ketimpangan pengembangan wilayah yang terjadi antara bagian Utara (Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu), Selatan (Kecamatan Sabangau) yang relatif tertinggal terhadap bagian Tengah Kota Palangka Raya (Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut), diantaranya disebabkan oleh keterkaitan yang rendah antara satu kawasan dengan kawasan lainnya serta keterisolasian wilayah akibat minimnya dukungan transportasi (darat).

Sarana pengembangan daya saing didukung pula oleh keberadaan institusi pendukung seperti perbankan. Jumlah bank tercatat 11 unit kantor bank yang terpusat di dalam Kota Palangka Raya. Bank yang beroperasi diantaranya adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Bank Nasional Indonesia, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, Bank Mega, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank BTPN dan Bank Rakyat Indonesia. Dana perbankan (tabungan) yang tersedia di Kota Palangka Raya pada tahun 2011 sejumlah Rp 4.105 milyar yang tersedia pada bank swasta nasional dan bank pemerintah.

Tahun 2016 jumlah restoran, rumah makan, cafe yang beroperasi di Palangka Raya sebanyak 162 rumah makan yang kebanyakan lebih banyak terpusat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya, sedangkan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sabangau, Bukit Batu, Rakumpit tidak terlalu banyak restoran, rumah makan, cafe. Restoran, rumah makan, cafe tersebut menghadirkan berbagai macam menu/masakan Internasional, European Food, Steak, masakan nasional/nusantara, masakan cepat saji, masakan daerah (Banjar, Jawa, Sulawesi, Padang, Batak, Sunda dan berbagai daerah lainnya), masakan khas Kalimantan Tengah (Dayak), Chinese Food.

Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 74 buah hotel dan akomodasi lainnya dimana 6 diantaranya adalah hotel bintang. Dari jumlah tersebut dua buah hotel berstatus bintang 4, satu bintang 3 dan dua lainnya hotel bintang 2. Saat ini telah tersedia 2 buah hotel bintang 4. Hotel tersebut antara lain Swiss-Belhotel Danum, 1 (satu) hotel merupakan hotel berbintang 4 (empat) yaitu Aquarius Boutique Hotel, 2 (dua) hotel merupakan hotel berbintang 3 (tiga) yaitu Hotel Luwansa dan Rungan Sari Resort dan 4 (empat) hotel merupakan hotel berbintang 2 (dua) Hotel Batu Suli, Hotel Dandang Tingang, Hotel Amaris, Grand Global Hotel serta hotel yang lain merupakan hotel berkelas melati yang berjumlah 40 hotel. Pada tahun 2018 dimungkinkan terjadi penambahan jumlah hotel dan penginapan yang dibangun di tempat atau jalan strategis di Kota Palangka Raya. Hal ini seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik di Kota Palangka Raya maka tingkat kebutuhan akan hotel dan penginapan juga meningkat.

2.4.3 Perkembangan Investasi

Dalam konsep ekonomi investasi merupakan sumber terpenting dari pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan tercipta barang dan jasa di satu sisi dan tercipta lapangan kerja pada sisi lainnya. Lapangan kerja yang tercipta tentu menciptakan penghasilan yang selanjutnya akan menjadi pendorong konsumsi yang akan kembali mendorong pengusaha untuk berinvestasi kembali. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks perekonomian makro aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. Dalam konteks kinerja mikro pemerintah daerah, investasi ini tercatat pada kinerja nilai investasi yang baru saja ditamamkan. Artinya untuk mendeteksi tingkat investasi di suatu daerah dapat menggunakan data PMTB dan data investasi yang keduanya dapat saling melengkapi, walaupun sesungguhnya nilai investasi yang ditamamkan itu sudah masuk dalam komponen PMTB.

PMTB di Kota Palangka Raya dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup baik (lihat tabel 4.7 dibawah). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peran PMTB dalam pembentukan PDRB bahkan lebih tinggi dari angka nasional yang rata-rata hanya mencapai angka 30% dari Produk Domestik Bruto. Sebagaimana diuraikan di atas PMTB adalah sumber pembentuk pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi untuk menciptakan output pada perekonomian dicerminkan oleh nilai ICOR. Dari tabel dapat diketahui bahwa ICOR dari PMTB kota Palangka Raya cukup tinggi, berkisar pada angka 6. Artinya untuk setiap nilai output yang diharapkan sebesar Rp 1 rupiah, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 6 rupiah.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.61 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2015

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Partisipasi Angkatan Kerja		Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	
1	Tidak/Belum Tamat SD	6.245	660	6.905
2	Sekolah Dasar	17.771	956	18.727
3	Sekolah Menengah Pertama	15.359	799	16.158
4	Sekolah Menengah Atas	32.888	2.527	35.415
5	Sekolah Menengah Kejuruan	13.855	1.974	15.649
6	Diploma/Universitas	33.471	1.307	34.778
	Jumlah	119.589	8.043	127.632

Sumber: Statistik Palangka Raya, 2016

2.4.5. Iklim Berinvestasi

Sistem pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perizinan-non perizinan dan penanaman modal, saat ini telah memiliki sistem pelayanan satu atap dan diharapkan akan dapat memangkas birokrasi pelayanan yang cukup panjang, sehingga mampu mengurangi ekonomi biaya tinggi. Saat ini terdapat 10 jenis perizinan yang sudah dilayani meliputi: Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol (IPTMB), Tanda Daftar Pariwisata, Izin Pengumpulan Uang dan Barang, Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Trayek (Angkot, Taxi Bandara).

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku dan konstan selama kurun waktu 2010-2014 selalu menunjukkan laju peningkatan yang positif. Laju pertumbuhan PMTB atas dasar harga berlaku yang paling besar terjadi pada tahun 2014 mencapai 11,85 persen.

Tabel 2.62 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)

Tahun	PMTB ADHB	PMTB ADHK	Pertumbuhan PMTB ADHK
2011	2.752,3	2.584,1	9,14
2012	3.226,3	2.771,7	7,26
2013	3.651,3	2.890,5	4,29
2014	4.223,3	3.233,2	11,85

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2014

2.4.6. Pertanian

Pada tahun 2014 hingga 2016, perbandingan antara produksi dan luas panen (produktivitas) tanaman bahan makanan terutama untuk jenis padi sawah dan padi ladang mengalami penurunan. Luas panen tahun 2014 sebesar 70 ha menurun menjadi 59 ha di tahun 2015 dan menurun kembali menjadi 15 ha pada tahun 2016. Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah palawija, hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) dan sebagian tanaman padi gogo. Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong, lombok, tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan meliputi rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya.

Tabel 2.63 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2016

Tahun	Padi Ladang Ton	Padi sawah	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2017	8				
2016	15	-	4	31	3
2015	123	-	149	46	3
2014	120	-	-	86	5
2013	17	-	605	115	35
Jumlah	218	-	870	118	35

Sumber: Statistik Palangka Raya, 2016

2.4.7. Peternakan

Jumlah populasi ternak pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2014. Sektor peternakan yang dilaksanakan diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil ikutannya yang merupakan sumber protein



hewani, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dipinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan diluar Kota Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras. Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2016 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 17.498 ekor sedangkan untuk jenis unggas, ayam broiler merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya dan dikonsumsi. Tabel di bawah ini populasi ternak di Kota Palangka Raya:

Tabel 2.64 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kuda
2016	1.883	12	1.134	-	17.498	11
2015	1.793	13	1.007	-	13.036	-
2014	1.741	7	1.148	-	13.036	5
2013	2.065	37	2.787	100	14.510	3
2012	1.919	37	2.970	-	13.036	-
2011	1.707	37	2.308	-	13.080	3

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2017

2.4.8. Perikanan

Potensi perikanan di perairan umum Kota Palangka Raya sangat banyak jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk dikembangkan dan secara alami mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.

Di Kota Palangka Raya terdapat lebih kurang 104 buah danau, dengan total luas sekitar 636,10 Ha. Danau-danau tersebar di berbagai wilayah Kota Palangka Raya. Pada Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha), Kecamatan Rakumpit 42 buah(167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha), Kecamatan Pahandut 4 buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha).

Danau tersebut memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow, dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman, Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan, perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi perikanan darat. Produksi perikanan tangkap di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.65 Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2012-2016

Tahun	Sungai	Danau	Rawa
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	824,0	970,1	817,5
2015	815,4	911,1	771,0
2014	667,0	823,0	647,0
2013	437,1	492,7	410,7
2012	473,1	571,3	300,5

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017

2.4.9. Industri

Pada tahun 2016 terdapat 1.065 unit usaha industri kecil dan 3.620 tenaga kerja. Jumlah ini meliputi indutri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka (IKA) dan industri logam mesin dan kimia.

Tabel 2.66 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya Tahun 2010-2016

Tahun	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Industri Aneka	Industri Logam Mesin dan Kimia	Jumlah
2010	405	105	409	919
2011	485	207	263	955
2012	509	210	269	988
2013	448	261	228	937
2014	520	271	228	1.019
2015	367	460	230	1.057
2016	370	464	231	1.065

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017

2.4.10. Angka Kriminalitas

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator:

- 1) angka kriminalitas;
- 2) jumlah demonstrasi;
- 3) lama proses perijinan;
- 4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah;
- 5) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; dan

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:



Tabel 2.67 Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kasus narkoba	89	481	225	42	72
2.	Jumlah kasus pembunuhan	20	105	117	6	21
3.	Jumlah kasus penganiayaan	8	24	6	tad	tad
4.	Jumlah kejahatan seksual	-	-	7	5	19
5.	Jumlah kasus penipuan	-	4	1	5	6
6.	Jumlah kasus pencurian	7	25	25	78	42
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	124	639	381	136	160
9.	Jumlah penduduk	244.500	252.105	259.865	267.757	275.667
10.	Angka kriminalitas yang tertangani	5,07	25,34	14,66	5,08	5,8

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2018

2.4.11. Sumber Daya Manusia

a. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

Salah satu indikator kependudukan yang penting adalah Rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan menggambarkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) terhadap penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun). Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di suatu daerah. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut



Tabel 2.68 Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2017 Kota Palangka Raya

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	64.312	65.488	66.708	67.796	98.652
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	6.117	6.417	6.757	7.138	13.075
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2)	70.429	71.905	73.465	74.934	111.727
4.	Jumlah penduduk usia 15-64	174.071	180.200	186.400	192.823	242.117
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	40,45	39,90	39,41	38,86	46,14

Sumber: BPS Palangka Raya Dalam Angka, beberapa edisi. Diolah

Dari tabel terlihat bahwa angka ketergantungan Kota Palangka Raya berdasarkan data lima tahun terakhir, tahun 2017 menunjukkan angka 46,14%, artinya dari seratus orang penduduk produktif menanggung 46 orang yang belum dan tidak produktif.

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif di Kota Palangka Raya masih besar. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi beban bagi pembangunan sumber daya manusia.

2.5. Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2013-2017

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali setiap hal yang pernah dilaksanakan pada RPJMD Kota Palangka Raya periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program dan kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan, dihapus/diganti agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu melalui evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Dengan demikian maka fokus dari evaluasi ini adalah untuk memberikan masukan bagi perbaikan-perbaikan strategi, kebijakan dan program/kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Palangka Raya 2018-2023, agar ke depan kinerja perencanaan pembangunan lebih berdayaguna dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah.



Evaluasi terhadap RPJMD secara umum adalah melihat pencapaian target kinerja indikator makro yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan terutama bidang yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Indikator makro yang menjadi target RPJMD periode sebelumnya (2013-2018), antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah, realisasi indikator hingga tahun 2016 menunjukkan trend peningkatan. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2017 sebesar 6,96 lebih besar daripada tahun 2016 mencapai 6,92 persen dimana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai 5,32 persen. Meskipun mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya belum mencapai target tahun 2015 (7,5 persen). Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi mencatat pertumbuhan yang positif dan cukup stabil serta memiliki potensi positif dalam pergerakan perekonomian baik secara regional maupun global.

Sementara itu, beberapa target pembangunan daerah tidak tercapai sesuai harapan RPJMD seperti capaian inflasi sebesar 3,11 persen (target sebesar 5,65 persen) 2017, angka kemiskinan sebesar 3,62 persen (target sebesar 2,53 persen) 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,26 persen kondisi tahun 2017), dan lain sebagainya.

perencanaan yang optimal bukan semata dinilai berdasarkan pada target pembangunan daerah terhadap masing-masing indikator yang dipaksakan serendah-rendahnya atau setinggi-tingginya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mengoptimalkan segala potensi sumber daya daerah sebagai modal dasar pencapaian pembangunan dan memiliki visi realistis secara maksimal dalam mencapai suatu target kinerja. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penajaman, penyempurnaan, revisi, hingga penggantian strategi, kebijakan, sampai pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RPJMD periode sebelumnya untuk lebih mendorong kinerja pembangunan daerah yang tepat sasaran guna mewujudkan Visi “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”.

Salah satu hal yang cukup mendasar terkait dengan ketidaktercapaian target kinerja tersebut adalah lemahnya pengendalian dan evaluasi, baik dari sisi institusi, mekanisme maupun sumber daya manusia. Sebenarnya tim pengawalan pencapaian target indikator kinerja telah banyak dibentuk, antara lain Tim Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi, Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Tim Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlhut), dan sebagainya. Namun tim-tim tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Guna efektifitas pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2018-2023, akan dilakukan perbaikan dalam pengendalian dan evaluasi, sebagaimana tertuang dalam kaidah pelaksanaan RPJMD.



Program/kegiatan yang mengacu pada empat strategi prioritas nasional yakni *pro poor*, *pro growth*, *pro job*, dan *pro environment*, perlu terus dilanjutkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Berdasarkan data capaian di atas, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 belum melebihi target, harapan kondisi perekonomian saat ini secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan dapat terpenuhi. Selain itu, secara umum memang laju inflasi, kemiskinan, maupun pengangguran tidak mencapai target, akan tetapi jika dilihat pada level nasional maka capaian pembangunan tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa dari segi kuantitas nilai. Namun perlu ditekankan kembali, dari segi kualitas harus terus diperhatikan pula sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan suatu bentuk capaian pembangunan daerah. Dengan melihat capaian pembangunan maka dapat terlihat secara nyata kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga capaian pembangunan dapat menjadi suatu dasar data dan informasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, melihat permasalahan daerah, kemudian permasalahan tersebut dipecahkan dengan tepat melalui kebijakan daerah.

Selain strategi prioritas nasional, fokus utama dalam evaluasi pembangunan adalah pencapaian indikator sasaran perencanaan pembangunan Kota Palangka Raya yang dapat terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.69 Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	7,55	7,57	7,65	7,73	7,90	7,53	6,96	7,19	6,92	6,96	<
1.2	Laju Inflasi (%)	6,45	6,25	6,05	5,85	5,65	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11	>
1.3	PDRB per Kapita (juta)	5.793.4 23,26	5.949. 000	6.109. 000	6.273. 000	6.442. 000	4,89	3,81	4,64	45,6	52,7	<
1.4	Angka Kemiskinan (%)	3,90	3,56	3,22	2,87	2,53	3,94	3,81	3,91	3,75	3,62	<
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		0,31	0,30	?		5,03	3,36	6,30	6,30	7,26	
1.6	Indeks Gini	0,32	20,09	20,11	0,29	0,28	0,362	0,365	0,338	0,330	0,379	<
1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,30	80,00	80,36	80,72	81,08	78,02	78,50	78,62	79,21	79,69	<
1.1.	Kesejahteraan Sosial											
1.1.1.	Pendidikan											
1.1.1.1.	Angka Melek Huruf	97,55	97,77	97,98	98,20	98,43	99,55	99,34	97,99	98,23		=
1.1.1.2.	Angka Rata-rata Lama Sekolah						10,69	10,73	10,74	11,02		
1.1.1.3.	Angka Partisipasi Murni											
1.1.1.4.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	94	94,4	94,9	95,5	96,2	94,00	98,56	98,58	98,61	53,73	=
1.1.1.5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,56	94,05	95,54	97,03	98,52	92,56	92,56	91,37	96,94	87,97	=
1.1.1.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,09	98,23	98,40	98,65	98,89	98,09	95,41	99,17	98,79	70,32	=
1.1.1.7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	90,36	92,29	94,22	96,15	98,08	90,36	93,10	94,56	PROV	PROV	



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui >)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.1.1.8.	Angka partisipasi kasar											
1.1.1.9.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	98,33	98,45	98,60	98,70	98,80	98,33	98,56	98,58	98,61	53,71	=
1.1.1.10.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	126,84	127,5	128,32	128,75	129,5	126,84	106,8	117,4	103,15	103,85	=
1.1.1.11.	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	108,02	110,75	115,89	120	130	108,02	107,0	105,9	101,22	102,56	<
1.1.1.12.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	102,60	106,08	109,58	113,08	116,58	102,60	100,6	103,3	105,76	PROV	
1.1.1.13.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	100	100	100	100	100	92,56	92,56	91,37	96,94	87,97	<
1.1.1.14.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS	56,1	68,15	75,80	85,78	95,30	98,09	95,41	99,17	98,79	70,32	>
1.1.1.15.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA		98,2	98,4	99,3		98	96,90	97,7	98,8	PROV	=
1.1.2.	Kesehatan											
1.1.2.1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	53,9	50	45	35	25		73	54,11	19,65		<
1.1.2.2.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	80	80	80	80	80		91,4	86,59	90,27		>
1.1.2.3.	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	13,5	13	12	10,5	9		10	2,48	9		>
1.1.2.4.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	10,7	10	10	8	8		1	0,028	0,2		>
1.1.2.5.	Angka usia harapan hidup						72,85	72,95	72,97	73,05	73,13	
1.1.2.6.	Jumlah Balita Gizi Buruk	2	0	0	0	0		0,02	0,02	0,02		
1.1.2.7.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%)	17,6	20	25	30	35			13,8	0,7		<
1.1.2.8.	Cakupan Pelayanan Balita (%)	83,8	90	90	90	90			100	70,8		<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.1.2.9.	Cakupan Rumah Sehat (%)	65	85	87	89	91			31,8	76		<
1.1.2.10.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (%)	65	67	68	73	78			5,59	93,3		<
1.1.2.11.	Cakupan UCI (%)	67	68	70	75	80			70	40		<
1.1.2.12.	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	41	40	39	38	37			104	111,8		
1.1.2.13.	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk	3	3	3	3	3			0,35	0,22		
1.1.2.14.	Pervalensi Penderita HIV-AIDS per-100.000 Penduduk	6,6	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5			0,15	0,21		
1.1.2.15.	Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk	26	30	50	70	90	-	32	61,3	48,8	54,04	
1.1.2.16.	Non-Polio AFP Rate Anak Usia <15 Tahun per-100.000 Penduduk	3	2	2	2	2			7	0		
1.1.2.17.	Cakupan Penemuan Pneumonia Balita (%)	10	2	2	2	2		5,2	3,68	1,58		
1.1.2.18.	Tingkat Kepuasan Pelanggan (%)	88	100	100	100	100		92,32	tad	Na.		
1.1.2.19.	Tingkat Kepatuhan Petugas Terhadap Standart Pelayanan Kesehatan (%)	89	100	100	100	100		84,09	tad	Na.		
1.2.	Pertanahan											
1.2.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	25,68	35	45	55	65			20,49			
1.3.	Ketenagakerjaan											
1.3.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)							59,01	65,72	65,72	62,40	
1.3.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi setiap tahun	208	48	80	100	120		tad	48	80		<
1.3.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat setiap tahun	1.216	96	120	160	180		tad	80	64		<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.4.	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	535	500	500	500	500		tad	119	361		<
1.3.5.	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	5.12	5,11	5,10	5,09	5,08		tad	5,10	5,09		=
1.4.	Seni Budaya dan Olahraga											
1.4.1.	Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali)	1	2	3	4	5						
1.4.1.1.	Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali)	6	7	8	9	10						
1.4.1.2.	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah)	1	1	1	2	3						
1.5.	Pemuda dan Olahraga											
1.5.1.	Jumlah Organisasi Olahraga	63	64	65	66	67						
1.5.2.	Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja	15	17	19	21	23						
1.5.3.	Jumlah Lapangan Olahraga	60	63	66	69	72						
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA												
1.	Kebudayaan											
1.1	Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali)		2	3	4				2	1		<
1.2	Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali)		7	8	9				1	1		<
1.3	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah)		1	1	2				0	0		<
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
2.	Pemuda dan Olahraga											
2.1	Jumlah Organisasi Olahraga		64	65	66				8	15		<
2.2	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja		17	19	21				0	1		<
2.3	Jumlah Lapangan Olahraga		63	66	69				0	72		<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	ASPEK PELAYANAN UMUM											
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB											
DINAS PENDIDIKAN												
1.	Pendidikan											
1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	NA	74	74	76	78	tad	94,60	94,65	94,72	54,00	<
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	129,9	130,9	131,9	132,9	133,99	129,90	100,84	108,40	108,78	88	<
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMP/MTS	107,01	108,75	110,49	112,23	113,97	107,01	99,52	101,06	101,85	71	<
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	100,57	102,46	104,35	106,24	108,13	100,57	102,60	102,83	102,96	PROV	
1.5	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,07	0,065	0,060	0,058	0,058	0,070	0,07	0,07	0,0034	0,19	>
1.6	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,11	0,105	0,100	0,095	0,093	0,110	0,11	0,11	0,090	0,02	>
1.7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,40	0,40	0,11	0,09	PROV	
1.8	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,56	=
1.9	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,75	98,85	98,95	99,65	99,75	98,75	98,81	98,95	99,66	98,88	<
1.10	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95,4	96,7	97,6	98,15	98,76	95,4	95,47	95,89	98,16	PROV	
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	7,23	7,35	7,58	7,75	7,98	7,23	4,9	4,6	4,8	0,43	
1.12	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS	5,6	5,8	6,2	6,5	6,8	5,6	5,9	4,4	4,5	0,46	
1.13	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA	4,23	4,56	4,87	5,5	5,8	4,23	5,8	3,08	3,40	PROV	
1.14	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,56	
1.15	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	56,10	68,15	75,80	85,78	95,30	56,10	70,20	73,78	89,15	98,88	>
1.16	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA	98	98,2	98,4	99,3	99,7	98	96,90	97,7	98,8	PROV	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.17	Rata-Rata Lama Sekolah	10,80	10,80	10,80	10,80							
1.18	Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA	12,28	12,4 5	12,78	13,10	13,59	12,28	107,2	54,10	108,4 3		
1.19	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS	12,04	12,1 6	12,34	12,68	12,88	12,04	102,9 0	75,19	104,9 8	16,06	>
1.20	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	8,82	9,25	9,55	9,73	9,85	8,82	93,07	58,76	95,15	17,04	>
1.21	Rasio Guru terhadap Murid PAUD	14,27	14,3 0	14,45	14,55	14,75	14,27	22,23	104,72	106,8 1	40,63	>
1.22	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah (per 1000 Penduduk)											
	- SD/MI	7,23	7,35	7,58	7,75	7,98	7,23	4,9	4,6	4,8	0,43	<
	- SMP/MTs	5,6	5,8	6,2	6,5	6,8	5,6	5,9	4,4	4,5	0,46	<
	- SMA/SMK/MA	4,23	4,56	4,87	5,5	5,8	4,23	5,8	3,08	3,40		
1.23	Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV	90,17	92,5	94,7	96,8	98,67	90,17	90,17	91,21	93,25	84,70	<
1.24	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	50,14	52,4 5	54,36	56,5	58,7	50,14	6,24	89,85	65,94	67	>
1.25	Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	30	40	50	60	70	30	15	25	11	20	<
1.26	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,56	
1.27	Angka Kelulusan SMP/MTs	98,75	98,8 5	54,36	99,65	99,75	98,75	98,81	98,95	99,66	98,88	
1.28	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95,4	96,7	50	98,15	98,76	95,4	95,47	95,89	98,16	PROV	
1.29	Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya	17	17	100	21	23	17	16	16	16	PROV	
DINAS KESEHATAN												
2.	Kesehatan											
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	72,9	73	73	73	73		73	72,95	78,62		>
2.2	Presentase Kelurahan yang Terkena KLB dan telah Dilaksanakan Epidemologi <24 Jam	100	100	100	100	100		100	100	100		=
2.3	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk	4,3	5	5	5	5	4,3	4,09	4	4		<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
2.4	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	0	0	0	0,004	0,04	19,59	18,4	17,45	0,19		>
2.5	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (%)	63	100	100	100	100	1,64	1,64	1,84	40,2		<
2.6	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Lanjut (USILA) (%)	30	40	45	45	50		59,6	47,99	-		>
2.7	Presentase Kelurahan yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) (%)	38	40	40	50	50		31,8	47,99	18,4		<
2.8	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	15	19,3	23,8	28,3	32,8	15	13,5	16,71	15,02		<
2.9	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	1,4		0,409	0,8	0,75		>
2.10	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	4,8	6	7,3	8,5	9,8		3,68	5,57	4,8		<
2.11	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk	75,8	79,8	83,8	87,8	74,3		67,5	64,65	87,8		<
2.12	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	69,7	70,8 5	72	73,15	91,8		116,3 2	61,48	73,15		<
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
3.	Pekerjaan Umum											
3.1	Jumlah Gedung Kantor Pemerintah Kota	3	19	35	51	61		tad	10	13		<
3.2	Jumlah Tempat Ibadah	1.011	1.01 4	1.016	1.018	1.020	tad	tad	5	1.021		
3.3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	33	47,2 0	50	52	55		Tad	36,308	53,92		
3.4	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	5	0	0	5	10	505,1 38	662,7 5	601,43 7	5,3		>
3.5	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (Km)	300,22	300, 22	300,2 2	307	311		Tad	331,06 7	491,6 58		>
3.6	Jalan Lingkungan Kondisi Baik (Km)	400	408	416	425	434	104,0 16	122,2 6	195,73 1	334,8 4		<
3.7	Jumlah Jembatan (Buah)	0	0	0	1	2		0	0	2		=



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
3.8	Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota (M ²)	0	0	0	100	150	tad	0	0	0		=
3.9	Drainase dalam Kondisi Baik (Km)	1632,14	1642,14	1659,14	167,14	1704,14		tad	1.655,14	1.680,38		=
3.10	Panjang Trotoar (Km)	0	0	0	2	6		tad	0	0		=
3.11	Rasio Kerusakan Jalan per Tahun	0,42	0,42	0,35	0,29	0,23		tad	0,36	0,45		=
3.12	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (Ha)	2050	2550	3050	3.500	3950	2.050	2.552	3.218	4.023		>
3.13	Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik (Km)	17	20	26	33	41		tad	26,3	33,30		=
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN												
	Perumahan											
4.1	Rumah Layak Huni yang Terbangun	294	-	-	2	2		tad	tad	tad		
4.2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Setiap Tahun	15.026	15.126	15.250	15.360	15.450		15.154	15.400	15.550		=
4.3	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun	45.000	45.100	45.200	45.300	45.400	87	45.144	45.350	tad	tad	=
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
5.	Penataan Ruang											
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	30,98	0,35	0,39	0,34	tad	=
=	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya (%)	25	20	15	10	5		20	Tad	tad		
5.3	Jumlah Bangunan ber IMB (Bangunan)	25.141	27.141	29.141	31.141	33.141		26.754	28.763	50.341		
5.4	Jangkauan Wilayah Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%)	60 % dari Jangkauan Wilayah	64% dari jangkauan wilayah	68% dari jangkauan wilayah	72% dari jangkauan wilayah	76% dari Jangkauan Wilayah		64	Tad	0,02		<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
5.5	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu)	5.147	5.647	6.147	6.647	7.147		5.647	5.914	7.057		=
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
6.	Perencanaan Pembangunan											
6.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA	1	0	0	0	1	tad	Tad	0	tad	tad	=
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA	1	1	0	0	1		1	0	0		=
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA	1	2	3	3	1	4	5	6	7	8	=
6.4	Persentase Program dalam RPJMD terhadap Program dalam RKPD	100	100	100	100	100		100	100	100		=
6.5	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah Ditetapkan dengan PERDA (RTRWK, RP3KP)	0	1	2	2	0		tad	0	0		=
DINAS PERHUBUNGAN												
7.	Perhubungan											
7.1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji)	12.256	18.860	19.600	20.256	23.256	12.256	11.516	10.445	10541	10.099	<
7.2	Rasio Ijin Trayek (%)	0,187	0,184	0,176	0.169	0,162		0,184	0,184			=
7.3	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	0,114	0,160	0,210	0,246	0,320		0,160	1,30			
7.4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	59.250	59.350	60.156	61.160	59.250		59.350	37,630			
7.5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)	30	30	30	30	30		30	30			



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
8.	Lingkungan Hidup											
8.1	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%)	84,6	100	100	100	100		80	80	90		<
8.2	Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan (HO) (Ijin Usaha)	200	220	240	260	280		362	582	573		>
8.3	Presentase Penegakan Hukum Lingkungan	90	100	100	100	100		100	90	87		<
8.4	Jumlah Pengambilan Sampel (Kali/Tahun)	4	8	14	20	26		4	13	6		<
8.5	Peningkatan Mutu Udara/ISPU (Hari/Tahun)	321	365	365	365	365		289	180	310		<
8.6	Persentase Sampah yang Tertangani	61,18	70	75	80	85		Tad	65	48,72		<
8.7	Jumlah TPS terhadap Penduduk (Unit)	4	8	14	20	26		tad	Tad	121		
8.8	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Unit)	321	365	365	365	365		1	1	1		<
8.9	Jumlah PKL yang Dibina per Tahun	61,18	70	75	80	85		587	650	700		
BADAN PERTANAHAN												
9.	Pertanahan											
9.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	3,35	5,35	7,35	9,35	11,35	tad	tad	5,16	4,5		<
9.2	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	75	75	75	75	76	tad	tad	53	75		
9.3	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	100	tad	tad	9	0		<
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil											
10.1	Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk (%)	97	100	100	100	100	tad	56	51	60	tad	<
10.2	Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%)	95	100	100	100	100	tad	78	89	95	tad	<
10.3	Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)	85	100	100	100	100	tad	65	56,88	65	tad	<
10.4	Kepemilikan KTP (%)	99	100	100	100	100		66	64	70	tad	<
10.5	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	90	100	100	100	100	tad	37	46	56	tad	<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
11.1	Rasio KDRT	4,5	4,3	4,1	3,8	3,6	tad	6	tad	tad	tad	
11.2	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	33,37	33,35	33,2	33,0	33,0	tad	tad	0	tad	Tad	
11.3	Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan	48	51	55	59	63	tad	tad		tad	Tad	
11.4	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	85	100	100	100	100	85	6	100	0	21,42	
11.5	Persentase Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah	62,45	62,47	62,49	62,50	62,52	62,54	23	62,49	337	64,83	
11.6	Partisipasif Perempuan di Lembaga Swasta	238	244	248	252	256	tad	tad	1.145	tad	Tad	
11.7	Jumlah Forum Anak	1	31	36	36	36		35	36			
11.8	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	53	43	31	21	10		4	31			
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
12.1	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,8	2,4	2,3	1,87	0,25	
12.2	Persentase Akseptor KB	78,6	79	80	83	86	88	40,55	92,96	85,5	86,89	=
12.3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	100	100	100	100	100	31.253	40.565	43.7158	37.098	Tad	<
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	11.236	11.186	11.136	11.086	11.036	10.986	11.186	11.136	10.25	9.960	<
12.5	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	NA	1	2	3	4				1		
DINAS SOSIAL												
13.	Sosial											
13.1	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Org)	4	7	10	13	16		Tad	0	3		



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
13.2	Penurunan Jumlah PMKS	10.500	8.500	6.500	4.500	2.500	1.839	Tad	2000	2.842		<
13.3	Persentase PMKS Skala Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.	20	35	55	70	90		Tad	55	20		
13.4	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial	40/120	55/120	75/120	90/120	110/120		Tad	20/120	90/120		=
13.5	Rasio Panti Sosial yang Mendapat Pembinaan Pemerintah (Panti Sosial yang Dibina/Jumlah Panti sosial)	2/26	6/26	10/26	14/26	18/26		Tad	10/26	14/26		=
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH												
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
15.1	Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran - Skala Nasional - Skala Lokal	20 150	24 180	28 210	32 240	36 270		4 30	26 210	29 240		<
15.2	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah	10	15	20	25	30		5	23	28		=
15.3	- Jumlah Koperasi Sehat - Jumlah Koperasi Berkualitas	40 15	44 18	48 21	52 24	56 27		4 3	48 21	52 24		=
15.4	Persentase Koperasi Aktif	65	68	71	74	77	tad	3	88,19	88,28		>
15.5	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan	300	330	360	390	420		30	360	30		<
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
16.	Penanaman Modal											
16.1	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	PMDN = Rp. 384.13 0.000.0 00 PMA =	PMDN =Rp. 400.0 00.00 0.000 PMA	PMDN =Rp.4 40.00 0.000. 0000 PMA =	PMDN = Rp. 484.0 00.00 0.000 PMA = US\$	PMDN = Rp. 532.4 00. 000. 000P	tad	PMDN = 394.1 30 PMA = 19.09 7.090	PMDN =Rp. 1.171.0 85.000. 000 PMA =	PMDN =Rp.6 16,12 M PMA = US\$-		<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
		US\$ 1.450.0 00	=US\$ 1.500. 000	US\$ 1.650. 000	1.815. 000	MA = US\$ 1.815. 00 0			US\$ 9.989.0 00			
16.2	Persentase Kenaikan/PenurunanNilai Realisasi PMDN/PMA	PMDN =0,00% PMA = - 3,02%	PMDN = 4,13% PMA= 3,45%	PMDN = 10,00 % PMA = 10.00 %	PMDN = 10.00 % PMA = 10.00 %	PMDN = 10,19 % PMA = 10,00 %		PMDN =99,9 9PMA = 99,88	PMDN = 68% PMA = 26%	PMDN = - PMA = -		
16.3	Jumlah investor PMA/PMDN	PMDN = 7 PMA = 26	PMDN = 9 PMA =28	PMD N = 10PM A = 30	PMD= 15 PMA= 35	PMDN = 20 PMA = 40	PMDN = 7 PMA = 26	PMDN = 6 PMA =22	PMDN =68 PMA =26	PMDN = 101 PMA = -	PMDN = 73 PMA = -	<
16.4	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan)	Kurang dari 15% Perush yang telah menya mpaika n LKPM- nya secara berkala	60% perus ahaan menya mpaia kan LKPM nya secara berkal a	75% Perus ahaan menya mpaik an LKPM nya secara berkal a	85% perus ahaan menya mpaia kan LKPM nya secara berkal a	95% Perus h menya m paika n LKPM nya secara berkal a		0%	24%	17,82 % perus ahaan menya mpaia kan LKPM nya secara berkal a		<
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA												
17.	Kebudayaan											
17.1	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Tempat Kesenian)	2	3	4	5	6	tad	0	2	5		



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
17.2	Jumlah Grup Kesenian yang Dikelola	91	96	101	106	111		98	103	103		=
17.3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (BCB/Benda Cagar Budaya)	4	7	11	16	22		3	6	6		<
17.4	Jumlah Penyelenggara Festival Seni Budaya (Kali)	1	5	9	13	17		2	4	4		<
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
18.	Kepemudaan dan Olahraga											
18.1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina	30	32	34	36	38	tad	tad	4	3		<
18.2	Prestasi Pemuda Pelajar Tingkat Regional (Orang)	90	90	90	90	90		tad	1	5		<
18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	12	13	15	17	19	tad	tad	7	9		<
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
19.1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	10	30	50	70	90	10	12	12	11	12	<
19.2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	10	30	50	70	90	10	30	50	65	90	=
19.3	Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga	92/666	340/ 666	588/6 66	836/6 66	1.084 /666		98/66 6	92/666	582/6 66		<
19.4	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,11	0,004	0,12	tad	
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
20.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	5,87	6,39	7,07	7,77	8,51	8,71	6,78	8,84	7,42	7,63	=
20.2	Persentase Jumlah Kasus/Pengaduan yang Ditangani	88.65	90,6 5	92,92	95,22	97,57		tad	92,00	93,33		



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
20.3	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Kecamatan)	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	<
20.4	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran PERDA	48.44	54,94	62,16	69,75	77,60		50	61,53	82,78	97,67	>
20.5	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
20.6	Persentase Menurunnya Konflik di Masyarakat	89	91	93,2	95,4	97,7		90	92	92,54	94,44	<
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
20.7	Jumlah Sarana Prasarana Diklat (Gedung)	0	0	0	1	0			0	0		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH												
20.8	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Tidak Wajar (Disclaimer)	WDP	WTP	WTP	WTP		WDP	WDP	WDP		<
20.9	Nilai Evaluasi Kinerja	D	C+	C+	A	A			C	C(42,79)		<
20.10	Produk Hukum Daerah (Legislasi)	4	10	16	24	32		13 (3 Perda 10 Perwali)	4	12		<
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN												
21.	Ketahanan Pangan											
21.1	Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)	30.007	32.177	33.785	35.474	37.247	tad	33,759	102,49	35.638		>
21.2	Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%)	77	80	82	85	87		Tad	82	91,6		
22.3	Persentase Konsumsi(Kg/Kapita/Tahun)	36,50	38,10	39,50	41,00	43,00		Tad	35	41		
21.4	Konsumsi Energi	1.794	1.864	1.934	2.005	2.076		Tad	2000	2118,6		>



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
21.5	Konsumsi Protein	57,2	0,16	0,16	0,16	0,16		Tad	25	66		>
21.6	Pangan Utama (Ton)	30.007	31.827	33.647	35.467	37.287		33,759	26.639	35.638		=
21.7	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr)	2.665	2.732	2.799	2.866	2.933		2,770	2.748	2.938		=
21.8	Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	86	86	87	88	89		88,42	89.91	97,25		>
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN												
22.	Statistik											
22.1	Tersedianya Buku Kota dalam Angka	1	2	3	4	5	1	1	1	4		=
22.2	Tersedianya Buku PDRB Kota	1	2	3	4	5	1	1	1	4		=
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN												
23.	Kearsipan											
23.1	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	2,86	2,86	2,86	2,86	5,71	2,86	2,86	3,03	12,12		>
23.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	11	15	19	24	28	11	56	100	100		>
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN												
24.	Komunikasi dan Informatika											
24.3	Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Aplikasi E-Gov	0 Posting / Tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 10 subdom ain	1.080 posting/ tahun 1 websit e resmi pemer intah kota dan 15 subdo main	1.080 posting/ tahun 1 websit e resmi pemer intah kota dan 20 subdo main	1.080 posting/ tahun 1 websit e resmi pemer intah kota dan 20 subdo main	1080 posting/ tahun 1 websit e resmi pemer intah kota dan 25 subdo m ain		24	36	350 Posting 1 Websi te Resmi 50		<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN												
25.	Perpustakaan											
25.1	Jumlah Perpustakaan	49	50	51	52	53	49	49	49	49	50	<
25.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	1.320	1.848	2.376	3.158	3.600	1.320	1.895	16.1907	19.931	19.626	>
25.3	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	12.499	13.999	15.199	16.749	18.349	12.449	14.018	18.280	23.458	18.124	>
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN											
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN												
1.	Pertanian											
1.1	Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (Ton/Ha)											
	- Padi	2,05	2,068	2,07	2,07	2,08	109	22,56	1,60	2,20		<
	- Jagung	2,256	2,259	2,259	2,26	2,26	1.372	22,6	2,26	2,26		<
	- Kedelai	1,2	1,21	1,22	1,22	1.225	6	0	1,20	0		<
	- Ubikayu	8	8,047	8,06	8,07	8,086	941	120,19	3,50	12,07		>
	- Ubi Jalar	7,56	7,63	7,76	7,88	8,00	309	70,86	8,33	7		
	- Kacang Tanah	1	1,037	1,046	1,100	1,130	8	12	1,00	1,2		<
	- Sayuran	1,980	1,981	1,982	1,983	1,984	tad	3,193	4.04	1,99		
	- Buah-buahan	3,452	3,454	3,455	3,456	3,457	tad	2,735	3,455	3,46		>
1.2	Populasi Ternak (Ekor)											=
	- Sapi	1.036	1.813	1.904	2.000	2.105	2.065	1.741	789	1.883		<
	- Kerbau	3	39	40	42	43	37	7	658	12		<
	- Kambing	2.793	3.072	3.226	3.384	3.553	2.787	982	1.001	1.134		<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	- Babi	14.420	15.574	16.820	18.166	19.619	14.510	13.036	13.036	17.498		<
	- Ayam Buras	197.433	211.264	221.827	232.918	244.562	106.687	71.218	76.876	82.257		<
	- Ayam Broiler	1.183.304	1.230.636	1.353.700	1.489.070	1.637.977	42.000	72.000	81.000	1.429.070		<
	- Ayam Ras Layer	42.000	50.000	60.000	70.000	80.000	1.336.591	1.277.500	2.063.825	100.000		>
	- Itik	4.811	5.052	5.305	5.570	5.849	5.536	4975	424	5.576		<
1.3	Produksi Peternakan (Kg/Tahun)											
	- Daging Sapi	674.520	993.150	1.171.950	1.289.100	1.401.450	834,630	859,599	772,632	927.864		<
	- Daging Kerbau	2.184	14.550	16.050	17.700	19.500	1,68	1,68	2,856	6.720		<
	- Daging Kambing	12.647	19.272	21.204	23.328	25.656	15,708	12,685	12,590	15.458		<
	- Daging Babi	116.760	240.900	265.020	291.540	320.700	tad	216,936	232.416	218.700		<
	- Daging Ayam Buras	272.108	465.953	512.548	563.803	620.183	194,704	32,314	159,130	262.593	tad	<
	- Daging Ayam Broiler	3.504.000	4.336.575	4.880.233	5.368.257	5.905.083		3.128,028	262.593	4.582.020		<
	- Daging Itik	28.744	37.359	41.095	45.205	49.726	32,455	20,529	12,590	27.631	tad	<
	- Telur Ayam Ras	551.880	562.017	574.175	585.659	597.372		911,954	1.616.942	1.616.942		>
	- Telur Ayam Buras	360.333	365.738	371.224	376.792	382.444		32,314	540.730	540.730		>



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	- Telur Itik	21.072	23.807	24.164	24.256	24.620		30,230	34.338	34.338	tad	>
1.4	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)		6.159,02	6.282,19	6.497,84		tad	15.404.000,00	tad	6.407,84		<
1.5	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)		6.159,02	56.151,30	57.274,33		tad	182.120.000,00	tad	57.274,33	tad	
1.6	Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak		55.050,30									
	- Jumlah Hewan yang Divaksin (Ekor)		5.300	5.600	5.900			6,147	5.839	7.688		>
	- Surveillance Avian Influenza (Sampel Unggas)		450	500	500			462	518	500		>
	- Sampel Produk Asal Ternak		65	100	150			65	75	70		<
DINAS PERIKANAN												
5.	Kelautan dan Perikanan											
5.1	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)											
	- Perikanan Budidaya		8.545	9.673,43	11.029,32		tad	9.203,65	9.670,60	11.179		=
	- Perikanan Tangkap		2.230	2.840	2.910		tad	2.140,00	2.497,5	2.611,6		<
5.2	Persentase Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)		38,10	39,50	41,00		tad	33	tad	41		=
5.3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)		31.468,95	32.098,33	32.740,29		tad	32.553,00	tad	32.740,29		=
5.4	Restocking Danau (Jumlah)		4	6	8			3		1		<
5.6	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (Rtp)		879	904	910			873		8		<



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												
6.	Perdagangan											
6.1	- Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) - Retribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD (juta)		10,92 988	11,32 1.026	11,72 1.064		tad	16,66 1224,96	18,84 1.346	12,18 3.544		>
6.2	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen		54	58	62			55	50	60,48		=
7.	Perindustrian											
7.1	Jumlah Kelompok Usaha IKM Pendukung Pariwisata dan Industri Riil		2	3	1			1	3	1		<
7.2	Jumlah Industri Kecil dan Menengah		10	10	10			10	12	8		=
7.3	Kontribusi Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB (%)		4,55	4,72	4,89			4,58	12,55	11,11		>
7.4	Jumlah IKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran		109	123	137			14	123	138		=
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
8.	Bencana Alam											
8.1	Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat		100	100	100			tad	100	0		<
8.2	Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap		100	100	100			tad	0	0		<
	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH												
1.1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.65	95.15	124.7			90.69	120.31	121.7		>



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
			5.800 .300	0.000. 000	00.00 0.000			8.979. 552,8 3	2.811.4 18,24	00.47 5.927, 31		
1.2	Persentase PAD terhadap APBD		8,00	9,00	10,00			9,57%	11,00	10,36 %		>
1.3	Persentase Ketergantungan atas DAU		56,0 0	55,00	54,00			62,18 %	100,00	56,01 %		>
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN												
2.	Pertanian											
2.1	Nilai Tukar Petani (%)		105	108	110		tad	101.2 9	108	108		=
2.2	Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani)		25	35	43			11	tad	43		<
2.3	Jumlah Embung (buah)		4	8	13			2	tad	13		<
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur											
DINAS PERHUBUNGAN												
1.	Perhubungan											
1.1	Jumlah Angkutan Darat (%)		40	40	40				40	40		=
DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
4.	Lingkungan Hidup											
4.1	Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan		5	6	7			3	9	12		=
4.2	Jumlah Taman Hijau		2	4	6			2	3	5		<
4.3	Jumlah TSAK (Tim Serbu Api Kelurahan)		30	37	44			29	37	31		<
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN												
5.	Komunikasi dan Informatika											
5.1	Ketersediaan Daya Listrik (%)		93,8 2	95,22	96,72			tad	tad	96,72		=
5.2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik		99,2	99,4	99,6			tad	tad	99,6		=



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	Fokus Iklim Berinvestasi											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.1	Jumlah Demo yang Dikendalikan		8	6	4					0		
1.2	Angka Kriminalitas		229	172	116		5,07	25,34	14,66	5,08	5,8	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
1.3	Persentase Perijinan Sesuai SOP		75%	85%	90%		80,04 %	80,04 %		14,28		<
1.4	Jumlah Perda yang Mendukung Investasi		0	2	2			3	1	0		<
1.5	Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal (Banyaknya Sistem Aplikasi)		3	3	3			1	1	1		<
DINAS TENAGA KERJA												
2.	Ketenagakerjaan											
	Jumlah lulusan S1/S2/S3											
2.2	Rasio Ketergantungan		0,36	0,28	0,21		40,45	39,90	39,41	38,86	46,14	<

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif. Transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari APBD.

Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek non fisik maupun fisik.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Menganalisis kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini sebagaimana terlihat dari target dan realisasi pendapatan daerah pada tabel 3.1. Pada tahun 2013, target Pendapatan daerah sebesar Rp893 milyar lebih dapat direalisasikan sebesar Rp874 milyar lebih atau sebesar 97,93%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan



target sebesar Rp996 milyar lebih dengan realisasi sebesar Rp966 lebih atau 97%. Sementara pada tahun 2017, realisasi mencapai 90,92%. Adapun perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah / Berkurang
2013	893.297.073.526,99	874.843.237.105,33	97,93%	(18.453.836.421,66)
2014	996.411.010.135,43	966.552.779.722,04	97,00%	(29.858.230.413,39)
2015	1.068.188.557.149,04	1.071.993.346.767,59	100,36%	3.804.789.618,55
2016	1.122.153.114.464,56	1.128.683.869.407,74	100,58%	6.530.754.943,18
2017	1.202.983.055.518,61	1.093.772.266.097,00	90,92%	(109.210.789.421,61)
Jumlah	5.283.032.810.794,63	5.135.845.499.099,70	97,21%	(147.187.311.694,93)

Total target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya selama periode tahun 2013-2017 sebesar Rp5.283 trilyun lebih dengan realisasi sebesar Rp5.135 trilyun lebih atau sebesar 97,21%. Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Dari data diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 2013-2017, realisasi PAD meningkat dari Rp63.534.338.407 pada tahun 2013, menjadi Rp150.888.509.403,00 pada tahun 2017. Pada kurun waktu yang sama, dana perimbangan meningkat dari Rp. 638.529.004.050,00 pada tahun 2013, menjadi Rp825.888.624.000,00 pada tahun 2017. Namun pendapatan lain-lain yang sah, menurun dari Rp172.779.894.648 menjadi Rp126.686.928.213 pada tahun 2017.

Salah satu ukuran kemandirian Pemerintah Daerah adalah dengan melihat proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Selama tahun 2013-2017, proporsi PAD cenderung meningkat yaitu pada tahun 2013 sebesar 7,26% meningkat menjadi 13,80% pada tahun 2017, dan pada tahun 2013 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 13,80%. Proporsi PAD dikisaran 10% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya masih dapat meningkatkan kemampuan penerimaan PAD kepada Pemerintah Pusat dan atau proporsi dari sisi finansial masih sangat tinggi. Perkembangan proporsi dapat dilihat pada tabel 3.3 dan Gambar 3.1 berikut ini:



Tabel 3.2 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

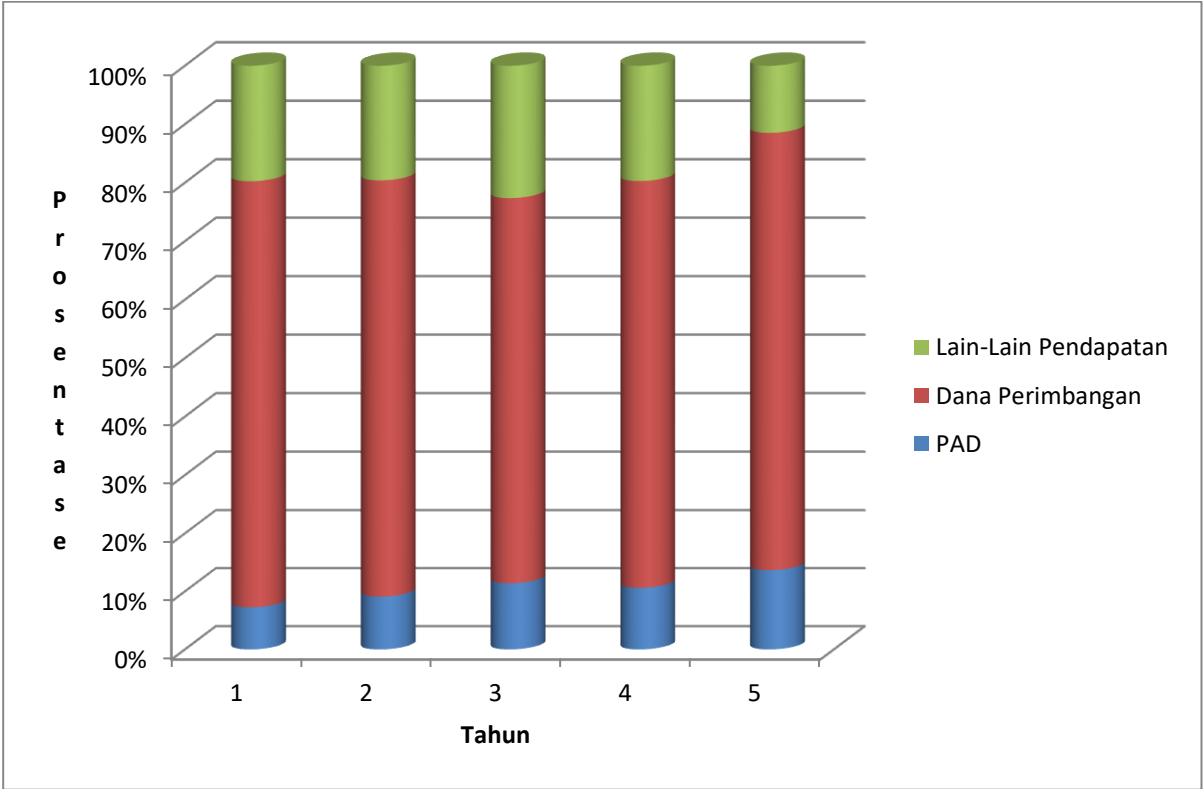
Tahun	PAD			Dana Perimbangan			Lain-Lain Pendapatan		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2013	63.468.520.300	63.534.338.407	100,10%	643.476.478.423	638.529.004.050	99,23%	186.352.074.804	172.779.894.648	92,72%
2014	100.334.949.600	88.001.254.976	87,71%	696.758.314.543	689.110.637.755	98,90%	199.317.745.992	189.440.886.991	95,04%
2015	113.072.837.545	122.314.716.629	108,17%	723.111.818.000	707.089.412.100	97,78%	232.003.901.604	242.589.218.039	104,56%
2016	128.008.255.307	119.961.089.336	93,71%	804.226.094.256	786.324.243.634	97,77%	189.918.764.901	222.398.536.437	117,10%
2017	194.035.762.592	150.888.509.403	77,76%	882.260.364.714	825.888.624.000	93,61%	126.686.928.213	126.686.928.213	100,00%

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

Tahun	PAD		Dana Perimbangan		Lain-Lain Pendapatan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2013	63.534.338.407	7,26%	638.529.004.050	72,99%	172.779.894.648	19,75%
2014	88.001.254.976	9,10%	689.110.637.755	71,30%	189.440.886.991	19,60%
2015	122.314.716.629	11,41%	707.089.412.100	65,96%	242.589.218.039	22,63%
2016	119.961.089.336	10,63%	786.324.243.634	69,67%	222.398.536.437	19,70%
2017	150.888.509.403	13,80%	825.888.624.000	75,51%	126.686.928.213	11,58%



Gambar 3.1 Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah



Dari gambar di atas, terlihat pula bahwa komponen Dana Perimbangan masih sangat dominan dalam Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, yaitu mencapai diatas 70% setiap tahunnya, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, berkisar antara 11-22%. Secara rinci realisasi pendapatan daerah per komponen sumber penerimaan selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah; terdiri dari Pajak Daerah, retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Realisasi selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi PAD Pemerintahan KotaPalangka Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Daerah	43.622.345	61.975.699	74.420.149	79.162.092	87.965.894
2	Retribusi daerah	10.831.917	13.930.313	15.166.185	15.486.756	12.737.916
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	959.030	989.084	1.388.938	2.146.124	3.430.179
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	8.121.045	11.106.156	31.339.442	23.166.115	46.754.519
Jumlah PAD		63.534.338	88.001.254	122.314.716	119.961.089	150.888.509



b. Dana Perimbangan; terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Realisasi dana perimbangan selama kurun waktu 2009-2013 sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Dana Alokasi Umum	539.535.616	589.449.668	599.588.799	657.826.439	646.270.544
2	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	43.773.450	42.229.350	61.088.040	82.298.801	135.472.963.
3	Dana Insentif Daerah (DID)					
4	Lain-lain					
	Jumlah	583.309.066	631.679.018	660.676.839	740.125.240	781.743.507

c. Lain-lain Pendapatan Daerah; terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari Provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi, dan lain-lain pendapatan. Secara rinci realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut:

Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	172.779.894	189.440.886	242.589.218	222.398.536	126.686.928
1.3.1	Hibah	-	2.864.000	42.450.340	53.326.807	2.000.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-		
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	10.186.642	45.585.820	
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	82.489.706	810.910.789	530.131.760	677.323.007	110.401.317
	Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus	90.290.188	105.485.808	138.865.515	101.293.842	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	-	-	8.250.000.000		150.000.000
	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-	-	-	-
1.3.6	Kekurangan Penyaluran dana DAK Tahun Sebelumnya					14.135.611
	JUMLAH	874.843.237	966.552.779	1.071.993.346	1.128.683.869	1.103.464.061



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Dari keseluruhan komponen dan sumber pendapatan daerah, komponen dana perimbangan merupakan proporsi terbesar dalam pendapatan daerah. Sumber terbesar dari komponen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen kedua terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber terbesar berasal dari Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi. Sedangkan terakhir adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara umum rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai berikut ini:

Tabel 3.7. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	874.843.237.105,33	966.552.779.722,04	1.071.993.346.767,59	1.128.683.869.407,74	1.103.464.061.616,54	0,09
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.534.338.407,34	88.001.254.976,36	122.314.716.629,08	119.961.089.336,31	150.888.509.403,46	0,25
1.1.1.	Pajak daerah	43.622.345.363,94	61.975.699.970,72	74.420.149.941,09	79.162.092.387,89	87.965.894.034,00	0,21
1.1.2.	Retribusi Daerah	10.831.917.077,00	13.930.313.946,74	15.166.185.712,44	15.486.756.669,25	12.737.916.296,00	0,06
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	959.030.316,10	989.084.541,24	1.388.938.535,61	2.146.124.917,60	3.430.179.688,00	0,35
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	8.121.045.650,30	11.106.156.517,66	31.339.442.439,94	23.166.115.361,57	46.754.519.385,46	0,71
1.2.	DANA PERIMBANGAN	638.529.004.050,00	689.110.637.755,00	707.089.412.100,00	786.324.243.634,00	825.888.624.000,00	0,08
1.2.1.3	Pendapatan Dana Alokasi Umum	539.535.616.000,00	589.449.668.000,00	599.588.799.000,00	657.826.439.000,00	646.270.544.000,00	0,07
1.2.1.4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	43.773.450.000,00	42.229.350.000,00	61.088.040.000,00	82.298.801.392,00	135.472.963.000,00	0,36
1.2.3.5	Dana Insentif Daerah (DID)						-
1.2.2.1	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		-			44.145.117.000,00	0,07
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	172.779.894.647,99	189.440.886.990,68	242.589.218.038,51	222.398.536.437,43	126.686.928.213,08	-
1.3.1.	Hibah	-	2.864.000.000,00	42.450.340.382,70	53.326.807.912,42	2.000.000.000,00	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-			0,16
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	10.186.642,00	45.585.820,00		-



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	82.489.706.647,99	81.091.078.990,68	53.013.176.013,81	67.732.300.705,01	110.401.317.213,08	-
	Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus	90.290.188.000,00	105.485.808.000,00	138.865.515.000,00	101.293.842.000,00		-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	-	-	8.250.000.000,00		150.000.000,00	0,09
	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-	-	-	-	0,25
1.3.6.	Kekurangan Penyaluran dana DAK Tahun Sebelumnya					14.135.611.000,00	0,21
	JUMLAH	874.843.237.105,33	966.552.779.722,04	1.071.993.346.767,59	1.128.683.869.407,74	1.103.464.061.616,54	0,06

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017*



Tabel 3.8 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya

No.	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	0,22	0,1	0,11	0,05	-0,02	0,09
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,26	0,39	0,39	-0,02	0,26	0,25
1.1.1.	Pajak daerah	0,26	0,42	0,2	0,06	0,11	0,21
1.1.2.	Retribusi daerah	0,1	0,29	0,09	0,02	-0,18	0,06
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,19	0,03	0,4	0,55	0,6	0,35
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	0,6	0,37	1,82	-0,26	1,02	0,71
1.2.	Dana Perimbangan	0,16	0,08	0,03	0,11	0,05	0,08
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	0,17	0,09	0,02	0,1	-0,02	0,07
1.2.2.	Dana alokasi umum	0,4	-0,04	0,45	0,35	0,65	0,36
1.2.3.	Dana alokasi khusus	-	-	-	-	-	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,48	0,1	0,28	0,28	-0,43	0,07
1.3.1	Hibah	-1	-	13,82	0,26	-0,96	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	0,27	-0,02	-0,35	0,28	0,63	0,16
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)		0,17	0,32	-0,27	-1	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017



3.1.1.2. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kalimantan Tengah, serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, selama kurun waktu 2013-2017, belanja daerah pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti terlihat dalam tabel 3.9.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja Tidak Langsung meningkat dari anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 613 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 551 milyar, menjadi anggaran sebesar Rp. 726 Milyar. Dengan realisasi sebesar Rp. 532 milyar pada tahun 2017. Sementara, Belanja Langsung meningkat dari anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 337 Milyar dengan realisasi sebesar Rp. 298 milyar, menjadi anggaran sebesar Rp. 742 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 667,705 milyar pada tahun 2013 total belanja meningkat dari tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 950 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 849 milyar, menjadi anggaran sebesar Rp. 1.213 Triliun dengan realisasi sebesar Rp 1.139 Triliun pada tahun 2017.

Tabel 3.9 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Palangka Raya

No	Uraian	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
2.1.	BELANJA LANGSUNG	41,17%	51,19%	57,91%
2.1.1.	Belanja Pegawai	3,82%	4,27%	6,30%
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	19,94%	22,83%	29,93%
2.1.3.	Belanja Modal	17,41%	24,09%	21,68%
2.3.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	58,83%	48,81%	42,09%
2.3.1.	Belanja Pegawai	55,83%	40,53%	38,35%
2.3.2.	Belanja bunga	0,17%	0,13%	0,13%
	Belanja Subsidi			
2.3.3.	Belanja Hibah	1,93%	2,06%	3,00%
2.3.4.	Belanja Bantuan Sosial	0,40%	0,45%	0,60%
	Belanja Bagi Hasil			
2.3.5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	0,14%	0,19%	0,00%
2.3.6.	Belanja Tidak Terduga	0,36%		
	JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Palangka Raya 2013-2017



Tabel 3.9 menunjukkan terjadi kenaikan belanja langsung pada tahun 2016 dari angka 51,19% dan pada tahun 2017 menjadi angka 57,91%, artinya terdapat kenaikan sebesar 5,72% dari tahun 2016. Jika dibandingkan pada tahun 2015, maka angka belanja langsung ini mengalami kenaikan sebesar 16,74%. Kenaikan belanja pegawai menunjukkan makin meningkatnya efisiensi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola realisasi belanja bagi pegawai daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya proporsi belanja pegawai di Kota Palangka Raya rata masih berada pada kisaran angka 5%. Peningkatan efisiensi pada belanja pegawai di Kota Palangka Raya ini bisa disebabkan oleh makin efisiennya pemberian honor pegawai dan moratorium (penghentian sementara) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdampak pada *rightsizing* struktur pegawai. Disamping itu, juga terjadi penurunan proporsi pada belanja barang dan jasa. Penurunan ini juga menunjukkan kinerja yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola keuangan daerah untuk realisasi belanja pegawai. Disisi lain, terjadi kenaikan proporsi belanja modal pada tahun 2017 sebesar 4,27% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 15,74%. Pada sektor belanja tidak langsung, terjadi penurunan pada tahun anggaran 2016 sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2017 dan mengalami penurunan sekitar 6% dari tahun 2017.

c. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pada Tabel 3.11 menyajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang menunjukkan tidak terjadi kenaikan yang signifikan baik pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada tahun 2016 dari angka Rp544.767.212.914,71,- (62,85%) turun sedikit menjadi Rp559.385.428.088,00 (61,72%) di tahun 2017, Jika dibandingkan pada tahun 2015, maka angka belanja langsung ini mengalami kenaikan sebesar 1,62%. Hal yang perlu dicermati pada sektor belanja langsung adalah kenaikan pada belanja pegawai pada tahun anggaran 2016 sebesar 1,21% dari tahun 2015 dan angka ini mengalami kenaikan sebesar 12,03% dari tahun 2017. Kenaikan belanja pegawai ini menunjukkan makin meningkatnya efisiensi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola realisasi belanja bagi pegawai daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya proporsi belanja pegawai di Kota Palangka Raya masih berada pada kisaran angka 5%. Peningkatan efisiensi pada belanja pegawai di Kota Palangka Raya ini bisa disebabkan oleh makin efisiennya pemberian honor pegawai dan moratorium (penghentian sementara) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdampak pada *rightsizing* struktur pegawai. Disamping itu juga terjadi penurunan proporsi pada belanja barang dan jasa. Penurunan ini juga menunjukkan kinerja yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola keuangan daerah untuk realisasi belanja pegawai.



Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya 2015-2017

No	Uraian	2015	%	2016	%	2017	%
A	Belanja Tidak Langsung	558.244.115.036,00	83,77%	544.767.212.914,71	85,39%	559.385.428.088,00	83,12%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	494.021.138.412,00	74,13%	480.631.396.075,00	75,34%	426.104.705.742,00	63,31%
2	Belanja Tambahan Penghasilan	59.143.239.124,00	8,88%	58.164.953.712,00	9,12%	49.502.455.455,00	7,36%
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	2.660.000.000,00	0,40%	2.689.400.000,00	0,42%	5.249.000.000,00	0,78%
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	2.419.737.500,00	0,36%	3.281.463.127,71	0,51%	3.256.925.000,00	0,48%
B	Belanja Langsung	108.155.898.849,60	16,23%	93.209.551.880,80	14,61%	113.624.066.181,00	16,88%
1	Belanja Honorarium PNS	12.831.660.688,00	1,93%	6.450.000,00	0,00%	25.755.972.714,00	3,83%
2	Belanja Uang Lembur	320.730.000,00	0,05%	568.695.200,00	0,09%	644.966.200,00	0,10%
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	52.200.000,00	0,01%	202.800.000,00	0,03%	211.250.000,00	0,03%
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.092.562.500,00	0,46%	3.813.848.400,00	0,60%	4.033.505.838,00	0,60%
5	Belanja premi asuransi kesehatan	204.568.659,80	0,03%	44.555.500,00	0,01%	419.720.558,00	0,06%
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	11.211.862.588,00	1,68%	13.083.022.339,00	2,05%	12.975.100.336,00	1,93%
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.198.956.900,00	0,18%	1.294.340.000,00	0,20%	1.980.817.200,00	0,29%
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.543.562.500,00	0,23%	1.926.422.200,00	0,30%	1.988.393.010,00	0,30%
9	Belanja perjalanan dinas	30.224.140.933,00	4,54%	48.406.559.169,98	7,59%	49.251.533.001,00	7,32%
10	Belanja perjalanan pindah tugas			14.859.000,00	0,00%		
11	Belanja Pemulangan Pegawai						
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	47.475.654.080,80	7,12%	23.848.000.071,82	3,74%	16.362.807.324,00	2,43%
	TOTAL	666.400.013.885,60		637.976.764.795,51		673.009.494.269,00	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017



d. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis realisasi pengeluaran dimaksud seperti dalam tabel berikut:



Tabel 3.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Palangka Raya

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	551.499.546.587,60	555.827.568.794,41	30.758.740.239,70	68.436.379.726,44	532.465.661.995,24
	Belanja Gaji dan Tunjangan			494.021.138.412,00	480.631.396.075,00	426.104.705.742,00
	Belanja pemungutan Pajak Daerah			2.419.737.500,00	3.281.463.127,71	3.256.925.000,00
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				2.689.400.000,00	5.249.000.000,00
	Belanja Bunga	1.781.151.504,62	1.721.646.151,61	1.549.725.044,60	1.503.096.079,05	1.479.540.227,07
	Belanja bantuan sosial	3.611.480.000,00		4.427.061.071,00	5.321.006.151,00	6.718.276.025,00
	Belanja Hibah	38.922.514.090,00	24.823.394.865,00	21.166.888.932,00	24.389.142.135,00	33.383.829.802,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.184.890.625,98	1.495.963.151,80	1.079.482.548,10	2.310.751.128,39	1.249.044.744,13
	Belanja Tidak Terduga		9.426.000,00	2.535.582.644,00		4.000.000.000,00
B	Belanja Langsung	298.352.769.378,72	392.076.337.596,70	1.021.305.089.218,36	1.117.483.590.971,32	574.048.156.989,33
	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis					
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				202.800.000,00	211.250.000,00
	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)				45.223.478.983,45	43.355.954.803,00

**RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023**

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
	Belanja Sewa gedung kantor				867.156.000,00	1.676.159.247,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor				1.366.721.450,00	1.106.072.436,00
C	Pembiayaan Pengeluaran			11.003.475.843,00	12.207.816.376,66	21.181.423.066,66
	Pembayaran Pokok Utang			1.503.475.843,00	1.883.423.066,66	1.383.423.066,66
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			9.500.000.000,00	10.324.393.310,00	9.798.000.000,00
	TOTAL (A+B)			540.248.026.802,60	532.334.071.072,81	497.373.699.862,73

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017



3.1.2. Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- a Rasio lancar = $\text{aktiva lancar} : \text{kewajiban jangka pendek}$
- b Rasio quick = $(\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}) : \text{kewajiban jangka pendek}$

- 2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Rasio total hutang terhadap total aset = $\text{total hutang} : \text{total aset}$
- b. Rasio hutang terhadap modal = $\text{total hutang} : \text{total ekuitas}$

- 3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

- a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur piutang = $365 : \text{perputaran piutang}$

Dimana :

- Perputaran piutang = $\frac{\text{pendapatan daerah}}{\text{rata-rata piutang pendapatan daerah}}$

- Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = $\frac{(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang})}{2}$

- b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = $365 : \text{perputaran persediaan}$

Dimana :

Perputaran persediaan = $\frac{\text{nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun}}{\text{rata-rata nilai persediaan}}$. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = $\frac{(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan})}{2}$



Tabel 3.12 Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
<u>ASET</u>					
ASET LANCAR	103.535.341.632,08	123.549.111.565,71	162.078.406.103,12	26.854.112.701,87	
Kas	83.596.912.617,92	92.994.908.044,79	103.670.682.417,83		
Kas di Kas Daerah	83.475.003.160,45	92.557.677.717,77	98.961.439.579,97		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	861.500,00	-		
Kas Dibendahara Penerimaan-Kas Lainnya	-	-	22.961.066,00		
Kas di Bendahara Pengeluaran	121.909.457,47	63.718.110,16	-	145.666,00	
Kas di Bendahara JKN			4.333.988.330,00	6.277.938.028,50	
Kas di Bendahara FKTP					5.127.867.898,50
Kas Dana Bansos Pendidikan			352.293.441,86		1.356.168.168,21
Investasi Jangka Pendek	-	372.650.716,86	4.333.988.330,00		
Piutang	16.903.078.772,16	25.257.360.122,92	47.143.406.593,07	78.537.181.256,07	90.127.353.522,17
Piutang Pajak	1.067.137.064,78	20.686.274.632,15	32.569.997.181,68	1.003.382.887,00	
Piutang Pajak Hotel	-	80.663.000,00			
Piutang Pajak Restoran	-	1.141.846.425,00	-		
Piutang Pajak PJU	-	1.127.855.825,00	-		
Piutang PBB	124.851.016,00	13.990.600,00	-		
Estimasi Piutang PBB tak tertagih	15.372.676.691,38	2.422.643.178,77	-		



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Piutang Pajak Galian C	-	2.305.015.007,77	-		
Piutang Pajak Hiburan	#REF!	15.477.428,00	-		
Piutang Pendapatan				78.537.181.256,0	
Piutang Retribusi	230.183.000,00	102.150.743,00	962.059.300,00		
Piutang Retribusi Kebersihan	-	925.932.887,00	962.059.300,00		
Piutang sewa	-	5.296.843.398,00	-		
Piutang Sewa Blok Pasar	-	123.549.111.565,71	-		
Piutang Sewa Tanah	-		-		
Piutang Bagi Hasil			12.685.417.224,39		
Piutang Bagi Hasil Provinsi	-	21.407.589.600,79			
Piutang Bagi Hasil PBB	-	21.407.589.600,79	-		
Piutang Bagi Hasil Cukai Rokok	-	9.488.248.588,56	-		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	4.343.734.322,23	-		
Piutang Lain-Lain	108.231.000,00	6.075.606.690,00	925.932.887,00	1.003.382.887,00	953.467.160,64
Piutang PDAM	-	1.500.000.000,00	-		
Piutang Kelotok	-	21.407.589.600,79	-		
Piutang Sapi Gaduhan	-		-		
Penyisihan Piutang				(21.543.169.585,19)	(23.783.005.064,67)
Beban Bayar dimuka				134.821.933,95	325.834.105,15



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Persediaan	3.035.350.242,00	5.296.843.398,00	29.187.429.795,00	37.786.951.331,4	83.275.740.343,6
Jumlah Aset Lancar	103.535.341.632,08	23.549.111.565,71	162.078.406.103,12	130.152.878.195,42	157.383.643.644,66
<u>INVESTASI JANGKA PANJANG</u>		21.407.589.600,79	26.888.944.946,20	40.733.549.197,91	57.699.012.484,91
Investasi Permanen	15.648.737.818,00				57.699.012.484,91
Penyertaan modal Pemerintah Daerah	18.120.901.765,00	21.407.589.600,79	26.888.944.946,20	40.733.549.197,91	57.699.012.484,91
Penyertaan Modal Pada PDAM dan PDIM (metde ekuitas)	(2.472.163.947,00)				
Penyertaan Modal Pada PDIM	-				
Penyertaan Modal Pada Bank Pembangunan Kal-Teng	-		-		
Penyertaan Modal Pada JAMKRIDA	-		-		
Jumlah Investasi Permanen	15.648.737.818,00	21.407.589.600,79	26.888.944.946,20	40.733.549.197,91	57.699.012.484,91
ASET TETAP				2.252.530.459.909,30	2.593.863.728.290,64
Tanah	145.336.130.531,00			1.024.658.885.756,22	1.174.995.791.796,22
Peralatan dan Mesin	190.396.707.044,88	193.972.112,00	1.000.125.634.909,00	269.851.310.352,06	292.490.360.983,71
Alat-alat Berat	-	11.581.528.578,41	-		
Alat-alat Angkutan	-	13.101.291.289,65	240.532.213.493,88		
Alat Bengkel	-	24.876.791.980,06	-		



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Alat Pertanian dan Peternakan	-		-		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	-	2.544.488.762.125,83	-		
Alat Studio dan Alat Komunikasi	-		-		
Alat Ukur	-		-		
Alat-alat Kedokteran	-		-		
Alat Laboratorium	-		-		
Alat Keamanan	-		-		
Gedung dan Bangunan	454.960.824.400,97		-	564.353.600.029,07	609.732.980.605,0
Bangunan Gedung	-		-		
Bangunan Monumen	-		573.594.419.057,58		
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	880.922.166.770,00		-	1.149.598.378.103,68	1.207.360.679.176,81
Jalan dan Jembatan	-		-		
Bangunan Air (Irigasi)	-		1.054.680.253.158,00		
Instalasi	-		-		
jaringan	-		-		
Aset Tetap Lainnya	24.232.153.993,00		-	109.000.729.336,00	190.662.347.295,18
Buku dan Perpustakaan	-		-		
Barang Bercorak Kesenian dan	-		51.727.522.884,00		



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Kebudayaan					
Hewan/ternak dan Tumbuhan	-		-		
Sarana prasarana kantor/sekolah	-		-		
Kontruksi Dalam Pengerjaan	847.570.000,00		-	30.720.314.722,40	73.327.601.941,75
Kontruksi Dalam Pengerjaan	-		-		
Jumlah Aset Tetap	1.696.695.552.739,85		3.377.975.800,00	2.252.530.459.909,30	
DANA CADANGAN			-		10.020.173.607,00
Dana Cadangan	-		(65.035.044.520,47)		
Jumlah Dana Cadangan	-		2.859.002.974.781,99		10.020.173.607,00
ASET LAINNYA			-		
Tagihan Penjualan Angsuran (DUM)	143.738.112,00		-		
Tagihan Jangka Panjang				13.823.441.667,54	18.716.498.023,00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Daerah	11.581.528.578,41				
Aset Tidak Berwujud				2.604.370.501,00	1.689.993.287,82
Lain-lain Aset	3.146.472.573,47				104.559.732.356,14
Jumlah Aset Lainnya	14.871.739.263,88		13.787.043.766,16	95.462.267.317,20	
TOTAL ASET	1.830.751.371.453,81	2.544.488.762.125,83	3.131.829.024.230,58	2.537.002.385.788,37	2.944.702.578.184,01



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
<u>KEWAJIBAN</u>					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.816.921.173,67	3.394.985.446,07			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		372.650.716,86	163.858.776,56	6.945.621,00	7.475.738,00
Kewajiban Bunga dan Jasa Bank	193.392.552,73	180.594.846,42	1.383.423.066,66	1.382.513.081,72	1.264.831.784,27
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				1.383.423.066,66	1.383.423.066,66
Kewajiban hutang luar negeri jangka pendek	1.623.528.620,94	1.503.475.843,79			
Utang Beban			513.055.505,00	492.212.002,79	1.852.396.706,69
Utang Jangka Pendek Lainnya		1.338.264.039,00	2.341.930.000,00	1.695.419.000,00	24.768.687.769,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.816.921.173,67	3.394.985.446,07	4.402.267.348,22	4.960.512.772,17	29.856.549.198,62
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	19.487.975.710,47	17.984.499.866,68	16.601.076.800,02	15.217.653.733,36	
Utang Bunga dan Jasa Bank					
Utang Jangka panjang Lainnya					
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	19.487.975.710,47	17.984.499.866,68		15.217.653.733,36	13.834.230.666,70
JUMLAH Kewajiban	21.304.896.884,14	21.379.485.312,75	21.003.344.148,24	20.178.166.505,53	43.690.779.865,32
EKUITAS	1.809.446.474.569,34	2.523.109.276.813,08	3.110.825.680.082,34	2.516.824.219.282,84	2.901.011.798.318,69
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.830.751.371.453,81	2.544.488.762.125,83	3.131.829.024.230,58	2.537.002.385.788,37	2.944.702.578.184,01



3.1.2.1 Aset Daerah

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) Aset Lancar, (2) investasi jangka panjang (3) aset tetap, (4) dana cadangan dan, (5) aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas dan dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) tahun periode akuntansi. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 memiliki aset lancar yang mencapai nilai Rp. 157.383.643.644,66 yang terdiri dari (I) Kas di Bendahara FKTP senilai Rp. 5.127.867.898,50 Kas di Bendahara Dana Bansos Pendidikan senilai Rp. 1.356.168.168,21; (II) Piutang pendapatan senilai Rp. 90.127.353.522,17 berupa Penyisihan Piutang senilai Rp. (23.783.005.064,67); Piutang lainnya senilai Rp. 60.527.000,00 Bagian lancar tuntutan perbendaharaan senilai Rp. 20.818.152,00 Bagian lancar piutang; Beban Dibayar Dimuka senilai Rp. 325.834.105,15 (III) Persediaan senilai Rp. 83.275.740.343,66.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017, memiliki investasi jangka panjang mencapai nilai Rp. 57.699.012.484,91 yang terdiri dari (I) Investasi non permanen sebesar Rp. 0,00 dan (II) Investasi permanen sebesar Rp. 57.699.012.484,9.

c. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 memiliki aset tetap yang mencapai nilai Rp. 2.593.863.728.290,64 yang terdiri dari (i) Tanah senilai Rp. 1.174.995.791.796,22; Peralatan dan Mesin Rp. 292.490.360.983,71; Gedung dan Bangunan Rp. 609.732.980.605,05; Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 1.207.360.679.176,81; Aset Tetap Lainnya Rp. 190.662.347.295,18; Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 73.327.601.941,75; dan Akumulasi Penyusutan Rp. (954.706.033.508,08)

d. Dana cadangan

Dana cadangan dimaksudkan untuk menyediakan anggaran yang memerlukan waktu penyediaan anggaran dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran. Dana cadangan Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 10.020.173.607,0.

e. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak berwujud atau aset yang dalam kondisi tidak bisa dipergunakan (rusak). Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 memiliki aset lainnya yang terdiri dari Tagihan Jangka



Panjang Rp18.716.498.023,00; Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp0,00 ; Aset Tidak Berwujud Rp. 1.689.993.287,82 Aset Lain-lain Rp104.559.732.356,14 dan Kas yang dibatasi penggunaannya Rp769.796.489,84.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul sebagai akibat dari pemenuhan terhadap kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas atau tanggung jawab dimasa lalu yang mengalami defisit. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp43.690.779.865,32 yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar Rp29.856.549.198,62 dan Kewajiban Jangka Panjang Rp13.834.230.666,70.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 memiliki Ekuitas Dana adalah sebesar Rp4.703.630.210.438,04 yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017, Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp2.901.011.798.318,69 dengan perincian sebagai berikut : (i) Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp161.817.407.979,00 (ii) Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp80.086.524,00 (iii) Cadangan Piutang Rp24.063.790.568,90 (iv) Cadangan Persediaan Rp15.662.409.549,00 (v) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran utang jangka Pendek Rp(66.762.546.597,00).
- b. Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017, ekuitas dana investasi berjumlah sebesar Rp4.568.767.926.646,14 yang terdiri dari: (i) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp65.441.893.284,70 (ii) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp4.377.998.569.847,94 (iii) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp125.327.463.513,50.
- c. Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017, dana cadangan berjumlah sebesar Rp1.135.768,00.

3.1.2.4 Analisis Rasio



Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas adalah rasio lancar (*Current Ratio*) dan rasio quick (*Quick Ratio*). Rasio Likuiditas Kota Palangka Raya pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio lancar Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh utang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun perlu diperhatikan juga, nilai rasio Pemerintah Kota Palangka Raya yang tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Nilai ratio *quick* neraca keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 sebesar 153,74 dan pada tahun 2012 264,9. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Kota Palangka Raya setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Untuk lebih jelasnya rasio likuiditas Pemerintah Kota Palangka Raya periode tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
1	Rasio Likuiditas						
1.1	Rasio Lancar (current ratio)	56,98	6,94	36,82	26,24	5,27	26,4493
2	Rasio Solvabilitas						
2.1	Rasio Hutang Lancar terhadap total Aset	0,0116	0,0084	0,0067	0,0080	0,0148	0,0099
2.2	Rasio Hutang terhadap modal	0,0118	0,0085	0,0068	0,0080	0,0151	0,0100
3.	Rasio Aktivitas						
3.1	Rasio Perputaran Aktiva	0,0347	0,0346	0,0391	0,0473	0,0513	0,0414
3.2	Rasio Perputaran Aktiva Tetap	0,0374	0,0371	0,0428	0,0533	0,0582	0,0457

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio solvabilitas Pemerintah Kota Palangka Raya selama periode 2013-2017 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Hal ini



menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Palangka Raya cukup kuat untuk membayar manakala melakukan pinjaman ke kreditor. Untuk lebih jelasnya rasio solvabilitas Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2013-2017 sebagai tercantum dalam tabel 3.13 di atas.

Untuk menganalisis neraca Kota Palangka Raya periode tahun 2013-2017 digunakanlah beberapa analisis rasio seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rasio Likuiditas						
1.1	Rasio Lancar (current ratio)	56,98	6,94	36,82	26,24	5,27	26,4493
2	Rasio Solvabilitas						
2.1	Rasio Hutang Lancar terhadap total Aset	0,0116	0,0084	0,0067	0,0080	0,0148	0,0099
2.2	Rasio Hutang terhadap modal	0,0118	0,0085	0,0068	0,0080	0,0151	0,0100
3.	Rasio Aktivitas						
3.1	Rasio Perputaran Aktiva	0,0347	0,0346	0,0391	0,0473	0,0513	0,0414
3.2	Rasio Perputaran Aktiva Tetap	0,0374	0,0371	0,0428	0,0533	0,0582	0,0457

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Namun dalam penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2017 ini, data yang digunakan terkait dengan APBD tahun 2013-2017 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sedangkan untuk APBD Tahun 2017 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.



a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama Periode Tahun Anggaran 2013-2017, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan professional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan OPD penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang professional dan bermoral, serta mengembangkan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja yang dianggarkan berdasarkan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah tahun 2013-2017, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program



dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013-2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM dan SDGs, sehingga diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM dan MDGs guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013-2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang professional, efisien dan efektif, antara lain:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Palangka Raya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari volume APBD tiap tahunnya.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara bertahap sebesar 10% dari volume APBD tiap tahunnya.
4. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB, dan BBNKB sesuai Pasal 8 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah.
5. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kelurahan.
6. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah serta produksi kelurahan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam.
8. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pelayanan dasar OPD.
9. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif pada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi pada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk mengarahkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



- d) Alokasi belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- f) Mengalokasikan belanja bagi hasil pada Kabupaten/Kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil yang dilaksanakan secara profesional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah.
- g) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten/kota dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, (b) pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemenuhan belanja yang mengalami defisit anggaran sebagai akibat dari proporsi pendapatan yang lebih kecil yang dibandingkan dengan kebutuhan belanja. Disamping itu arah kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan pada pemenuhan belanja investasi yaitu dengan peningkatan penyertaan modal BUMD serta penyediaan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilukada tahun 2018.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan keuangan tersebut di atas yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, maka untuk mengetahui kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, hendaknya diketahui pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa proporsi penggunaan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran belanja daerah mengalami fluktuasi dikisaran antara 86-94% tiap tahunnya. Sementara itu analisis proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut:



Tabel 3.15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Palangka Raya 2018-2023 (Rp)

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi				
		(Rp)		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
A	Belanja Tidak Langsung	485.194.190.758,00	0,02	496.693.293.078,97	508.464.924.124,94	520.515.542.826,70	532.851.761.191,69	545.480.347.931,93
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	426.104.705.742,00	0,07	396.159.851.801,84	368.319.396.769,77	342.435.452.305,00	318.370.523.039,90	295.996.776.205,35
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.249.000.000,00	0,48	7.775.839.936,18	11.519.086.819,04	17.064.312.310,12	25.278.979.071,16	37.448.141.552,19
3	Belanja Bunga	1.479.540.227,07	0,02	1.445.688.276,09	1.412.610.859,37	1.380.290.255,52	1.348.709.148,63	1.317.850.618,96
4	Belanja bagi hasil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja bantuan sosial	6.718.276.025,00	0,23	8.278.671.155,54	10.201.485.596,38	12.570.895.306,50	15.490.627.057,59	19.088.499.330,14
	Belanja Hibah	33.383.829.802,00	0,26	42.080.813.050,94	53.043.489.543,61	66.862.106.004,40	84.280.677.191,65	106.237.044.753,20
B	Pembiayaan Pengeluaran	21.181.423.066,66		21.181.423.066,66	21.181.423.066,66	21.181.423.066,66	21.181.423.066,66	21.181.423.066,66
1	Pembayaran Pokok Utang	1.383.423.066,66	0,01	1.374.595.775,71	1.365.824.809,59	1.357.109.808,89	1.348.450.416,53	1.339.846.277,68
2	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	9.798.000.000,00	0,02	9.973.349.144,64	10.151.836.411,61	10.333.517.962,06	10.518.450.962,24	10.706.693.601,47
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	506.375.613.824,66	0,11	562.076.931.345,37	623.905.393.793,36	692.534.987.110,63	768.713.835.692,80	853.272.357.619,01

Sumber: Realisasi APBD Kota Palangka Raya 2013-2017



Tabel 3.16 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

N O	URAIAN	2013 Realisasi (Rp)	%	2014 Realisasi (Rp)	%	2015 Realisasi (Rp)	%	2016 Realisasi (Rp)	%	2017 Realisasi (Rp)	%	Rata-rata Kenaikan (%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	551.499.546	0,20	555.827.568	0,01	30.758.740	-0,94	68.436.379	1,2	559.385.428	7,17	1,53
1	Belanja Pegawai	505.999.510	19,85	524.340.249	0,04	-				505.882.852		9,95
2	Belanja Bunga	1.781.151	-0,13	1.721.646	-0,03	1.549.725	-0,10	1.503.096.	0,0	1.520.000	0,01	-0,05
3	Belanja Subsidi			-		-		-		-		
4	Belanja Hibah	38.922.514	0,79	24.823.394	-0,36	21.166.888	-0,15	59.226.626	1,8	39.100.548	- 0,34	0,35
5	Belanja Bantuan Sosial	3.611.480	-0,52	3.436.888	-0,05	4.427.061	0,29	5.395.906	0,2	7.632.982	0,41	0,07
6	Belanja Bagi Hasil	-		-		-		-		-		
7	Belanja Bantuan Keuangan	1.184.890	-0,19	1.495.963	0,26	1.079.482	-0,28	2.310.751	1,1	1.249.044	- 0,46	0,09
8	Belanja Tidak Terduga	-		-		2.535.582		-		-		
B	BELANJA LANGSUNG	298.352.769	0,24	392.076.337	0,31	1.021.305.0 89	1,60	1.117.483.59 0	0,1	656.024.392	- 0,41	0,37
1	Belanja Pegawai	-		36.501.269		558.943.11 4	14,31	595.877.862	0,1	77.870.257	- 0,87	4,51
2	Belanja Barang dan Jasa	125.018.156	0,18	163.656.757	0,31	256.697.37 3	0,57	235.919.509	-0,1	293.465.219	0,24	0,24



Selanjutnya dari Tabel 3.16 dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentas e
		(Rp)	(Rp)	
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2013	560.992.523.628,4 8	959.476.114.651,16	58,47%
2	Tahun Anggaran 2014	615.781.110.973,2 0	1.079.951.957.055,3 5	57,02%
3	Tahun Anggaran 2015	666.400.013.885,6 0	1.160.810.814.476,9 7	57,01%
4	Tahun Anggaran 2016	866.778.071.706,4 0	1.198.127.787.074,4 2	72,34%
5	Tahun Anggaran 2017	784.429.240.533,2 3	1.121.400.056.668,0 6	69,95%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain:

- Proporsi belanja tidak langsung dalam APBD Pemerintah Kota Palangka Raya setiap tahunnya rata-rata masih di atas 50,00 % dari total belanja daerah.
- Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam APBD setiap tahunnya rata-rata masih 62,95% dari total belanja daerah, sementara arah yang diinginkan secara nasional mengenai proporsi belanja untuk lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur.
- Faktor penyebab yang melatar belakangi masih dominannya proporsi belanja tidak langsung antara lain karena di dalam belanja tidak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah, serta belum diterapkannya sistem penganggaran dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB), belum efektifnya pola pengintegrasian antara target capaian pada Standard Pelayanan Minimum dengan penganggarnya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas.

Berikutnya dilakukan analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan meningkat serta prioritas utama.



Tabel 3.18 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Palangka Raya

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
A	Belanja Tidak Langsung	529.244.550.959,60	520.126.254.696,15	476.192.276.796,07	-5,08%
	Belanja Gaji dan Tunjangan	494.021.138.412,00	480.631.396.075,00	426.104.705.742,00	-7,03%
	Belanja pemungutan Pajak Daerah	2.419.737.500,00	3.281.463.127,71	3.256.925.000,00	17,43%
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.660.000.000,00	2.689.400.000,00	5.249.000.000,00	48,14%
	Belanja Bunga	1.549.725.044,60	1.503.096.079,05	1.479.540.227,07	-2,29%
	Belanja bantuan sosial	4.427.061.071,00	5.321.006.151,00	6.718.276.025,00	23,23%
	Belanja Hibah	21.166.888.932,00	24.389.142.135,00	33.383.829.802,00	26,05%
	Belanja Bantuan Keuangan		2.310.751.128,39		0,00%
	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00			0,00%
B	Pembiayaan Pengeluaran	11.003.475.843,00	12.207.816.376,66	21.181.423.066,66	42,23%
	Pembayaran Pokok Utang	1.503.475.843,00	1.883.423.066,66	1.383.423.066,66	-0,64%
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	9.500.000.000,00	10.324.393.310,00	9.798.000.000,00	1,79%
	TOTAL (A+B)	540.248.026.802,60	532.334.071.072,81	497.373.699.862,73	-4,02%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017. Diolah



3.2.2 Analisis Pembiayaan

Tabel 3.19 Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya 2015 - 2017

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.040.448.839.067,43	1.128.683.869.407,74	1.093.772.266.097,85
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.098.222.522.067,43	1.185.919.970.697,76	1.100.218.633.601,40
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	12.207.816.376,66	21.181.423.066,66
A	Defisit riil	(67.773.683.000,00)	(69.443.917.666,68)	(27.627.790.570,21)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	72.878.856.090,44	103.670.682.417,83	34.226.764.751,15
5.	Pencairan Dana Cadangan		-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan		-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	,-

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai pada table 3.20 berikut:



Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya 2015-2017

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
A	Defisit riil			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	107,53%	149,29%	123,89%
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	7,53%	49,29%	23,89%

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

3.2.3. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengolah data realisasi anggaran pada tabel berikut:



Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015–2017

No	Uraian	2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	94.744.640.952,15	100%	103.670.682.417,83	100%	34.226.764.751,15	100%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	9.241.879.084,14	9,75%	(8.047.165.971,06)	-7,76%	(43.147.253.188,07)	-126,06%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(16.022.405.900,00)	-173,37%	(17.901.850.622,00)	222,46%	(56.371.740.714,00)	130,65%
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.585.316.434,41	-66,07%	32.479.771.536,24	-181,43%	-	0,00%
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	0,00%	-	0,00%	-	
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	,	-		-	
7	Kegiatan Lanjutan	-		-		-	



3) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.22 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015–2017

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	83.596.912.617,92	26.854.112.701,87	-
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan		6.945.621,00	7.475.738,00
3	Kegiatan lanjutan			
	Sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	83.596.912.617,92	26.847.167.080,87	7.475.738,00

3.2.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kota Palangka Raya dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Palangka Raya yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2018-2023 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode 2013–2017 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2018-2023. Kebijakan anggaran merupakan acuan



umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

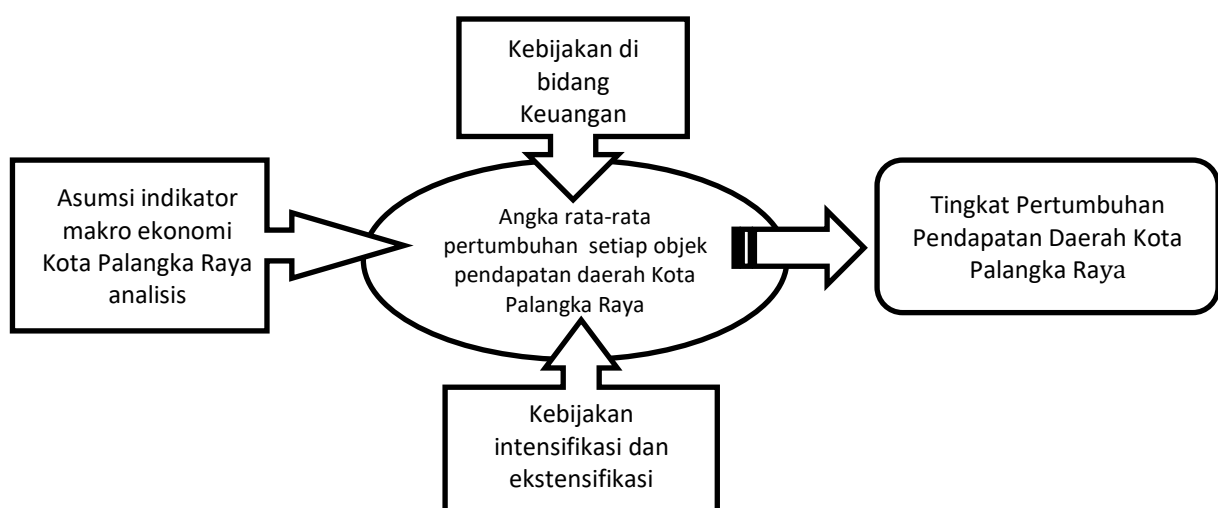
- a. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
 - 1) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - 2) Bertambahnya objek dan wajib pajak dan restribusi;
 - 3) Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.
- b. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan DAU cukup kecil karena adanya pengalihan kewenangan terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mempertimbangkan pendapatan negara;
 - 2) Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.
- c. Sesuai peraturan perundangan-undangan, pemerintahan daerah dapat mengakibatkan defisit.
- d. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan, Pemerintah Kota Palangka Raya, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun.

Guna mendukung arah kebijakan pengelolaan keuangan dengan tetap mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2018-2023 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1) Belanja Rutin diorientasikan pada peningkatan efektifitas Kinerja Aparatur; (2) Lebih berorientasi pada belanja Modal-Produktif; (3) Pemanfaatan pembiayaan pembangunan melalui kemitraan; (4) Memaksimalkan Integrasi potensi unggulan (pertanian arti luas); dan (5) Mensinergikan fokus pembangunan.

Untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan

terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.2 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah



Analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam tabel 3.23 berikut:



Tabel 3.23 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2018-2023

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2017	Proyeksi					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN		1.103.464.061.616,54	1.168.570.607.391,61	1.150.489.132.400,58	1.255.292.487.213,69	1.316.340.228.237,69	1.378.069.968.273,69	1.439.799.708.309,69
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,1499	150.888.509.403,46	194.291.907.111,70	161.666.745.620,67	183.668.701.979,69	192.959.655.099,69	202.932.607.231,69	212.905.559.363,69
1.1.1.	Pajak daerah		87.965.894.034,00	101.414.829.441,00	94.335.450.559,00	113.783.912.297,00	122.446.179.750,00	131.108.447.203,00	139.770.714.656,00
1.1.2.	Retribusi daerah		12.737.916.296,00	17.112.042.974,98	15.612.042.974,98	18.024.475.751,00	18.024.475.751,00	18.706.474.763,00	19.388.473.775,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		3.430.179.688,00	4.471.160.484,00	4.471.160.484,00	5.069.220.918,00	5.697.906.585,00	6.326.592.252,00	6.955.277.919,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah		46.754.519.385,46	71.293.874.211,72	47.248.091.602,69	46.791.093.013,69	46.791.093.013,69	46.791.093.013,69	46.791.093.013,69
1.2.	Dana Perimbangan	0,1099	889.020.557.740,00	854.046.422.500,00	879.346.408.000,00	944.864.918.273,00	995.988.689.691,00	1.047.112.461.109,00	1.098.236.232.527,00
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak		51.576.710.740,00						
1.2.2.	Dana alokasi umum / Dana Transfer Umum		657.826.439.000,00	698.757.751.500,00	724.114.146.000,00	755.023.182.705,00	783.551.289.552,00	812.079.396.399,00	840.607.503.246,00
1.2.3.	Dana alokasi khusus		135.472.291.000,00	155.288.671.000,00	155.232.262.000,00	189.841.735.568,00	212.437.400.139,00	235.033.064.710,00	257.628.729.281,00
1.3.4.	Dana insentif daerah		44.145.117.000,00	36.500.000.000,00	0	0	0	0	0
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,07	111.825.164.235,61	120.232.277.779,91	109.475.978.779,91	126.758.866.961,00	127.391.883.447,00	128.024.899.933,00	128.657.916.419,00
1.3.1.	Hibah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.3.2.	Dana darurat								
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)		109.825.164.235,61	80.082.277.779,91	93.982.277.779,91	88.258.866.961,00	88.891.883.447,00	89.524.899.933,00	90.157.916.419,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		150.000.000,00	1.650.000.000,00	-	-	-	-	-
1.3.8.	Dana Insentif Daerah				13.493.701.000,00	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00



RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

A	Belanja Tidak Langsung	0,0346	532.465.661.995,24	590.397.798.997,58	657.902.197.750,75	668.749.195.621,37	684.619.981.448,92	700.887.536.922,17	727.561.781.282,25
	Belanja Pegawai		492.806.656.984,13	524.379.473.478,48	615.408.714.611,94	634.831.433.102,24	650.702.218.929,79	666.969.774.403,04	683.644.018.763,1 ₂
	Belanja Bunga		1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
	Belanja Subsidi								
	Belanja bantuan sosial		9.565.262.000,00	11.830.563.000,00	13.255.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00
	Belanja Hibah		26.324.698.267,00	46.518.717.775,00	15.991.717.775,00	15.868.717.775,00	15.868.717.775,00	15.868.717.775,00	25.868.717.775,00
	Belanja Bantuan Keuangan		1.249.044.744,11	1.399.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13
	Belanja Tidak Terduga			4.750.000.000,00	10.477.720.619,68	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
B	Belanja Langsung	0,1295	607.102.234.982,67	581.880.768.361,05	519.787.447.457,12	771.803.773.460.98	813.537.544.996.47	849.042.436.631.47	886.751.528.994.76
	Belanja Pegawai		77.870.257.607,49	84.838.977.227,31	95.547.361.925,80	95.547.361.925,80	95.547.361.925,80	95.547.361.925,80	95.547.361.925,80
	Belanja Barang dan Jasa		293.465.219.000,26	252.315.152.729,74	224.638.286.137,32	426.529.773.131,18	463.263.544.666,67	478.768.436.301.67	502.477.528.664.9 ₆
	Belanja Modal		191.918.311.085,62	244.726.638.404,00	199.601.799.394,00	249.726.638.404	254.726.638.404	274.726.638.404	288.726.638.404
C	Pembiayaan	0,2104	93.220.441.238,84	27.394.350.692,08	27.200.512.807,29	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
	Penerimaan Pembiayaan		83.596.912.617,92	15.551.155.329,55	33.700.512.807,29	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan		9.623.528.620,92	11.843.195.362,53	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00



3.3.1 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Kota Palangka Raya 2018-2023**

No.	Uraian	Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	1.168.570.607.391,61	1.150.489.132.400,58	1.255.292.487.213,69	1.316.340.228.237,69	1.378.069.968.273,69	1.439.799.708.309,69
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	10.000.000.000,00	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	5.551.155.329,55	33.700.512.807,29	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.184.121.762.721,16	1.184.189.645.207,70	1.260.292.487.213,69	1.321.340.228.237,69	1.383.069.968.273,69	1.444.799.708.309,69
	Dikurangi						
4	Belanja Tidak Langsung	590.397.798.997,58	657.902.197.750,75	668.749.195.621,37	684.619.981.448,92	700.887.536.922,17	727.561.781.282,25
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.843.195.362,53	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	581.880.768.361,05	651.402.197.750,75	585.043.291.592,32	630.220.246.788,77	675.682.431.351,52	710.737.927.027,45



Tabel 3.25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas Keuangan Daerah						
	Prioritas I (Wajib dan Mengikat)						
a.	Belanja Tidak Langsung	590.397.798.997,58	657.902.197.750,75	668.749.195.621,37	684.619.981.448,92	700.887.536.922,17	727.561.781.282,25
b.	Belanja Langsung	581.880.768.361,05	519.787.447.457,12	771.803.773.460,98	813.537.544.996,47	849.042.436.631,47	886.751.528.994,76
c.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.843.195.362,53	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

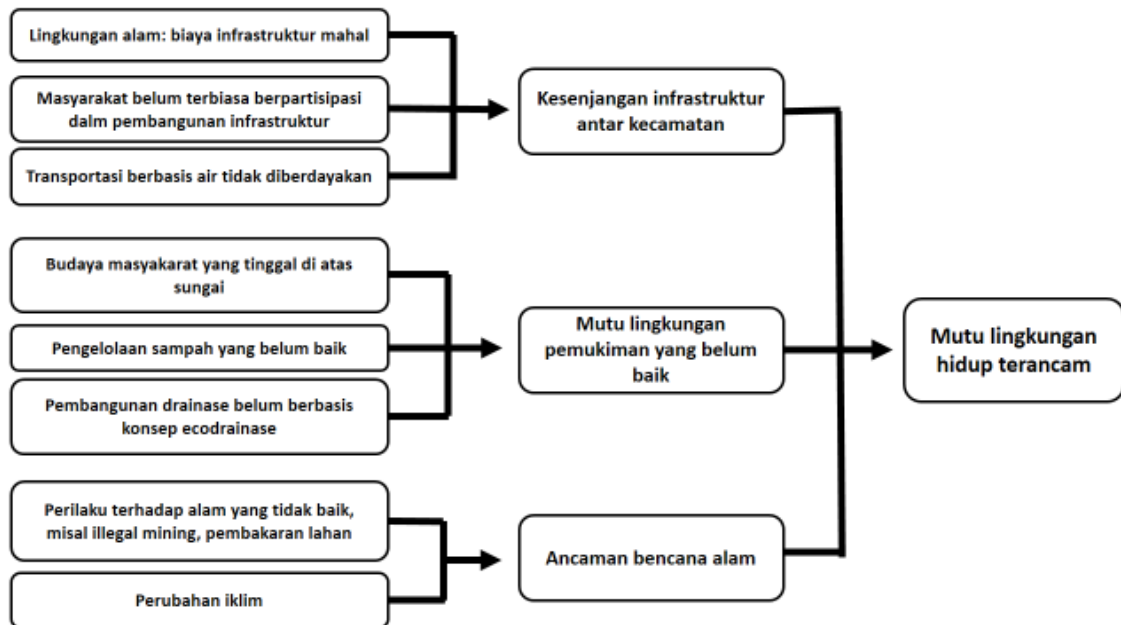
4.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Bagian ini menyajikan butir-butir penting isu strategis tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Bagian ini mendiskusikan 2 aspek penting yakni permasalahan dan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan daerah Kota Palangka Raya disajikan dalam 4 kelompok permasalahan yakni permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan ekonomi. Bagian selanjutnya mendiskusikan isu strategis eksternal baik itu nasional maupun internasional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kota Palangka Raya baik sebagai peluang maupun ancaman.

Infrastruktur dan lingkungan hidup dalam sebuah konsep pembangunan di satu sisi berfungsi sebagai input dan pada sisi lain merupakan output atau bahkan outcome dari proses pembangunan yang dijalankan. Proses pembangunan yang dilakukan secara lestari dan melibatkan seluruh masyarakat akan menghasilkan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan sehingga hasil akhir yang didapat adalah kesejahteraan dengan lingkungan yang tetap lestari.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kota Palangka Raya, saat ini dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup telah dijalankan sesuai kemampuan pemerintah daerah. Namun demikian dikarenakan rumitnya permasalahan di daerah membuat mutu lingkungan hidup terancam. Ancaman terhadap lingkungan hidup itu bersumber dari beberapa permasalahan sebagaimana disajikan dalam diagram 4.1 berikut ini:

Diagram 4.1 Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Kota Palangka Raya



Sumber: Analisis data yang disajikan pada Bab II

Isu dan permasalahan penting dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kota Palangka Raya adalah terancamnya kondisi lingkungan hidup. Sungai yang mendangkal dan keruh akibat dari sedimentasi yang dibawa dari hulu, banjir (genangan air) yang selalu terjadi pada musim hujan dan kebakaran lahan pada musim kemarau adalah beberapa indikasi dari semakin terancamnya kondisi lingkungan hidup di Kota Palangka Raya. Terancamnya kondisi lingkungan hidup ini teridentifikasi disebabkan oleh 3 kelompok besar permasalahan yakni ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar kecamatan, masih rendahnya kualitas lingkungan pemukiman dan ancaman dari bencana alam.

Ketika ketersediaan infrastruktur terbatas, maka penduduk yang membutuhkan sarana transportasi akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan transportasinya dengan mencari jalan tercepat. Sangat mungkin bahwa jalan cepat itu melalui lingkungan hutan atau rawa yang sesungguhnya adalah kawasan konservasi. Lingkungan pemukiman yang buruk mengancam lingkungan hidup dari berbagai sisi. Sampah yang munumpuk di berbagai sudut kota atau mengapung di kawasan yang berair, tidak hanya membuat pemandangan menjadi buruk, melainkan juga menjadi sumber dari pencemaran lingkungan hidup. Pembuangan limbah baik rumah tangga maupun industri yang dilakukan tanpa pengolahan, menimbulkan pencemaran. Demikian juga dengan genangan air yang terjadi di sudut-sudut pemukiman akan merusakkan fasilitas publik yang telah terbangun. Sementara bencana alam baik kebakaran di musim kemarau maupun banjir di musim hujan dan pencemaran terhadap lingkungan air, sangat jelas menciptakan turunnya kualitas lingkungan hidup.

Ketimpangan infrastruktur itu dapat dilihat dari bidang sarana dan prasarana transportasi, sistem transportasi darat di Kota Palangka Raya belum terintegrasi dengan baik. Permasalahan terkait peningkatan pelayanan angkutan umum juga menjadi isu yang harus segera ditangani untuk menghindari kemacetan di pusat-pusat kota. Hal tersebut kemudian berdampak pada terhambatnya penyediaan pelayanan publik, khususnya di wilayah seberang sungai, yaitu Kecamatan Rakumpit. Kondisi sarana prasarana komunikasi juga tidak cukup menjangkau banyak wilayah di Kota Palangka Raya. Di Kecamatan Rakumpit, tidak terdapat kantor pos maupun jaringan operator seluler dan telepon. Jaringan operator seluler hanya menjangkau Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, dan sebagian wilayah Bukit Batu.

Ketimpangan infrastruktur antar kecamatan jika ditelisik bersumber dari beberapa aspek:

1. Pertama, mahalnya biaya infrastruktur di Kota Palangka Raya. Sebagaimana wilayah Kalimantan lainnya, Palangka Raya adalah wilayah yang berbasis air. Pembangunan infrastruktur apapun di kawasan berbasis air tentu membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan pada wilayah berbasis tanah. Sementara pada sisi lain, kemampuan Negara untuk membiayai infrastruktur tentu terbatas. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan sesungguhnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan hal ini, masyarakat Kalimantan secara umum belum memiliki kebiasaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat masih menggantungkan kebutuhan infrastrukturnya pada pemerintah semata. Di pulau Jawa misalnya, masyarakat sudah terbiasa untuk membangun infrastruktur secara swadaya, artinya masyarakat memiliki ide untuk membangun infrastruktur dengan sedikit anggaran, kemudian pemerintah daerah menambahkan anggaran agar ide pembangunan infrastruktur itu terwujud. Kiranya sangat strategis untuk membangun kesadaran bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Ketiga, transportasi berbasis air. Sebagai daerah dengan basis air, Kota Palangka Raya sesungguhnya memiliki dasar untuk transportasi air, namun demikian transportasi berbasis air ini surut seiring dengan pembangunan infrastruktur yang difokuskan ke infrastruktur darat. Dermaga memang disediakan di sepanjang sungai, namun demikian tidak tersedia alat transportasinya. Sementara itu sesungguhnya sumber daya air kota Cantik ini sangat potensial bahkan untuk transportasi udara. Sungai yang sangat luas adalah potensi untuk pendaratan pesawat perintis amfibi.
2. Permasalahan dan isu strategis kedua adalah masih relatif kurang baiknya lingkungan kawasan pemukiman. Kondisi perumahan di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu juga kurang baik. Di wilayah tersebut, masyarakat belum memiliki hunian tetap yang layak. Rumah penduduk dengan kategori permanen dengan kondisi baik dan sedang hanya terdapat di pusat kota, yaitu di

Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi sarana prasarana penghubung antar kecamatan yang minim. Di beberapa wilayah *remote*, seperti Kecamatan Rakumpit hanya dapat ditempuh dengan perjalanan air dengan sarana transportasi yang sangat minim, sehingga jauh dari jangkauan pemerintah. Terdapat tiga penyebab utama yang menjadikan lingkungan pemukiman itu masih buruk. Pertama, budaya masyarakat tinggal di atas air (sungai). Sebagai wilayah berbasis air maka tinggal dan hidup di atas air adalah budaya yang telah ada sejak masyarakat ada. Air adalah basis kehidupan masyarakat, mereka mencari makan dari air, transportasi menggunakan air, segala langkah hidupnya bergantung pada air. Pada masyarakat yang belum berkembang dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, budaya ini tidak menimbulkan masalah. Namun demikian budaya ini menjadi bermasalah ketika penduduk semakin bertambah dan perekonomian berkembang. Bertambahnya penduduk membutuhkan area untuk hidup, ketika lingkungan air ini tidak dikelola secara baik, timbul kekumuhan karena pada lokasi yang sempit, tinggal penduduk dalam jumlah banyak. Masalah berikutnya yang mengikuti ketika perekonomian berkembang adalah limbah dari rumah tangga yang tinggal di atas air. Ketika perekonomian berkembang sampah yang dihasilkan berubah dari sampah organik yang larut di air menjadi sampah *unorganic* seperti plastik yang tidak dapat larut dalam air, demikian juga dengan limbah lainnya yang jumlahnya telah melebihi kapasitas lingkungan untuk menyerapnya. Akibatnya kawasan sungai menjadi semakin kumuh. Upaya untuk memindahkan mereka ke kawasan lain tidak selalu berhasil, karena pada dasarnya sumber hidup mereka ada di sekitar sungai, untuk itu maka yang seharusnya dipikirkan adalah membatasi pertambahan penduduk yang bermukim di atas air dan mengelola kawasan tersebut agar kawasan bantaran sungai aman dari bahaya baik bahaya teknis banjir maupun kekumuhan yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat. Kedua, pengelolaan sampah. Kota Palangka Raya telah memiliki manajemen untuk mengelola sampah kota, hasil dari manajemen sampah yang dilakukan juga telah terlihat dari relatif bersihnya sampah dari beberapa sudut kota yang ada, namun pada beberapa sudut kota masih ditemukan sampah berserakan dan depo sampah terlihat kumuh. Persoalan pengelolaan sampah ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat pun harus aktif berpartisipasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat kurang. Bank bank sampah yang dibentuk tidak seluruhnya aktif bekerja, masyarakat tidak patuh dalam jam pembuangan sampah adalah beberapa persoalan pengelolaan sampah dari sisi masyarakat. Pada sisi pemerintah, kurangnya upaya untuk mendekati dan mendidik masyarakat agar bertanggungjawab terhadap sampahnya dan pengelolaan teknis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah beberapa permasalahan yang dirasakan. Adalah sangat strategis bagi Kota Palangka Raya untuk belajar dan mengimplementasikan pola pengelolaan sampah yang tepat sesuai

dengan sosial budaya masyarakat kota. Pengelolaan sampah yang masih bermasalah tentu saja membawa masalah pada mutu lingkungan pemukiman. Ketiga, pembangunan drainase. Drainase adalah salah satu cara untuk mengelola air, agar saat musim hujan tidak banjir dan saat musim kemarau tidak kekeringan. Secara umum prinsip pembangunan drainase adalah mengalirkan air yang berlebih dari kota menuju pembuangan (sungai). Cara dan konsep ini tidak tepat untuk Kota Palangka Raya yang datar dan memang berbasis air. Untuk itu konsep pembangunan drainase harus didasarkan pada konsep *ecodrainase* yakni upaya mengelola air kelebihan dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Terdapat beberapa metode drainase ramah lingkungan ini diantaranya adalah metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode *river side polder*, dan metode pengembangan areal perlindungan air tanah (*ground water protection area*)

3. Permasalahan ketiga yang menyebabkan turunnya mutu lingkungan hidup di Kota Palangka Raya adalah ancaman dari bencana alam. Terdapat setidaknya tiga macam bencana yang selalu mengancam kota ini, yaitu banjir saat musim hujan, kebakaran saat musim kemarau dan ancaman degradasi lingkungan. Banjir dan kebakaran merupakan bencana yang disebabkan oleh iklim yang terjadi. Atas hal ini tentu masyarakat tidak dapat banyak melakukan upaya pengendalian kecuali melakukan adaptasi dan mitigasi. Pada konsep adaptasi ketika daerah memang berbasis air maka manusia harus beradaptasi untuk mengelola dan memanfaatkan air sesuai karakter air tersebut. Ketika manusia berusaha untuk menghilangkan air dari lingkungannya, maka ketika musim kemarau sudah pasti lingkungan menjadi kering dan akibatnya kebakaran menjadi ancaman. Ancaman ke dua yang lebih serius datang dari perilaku manusia dalam memanfaatkan alam. Sumber daya alam yang merupakan *common property* seringkali mengalami degradasi sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karakter dari *common property* adalah tidak ada hak kepemilikan. Menghadapi barang yang seperti ini maka manusia lebih senang berperilaku sebagai *free rider*. Praktek-praktek pertambangan ilegal yang terjadi di sepanjang aliran sungai, praktek penangkapan ikan yang tidak lestari (menggunakan bom atau racun), membuang sampah atau limbah ke sungai adalah beberapa praktek yang terjadi yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang nyata. Menjadi sangat strategis bagi kota ini untuk meningkatkan kepedulian semua pihak untuk beraktivitas dan membangun secara berkelanjutan.

Tabel 4.1 Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di Kota Palangka Raya Tahun 2007 – 2016

Tahun	Banjir	Kebakaran	Tanah Longsor	Angin Puyuh	Disambar Petir	Jumlah
2016	-	16	-	-	-	16
2015	2	124	-	5	-	131
2014	-	23	-	2	-	25
2013	1	21	-	2	-	24
2012	2	31	-	2	-	35
2011	1	13	8	-	-	22
2010	29	16	-	-	1	46
2009	-	42	-	4	-	46
2008	3	33	-	-	-	36
2007	12	15	-	2	-	29

Sumber: BPS. Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2017

4. Banjir yang kerap terjadi di Kota Palangka Raya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti (1) Meluapnya arus Sungai Kahayan dan Sungai Sabangau; (2) Kondisi topografi Kota Palangka Raya yang relatif datar; (3) Jaringan drainase yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan konsep penanganan banjir. Meskipun banjir menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan, namun pembangunan jaringan drainase belum cukup menjadi perhatian. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Palangka Raya belum memiliki kajian dan *masterplan* sistem drainase serta *database* pendukung di bidang pengairan sebagai bahan mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir; (4) Belum terdapat upaya pengelolaan kelebihan air, seperti membuat kolam retensi, biopori, maupun sumur- sumur resapan. Adapun bencana kebakaran di Kota Palangka Raya biasanya terjadi di kawasan perkotaan dan kawasan hutan.

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan, isu strategis dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

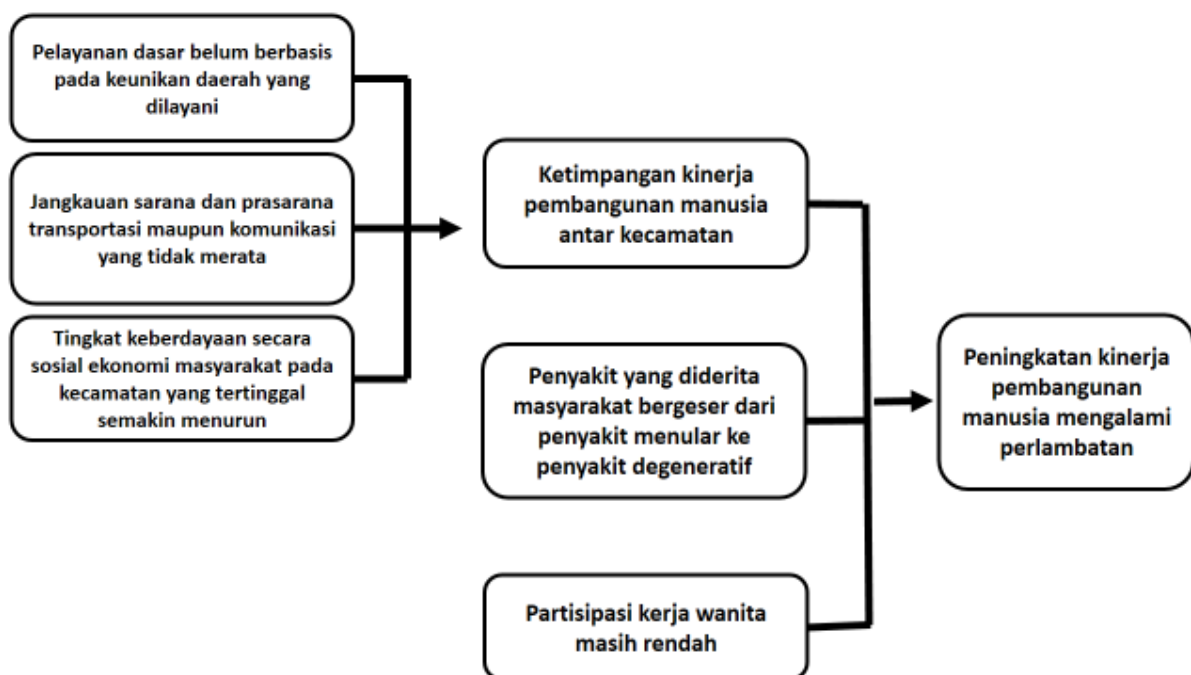
- Menciptakan pemerataan infrastruktur di setiap kecamatan. Infrastruktur yang dibangun harus disesuaikan dengan kondisi kecamatan yang bersangkutan. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi isu penting, selain untuk menumbuhkan infrastruktur baru juga agar masyarakat ikut menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun.
- Menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat. Pelibatan masyarakat dalam upaya pemerintah kota dalam pengelolaan lingkungan sangatlah penting. Pembangunan lingkungan pemukiman hanya dapat dilakukan secara berkelanjutan jika terjadi pelibatan masyarakat. Konsep pembangunan drainase yang ramah lingkungan harus sudah mulai dilakukan.

- c) Membangun kepedulian berbagai pihak untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada untuk menghindari terjadinya bencana yang berkepanjangan. Konsep pembangunan yang disesuaikan dengan basis kondisi alam sangat diperlukan, sebab setiap daerah memiliki keunikan sumber dayanya.
- d) Tidak kalah penting, pemerintah daerah melanjutkan proses pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya di Kota Palangka Raya. Jika tidak dilanjutkan maka seluruh biaya yang telah dimasukkan akan hilang dan menjadi sebuah kesia-siaan.

4.1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara umum pencapaian kinerja pembangunan manusia Kota Palangka Raya jauh lebih baik dari yang dicapai oleh Kalimantan Tengah maupun Nasional. Namun demikian dari analisis yang dilakukan terdapat permasalahan dalam perkembangannya. Capaian kinerja yang telah cukup tinggi itu mengalami perkembangan yang melambat. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang lambat, peningkatan rata rata lama sekolah, juga lambatnya peningkatan angka harapan hidup adalah indikasi dari lambatnya perkembangan pembangunan sumber daya manusia itu. Dari analisis yang dilakukan dapat diidentifikasi beberapa penyebab dari lambatnya pertumbuhan kinerja kesejahteraan yang terjadi. Diagram 4.1.21 menyajikan resume permasalahan pembangunan manusia di kota Palangka Raya.

Diagram 4.2 Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Palangka Raya



Sumber: Analisis data yang disajikan dalam Bab II

Capaian kinerja yang lambat itu disebabkan oleh karena tidak meratanya capaian kinerja pembangunan manusia antar kecamatan dan bergesernya jenis penyakit masyarakat dari penyakit menular ke penyakit degenerative, serta masih rendahnya partisipasi kerja wanita. Kecamatan Pahandut yang merupakan wilayah pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja pembangunan manusia yang sangat tinggi, sebaliknya kecamatan Rakumpit yang memiliki penduduk paling sedikit kinerja pembangunanya justru paling buruk. Ketika pembangunan tidak merata, maka kondisi daerah yang sangat buruk akan menarik angka rata rata kearah yang rendah. Itulah sebabnya ketika Rakumpit memiliki kinerja yang sangat buruk dan tidak mampu diimbangi oleh daerah lain maka secara keseluruhan rata-rata kinerjanya akan tertekan.

Buruknya kinerja pembangunan manusia di wilayah Rakumpit teridentifikasi disebabkan oleh beberapa faktor yakni proses pelayanan dasar, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan aspek sosial masyarakat. Daerah yang unik seharusnya juga diperlakukan secara unik sesuai dengan karakter daerahnya. Selama ini proses pembangunan di Indonesia kurang memperhatikan aspek yang unik dari daerah, pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Sebagai contoh jika menggunakan konsep rasio penduduk per penyedia layanan (perawat atau guru) maka wilayah Rakumpit memiliki rasio yang paling bagus, tetapi rasio menjadi tanpa arti ketika penduduk yang dilayani tersebar dan jauh dari jangkauan. Dampak yang lain keberadaan tenaga pelayanan justru tidak efisien. Dalam kasus kesehatan tercatat daya guna petugas pelayanan kesehatan di Pahandut mencapai angka 1.14, sangat tinggi dibandingkan angka yang dicapai Rakumpit yang hanya 0.30 (Dinas Kesehatan, 2016). Anggaran per puskesmas yang lebih tinggi juga tidak akan efektif melayani kesehatan penduduk ketika penduduk yang dilayani tersebar dan tidak terjangkau layanan puskesmas. Untuk itu yang sangat dibutuhkan adalah terobosan untuk mencari metode alternatif pelayanan kesehatan maupun pendidikan dan layanan dasar yang lain agar efektif menjangkau seluruh penduduk.

Penyebab lain dari tidak meratanya pembangunan sumber daya manusia antar kecamatan adalah ketidak merataan ketersediaan infrastruktur. Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, infrastruktur dasar di daerah Rakumpit sangatlah terbatas. Keterbatasan infrastruktur itu tidak hanya dalam hal jalan, jembatan dan sarana komunikasi, melainkan juga sarana pendidikan dan kesehatan. Jika dilihat dari rasionya ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan telah mencukupi, namun demikian dilihat dari jangkauannya sangatlah terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar membuat seluruh pelayanan yang dibutuhkan juga terbatas, itulah sebabnya maka kinerja yang dicapai Rakumpit pun menjadi rendah.

Pada sisi masyarakat juga terdapat situasi yang menyebabkan capaian kinerja wilayah yang tertinggal ini semakin tertinggal. Secara budaya setiap masyarakat memiliki kearifan lokal untuk bekerjasama membangun kesejahteraan. Namun demikian kearifan ini luntur seiring dengan masuknya pengaruh dari luar. Materialisme yang masuk melalui mekanisme pasar, proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek telah merusak rasa percaya diri masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, sehingga terkesan bahwa masyarakat sangat tidak berdaya. Dengan demikian yang terlihat adalah masyarakat yang tingkat kesadarannya untuk hidup bersih dan sehat masih belum optimal. Hal ini berdampak terhadap berkembangnya penyakit menular yang terkait sanitasi lingkungan (DBD, Diare, TB Paru, dll). Pada sisi lain, masyarakat yang semakin sejahtera juga belum mampu menerapkan pola hidup sehat, sehingga berdampak semakin meningkatnya kasus penyakit degeneratif (Hypertensi, Diabetes Melitus, Jantung, dll). Penyakit penyakit tersebut tentunya berkontribusi untuk menekan capaian Angka Harapan Hidup.

Aspek kedua yang menyebabkan lambatnya perkembangan kinerja pembangunan manusia adalah bergesernya jenis penyakit yang diderita masyarakat dari penyakit menular menjadi penyakit degenerative. Penyakit degenerative merupakan penyakit yang membawa penyebab kematian yang cukup tinggi. Selain itu kinerja Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang fluktuatif juga menjadi penyebab tertekannya angka harapan hidup yang pada gilirannya menekan angka IPM.

Tingkat partisipasi kerja wanita yang rendah disatu sisi disebabkan oleh karena budaya patriarkhi yang menempatkan wanita pada ruang kerja yang tidak melewati pasar. Jadi rendahnya partisipasi kerja wanita itu bukan dikarenakan pendidikannya yang rendah. Ketika wanita bekerja dalam ruang yang tidak bersentuhan dengan pasar, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu keluarganya secara ekonomi. Rendahnya kemampuan wanita ini berdampak pada kemampuan seluruh keluarga untuk memenuhi daya belinya. Sebagaimana diketahui daya beli merupakan salah satu komponen dari IPM.

Analisis atas permasalahan yang telah diuraikan membawa pada isu strategis internal kota Palangka Raya yang harus diselesaikan untuk tahun tahun mendatang. Isu isu itu dapat dielaborasi sebagai berikut:

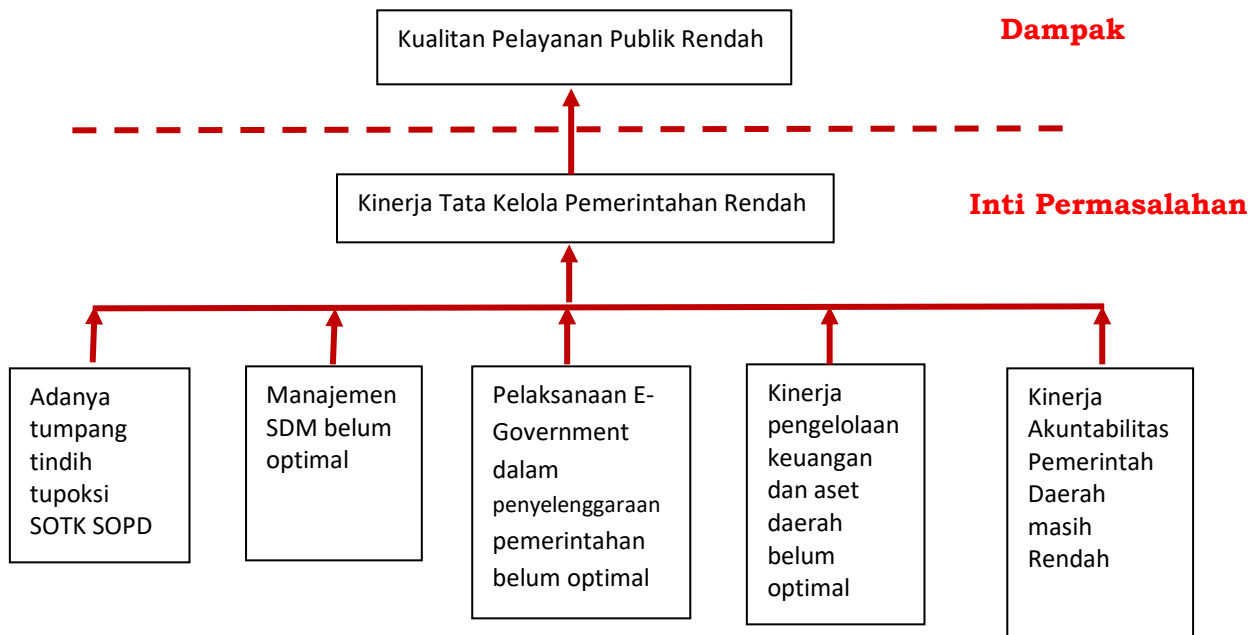
1. Kinerja pembangunan Sumber daya manusia yang dicapai kota Palangka Raya memang telah mencapai angka yang tinggi, namun demikian tingkat perkembangannya terus melambat. Artinya ditahun tahun mendatang, kota ini harus terus berjuang keras untuk mempertahankan dan meningkatkan angka IPM.
2. IPM yang cenderung tidak beranjak salah satunya berasal dari kinerja pendidikan yang juga mengalami permasalahan, terutama berkaitan dengan terjadinya ketidak merataan kinerja pendidikan antar kecamatan. Program yang dibuat seragam antar kecamatan membuat kinerja kecamatan yang cukup terpencil menjadi sangat lambat. Kiranya perlu kembali dipertimbangkan program program yang lebih spesifik

- untuk kecamatan terpencil agar pelayanan tetap dapat diberikan dan kinerja outcome dapat dicapai.
3. Sejalan dengan kinerja IPM maka kinerja kesehatan terlihat cenderung mengalami perlambatan. Perlambatan ini antara lain disebabkan oleh bergesernya jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat. Sejalan dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, penyakit yang diderita masyarakatpun bergeser dari penyakit menular menjadi penyakit degenerative. Menjadi sangat strategis bagi kota ini untuk mulai memperhatikan upaya preventif pengelolaan kesehatan selain upaya upaya yang telah dilakukan.
 4. Tingkat pengangguran terbuka cenderung fluktuatif. Fluktuasi ini menerminkan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang. Salah satu sumber ketidak seimbangan itu adalah kualitas tenaga kerja yang tidak mampu memenuhi permintaan dunia kerja. Disamping itu menurunnya kinerja sektor pertanian juga menjadi penyebab penting bagi terjadinya pengangguran. Untuk itu dim masa mendatang yang dibutuhkan adalah meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja selain terus meningkatkan kinerja sektor pertanian yang sesungguhnya merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi.
 5. Kinerja penanggulangan kemiskinan masih ditandai dengan fluktuatifnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Fluktuatifnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan menjadi salah satu indikasi dari kurang efektifnya program program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu maka diperlukan evaluasi yang serius terhadap program program penanggulangan kemiskinan tersebut.

4.1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan uraian pada gambaran kinerja tata kelola pemerintahan dalam Bab II, terlihat bahwa tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari indeks reformasi birokrasi yang masih rendah dengan nilai D dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang masih pada posisi C. Walaupun tahun 2016 Kota Palangka Raya telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari badan pemeriksa keuangan, namun masih ada beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Tingkat kemandirian daerah sangat rendah dan tingkat ketergantungan pembiayaan pusat sangat tinggi mencapai 99.75%. Implikasi dari kinerja tata kelola pemerintahan diatas adalah rendahnya kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya. Bahkan Ombudsman pada tahun 2015 menyatakan bahwa Kota Palangka Raya merupakan daerah zona merah bagi pelayanan publik dan memiliki jumlah aduan tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya terangkum pada bagan berikut ini.

Diagram 4.3 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Palangka Raya



Sumber: Analisis data yang disajikan dalam Bab II

Kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien, efektif dan akuntabel dapat terwujud apabila didukung dengan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik. Ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya masih rendah.

Pertama, adanya tumpang tindih tugas dan pokok fungsi struktural organisasi dan tata kerja (SOTK) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi tumpang tindih tugas dan pokok dan fungsi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman terkait urusan tata ruang. Begitu pula Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait pengelolaan sampah. Kondisi ini menyebabkan beberapa pekerjaan pelayanan publik tidak berjalan dengan lancar. Dokumen RTRW sebagai acuan untuk penataan ruang hingga kini juga belum jadi. Pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya juga belum berjalan dengan baik. Struktur Kelembagaan merupakan kendaraan bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu arsitektur kelembagaan harus sesuai dengan arsitektur kinerja pembangunan. Apabila penataan struktural organisasi dan tata kerja masih banyak permasalahan, maka akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Keluarnya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 11 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya belum dapat memberikan bentuk struktur kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*). *Right-Size* bukan berarti perampingan maupun pemekaran namun sesuai dengan yang dibutuhkan. Struktur organisasi yang ada sekarang banyak tumpang tindih fungsi, sehingga kinerja pemerintah menjadi terhambat.



Kedua, Manajemen Sumber Daya Manusia di Kota Palangka Raya belum optimal. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sebagai penyokong utama penyelenggaraan Pemerintahan harus dikelola dengan baik. Secara kuantitas jumlah apartur sipil negara yang ada sekarang masih kurang untuk mengatasi iklim dan beban kerja yang cukup padat di Pemerintah Kota Palangka Raya. Adanya tambahan tenaga kontrak sebesar 24% dari total pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah cukup untuk membantu menyelesaikan beban kerja yang ada. Namun secara kualitas masih harus perlu dikembangkan. Pemerintah Kota Palangka Raya belum banyak memiliki tenaga jabatan fungsional tertentu. Padahal dalam ranah pelayanan publik jabatan fungsional tertentu ini sangat diperlukan seperti penilai barang, pranata komputer, fungsional perencanaan, pustakawan, arsiparis, peneliti dan tenaga fungsional tertentu lainnya. Disamping itu penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki juga masih terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal ini akan mengakibatkan banyak pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya SDM yang ditempatkan di kantor kecamatan seharusnya yang memiliki kompetensi untuk melayani publik secara baik bukan SDM yang sudah mau pensiun atau tidak memiliki kompetensi apapun. Karena kecamatan merupakan lini terdepan dalam memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Begitu pula terlalu cepatnya rotasi pegawai atau mutasi akan mempengaruhi proses penyesuaian pekerjaan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja tata kelola pemerintahan. Sementara itu berdasarkan laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016, pegawai ASN yang diassesment baru mencapai 184 orang atau sekitar 74% dari target. Padahal assesment pegawai ASN itu merupakan hal yang sangat penting dalam penataan SDM untuk melihat kompetensi masing-masing ASN. Sehingga penempatan ASN akan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Ketiga, pelaksanaan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemerintah kota palangka raya telah banyak menerapkan aplikasi *e-government*. Namun masing-masing aplikasi tersebut masih berdiri sendiri belum terintegrasi menjadi satu. Sehingga SOPD masih menginput data di masing-masing aplikasi tersebut. Bahkan ada beberapa aplikasi yang telah ketinggalan artinya tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Hal ini dikarenakan pembangunan aplikasi diserahkan oleh pihak luar sepenuhnya, sehingga kesulitan jika akan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Palangka raya diantaranya keterbatasan sumber daya di bidang layanan teknologi informasi dan minimnya infrastruktur. Bahkan di daerah terpencil seperti kecamatan rakumpit, listrik baru masuk tahun 2017 apalagi jaringan telekomunikasi belum ada, sehingga masih kesulitan untuk melaksanakan berbagai aplikasi *e-government* yang telah ada. Di sisi lain, berbagai aplikasi yang ada masih dalam ranah perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Ranah pelayanan publik baru pada perijinan dan pengadaan barang dan jasa. Itu

pun belum semua SKPD terintegrasi. Bahkan untuk proses perizinan online belum satu pintu. Karena tidak semua perizinan ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan untuk pelayanan publik lainnya belum ada. Di samping itu belum ada sistem yang dapat digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam e-government ini. Website dan media center yang ada hanya menyediakan informasi kegiatan pemerintah daerah dan dokumen formal lainnya, namun tidak ada domain yang dapat digunakan masyarakat untuk memberikan aspirasinya.

Keempat, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal. Berdasarkan hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah terlihat bahwa kinerja pendapatan masih rendah. Tingkat ketergantungan pembiayaan pusat masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena penggalan PAD khususnya pajak belum optimal. Banyak potensi Pajak dan retribusi yang belum tergali dikarenakan keterbatasan sumber daya. Begitu pula yang terjadi pada manajemen aset daerah, masih banyak kendala yang dihadapi dalam inventarisasi aset. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya yang ada. Kota Palangka Raya belum memiliki sumber daya yang berkompeten dalam bidang penilai barang. Apabila potensi PAD dapat ditingkatkan khususnya dari pajak dan retribusi akan dapat menciptakan struktur keuangan APBD Kota Palangka Raya yang lebih kuat, sehingga dapat mendorong kinerja tata kelola pemerintahan yang lebih baik terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Kelima, kinerja akuntabilitas pemerintah masih rendah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penyusunan indikator kinerja masih banyak yang berdimensi output. Disamping itu belum ada ukuran kinerja yang jelas di masing-masing bagian, sehingga tidak dapat melihat capaian kerjanya. Sementara itu, dalam proses perencanaan masih ada beberapa dokumen yang belum konsisten. Misalnya dokumen RPJMD dengan Renstra SOPD dan sebagainya. Disisi lain, belum banyak OPD yang melakukan evaluasi berkala terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan hanya terhadap serapan anggaran namun bukan pada capaian kerjanya. Dari segi tatalaksana, belum banyak OPD yang memiliki standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan fungsinya. Bahkan instansi yang telah memiliki SOP juga belum menjalankan sesuai dengan SOP tersebut. Hal ini mengakibatkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien.

Dari analisis permasalahan diatas, isu strategis yang dihadapi Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kinerja tata kelola pemerintahan yang masih rendah. Isu ini dapat diperinci dalam beberapa isu strategis yaitu:

1. Adanya tumpang tindih tupoksi SOTK OPD
2. Manajemen SDM Belum Optimal
3. Pelaksanaan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal
4. Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belum Optimal
5. Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Masih Rendah



4.1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Ekonomi

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh kota Palangka Raya adalah kesenjangan antar golongan yang semakin meningkat (lihat angka Gini Indeks). Kesenjangan terjadi antara sektor pertanian dan sektor lainnya. Data pada tabel 4.2 mengkonfirmasi tingkat kesenjangan antar sektor tersebut. Sektor sektor industri pengolahan, transportasi pergudangan dan komunikasi serta sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang memiliki tingkat kesejahteraan paling tinggi, diikuti oleh sektor listrik gas dan air. Sementara sektor yang paling terpuruk adalah sektor pertanian dengan pendapatan per capita yang paling rendah. Penduduk yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian memang hanya sekitar 10%, namun pendapatan mereka hanya sekitar 1/12 dari pendapatan tertinggi yakni sektor industri pengolahan.

Tabel 4.2 Pendapatan Per Kapita antar Sektor dalam Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2016

Sektor	PDRB (Rp juta)	Penduduk yang bekerja (orang)	Pendapatan per capita per tahun (Rp)	Tingkat Pendapatan
Pertanian	320,293.00	11,614	27,578,181.00	Paling rendah
Pertambangan dan penggalian	139,681.10	1,085	128,738,341.00	Sangat tinggi
Industri pengolahan	1,254,233.40	3,614	347,048,533.00	Paling tinggi
Listrik, gas dan air bersih	53,018.70	543	97,640,331.00	Lebih tinggi dari rata rata
Konstruksi	1,222,185.70	15,374	79,496,923.00	Lebih rendah dari rata rata
Perdagangan, hotel dan restoran	2,426,759.40	34,922	69,490,848.00	Lebih rendah dari rata rata
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	1.106.663,10	4,269	259,232,466.00	Sangat tinggi
Keuangan perbankan dan jasa perusahaan	346,830.00	5,277	65,728,843.00	Lebih rendah dari rata rata
Jasa jasa	3,074,736.00	42,891	71,687,207.00	Lebih rendah dari rata rata
PDRB	11,289,343.50	119,589	94,401,186.00	Rata rata

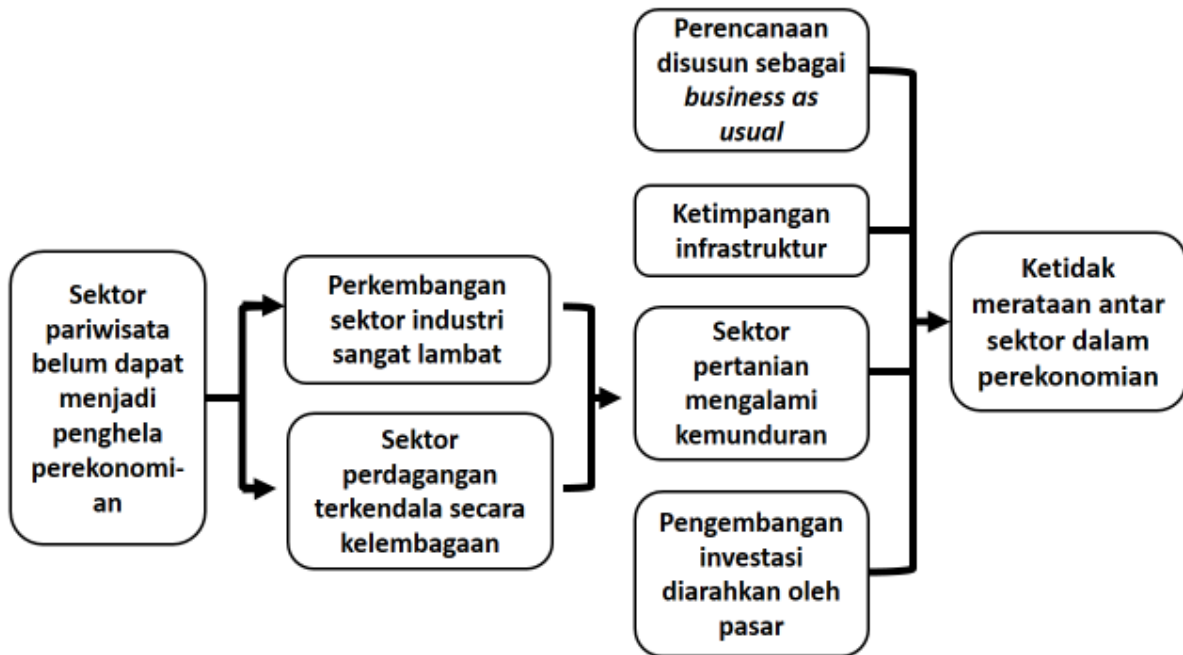
Sumber: Kota Palangka Raya dalam Angka, 2017

Dilihat dari penduduk yang bekerja maupun pangsa dalam pembentukan PDRB, sampai dengan tahun 2016, perekonomian Kota Palangka Raya masih banyak bertumpu pada pengeluaran pemerintah. Pangsa jasa-jasa lainnya yang terdiri dari jasa administrasi pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan, yang menjadi rumah bagi sektor pemerintahan mencapai angka lebih dari 30%. Angka ini dikonfirmasi oleh angka PDRB berdasar pengeluaran yang menyatakan bahwa hingga tahun 2016 pengeluaran pemerintah daerah masih menduduki angka 37.22% (PDRB Pengeluaran, 2017). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang rata-rata mencapai angka 8% sampai 10% saja. Namun demikian tingkat pertumbuhan pangsa pengeluaran pemerintah ini dari tahun ke tahun terus berkurang. Berdasar data BPS pula diperoleh informasi bahwa pertumbuhan sektor pemerintahan ini di tahun 2012 mencapai angka 13.23%, turun menjadi 9.05% di tahun 2015 dan pada tahun 2016 bahkan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3.73. Artinya peran pemerintah di Kota Palangka Raya semakin berkurang digantikan oleh peran swasta, sebuah kecenderungan yang membaik.

Sektor kedua yang menjadi tulang punggung perekonomian kota Palangka Raya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sebagai sebuah kota yang terletak pada persimpangan kabupaten dan kota lain, maka tidak mengherankan jika kota ini menjadi kota perdagangan dan jasa. Sementara tingginya peran sektor konstruksi menunjukkan pembangunan yang terus terjadi dan berlangsung di kota ini. Pada sektor industri pengolahan yang memiliki peran cukup tinggi tetapi penduduk yang terlibat di dalamnya relatif sedikit, dengan pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Lambatnya pertumbuhan sektor industri dapat menjadi indikasi kurang berkelanjutannya perekonomian kota ini pada masa yang akan datang. Sektor industri bagi sebuah wilayah secara umum adalah sektor penarik bagi sektor pertanian dan juga pendorong bagi sektor perdagangan dan jasa. Maka ketika sektor industri tumbuh melambat terancam pula sektor pertanian dan jasanya, kecuali bagi wilayah yang memang hanya memiliki potensi perdagangan.

Ketika sektor pertanian terpuruk, berhadapan dengan sektor industri, jasa dan perdagangan yang cukup baik, secara implisit data ini juga mengirimkan pesan terjadinya kesenjangan antar wilayah, yakni antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Sektor pertanian pada umumnya adalah sektor yang tumbuh di pedesaan dan sektor industri maupun perdagangan adalah sektor yang tumbuh di perkotaan. Itulah sebabnya ketika terjadi kesenjangan antara sektor pertanian dan sektor lainnya, maka itu artinya terjadi kesenjangan pula antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Kesenjangan antar sektor dan antar wilayah yang cukup tinggi itu bersumber dari persoalan-persoalan yang saling terkait sebagaimana digambarkan oleh diagram 4.4 berikut:

Diagram 4.4 Analisis Permasalahan Ekonomi Makro Kota Palangka Raya



Sumber: Analisis data yang disajikan dalam Bab II

Sektor pertanian memang bukan sektor yang dominan di Kota Palangka Raya, namun sektor ini masih menghidupi sekitar 10% penduduk, terutama yang hidup di wilayah pedesaan. Namun demikian sektor pertanian yang bersumber dari tanaman sayur-sayuran, buah, perkebunan, peternakan dan perikanan itu terus mengalami kemerosotan.

Sektor industri yang mestinya menjadi penarik bagi sektor pertanian, mengalami kemunduran, terutama industri yang mengolah produk produk pertanian. Sektor perdagangan, kurang memiliki keterkaitan dengan pertanian maupun industri yang berkembang. Perdagangan kota ini didominasi oleh perdagangan antar daerah, namun produk produk lokal kurang mendapatkan tempat dalam perdagangan tersebut.

Pertumbuhan sebuah sektor ekonomi, sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, terutama transportasi. Mosher (1991)¹ seorang ahli ekonomi pertanian menyatakan bahwa jika ingin mengembangkan pertanian maka yang harus dibangun adalah jalan, jalan dan jalan, baru berikutnya infrastruktur lainnya. Pertanian yang berbasis subsisten, akan terdorong untuk menciptakan surplus dan dijual ke pasar jika tersedia jalan. Munculnya produk yang dijual ke pasar bermakna munculnya nilai tambah yang itu bermakna pula peningkatan kesejahteraan.

Terkait dengan pengembangan pertanian di Kota Palangka Raya, wilayah pertanian dan pedesaan secara umum memiliki jaringan transportasi yang masih sangat terbatas. Keterbatasan itulah yang menjadi sebab dari tidak berkembangnya pertanian sehingga berdampak pada kesejangan yang terjadi. Elaborasi ketersediaan infrastruktur disajikan pada bagian lain dari naskah ini (Bab V. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup).

¹ A.T. Mosher, 1991, Menggerakkan dan Membangun Pertanian, C.V. Yasaguna, Jakarta

Penyebab lain dari tertinggalnya sektor pertanian adalah ketidaktepatan tanaman yang dikembangkan. Pemerintah daerah setiap saat diberikan target oleh pemerintah pusat sesuai dengan prioritas pemerintah pusat tetapi sesungguhnya target tersebut tidak sesuai dengan kondisi daerah. Sesuai dengan prioritas pemerintah Pusat, Kota Palangka Raya dan daerah lain di Indonesia ditarget untuk menghasilkan tanaman padi, jagung juga kedelai, namun demikian sesungguhnya lahan di kota ini memang tidak cocok untuk tanaman tersebut. Tetapi karena ditarget oleh pemerintah yang lebih tinggi, maka pemerintah kota berusaha untuk menyediakan lahan, yang bermakna mengeluarkan anggaran. Tetapi karena lahan tidak cocok semua upaya itu hanya menghasilkan ke sia-siaan. Akibatnya upaya untuk mengembangkan komoditas lain yang sesungguhnya cocok untuk kota Palangka Raya menjadi sangat berkurang. Maka jelas bahwa sektor pertanian di kota ini lebih banyak berkembang dan hidup sendiri melawan pasar yang memiliki sifat dan nafasnya sendiri. Pasar tidak akan menolong mereka yang tidak mampu, akhirnya jika sektor pertanian semakin terpuruk, adalah hal yang sangat mudah dihubungkan.

Aspek lain dari penyebab ketimpangan itu adalah bahwa perencanaan dan implementasi dari program dan kegiatan pemerintah dijalankan menggunakan prinsip “*business as usual*”. Perencanaan makro telah disusun dengan baik, namun demikian perencanaan ini tidak turun ke dalam perencanaan sektoral. Sebagai contoh teridentifikasi permasalahan pembangunan sub sektor perikanan tangkap adalah *illegal fishing* juga *illegal mining* yang mencemari perairan tetapi program yang diluncurkan oleh Dinas, tetap saja program penebaran bibit ke perairan umum. Program ini tidak keliru, namun tidak menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi.

Akibat dari ketimpangan kesejahteraan ini maka timpang pula aspek pendidikan dan kesehatan untuk penduduk. Disamping itu rendahnya kinerja sektor pertanian juga berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dan sektor pertanian. Ketika tingkat pendidikan masih lemah dengan kesehatan yang juga lemah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dampak selanjutnya adalah bahwa aspek sosial maupun budaya tidak berkembang. Kemiskinan dan pendidikan yang buruk ditambah dengan terus bertambahnya jumlah penduduk juga akan mengancam lingkungan hidup.

Analisis lengkap yang telah dilakukan terhadap kinerja dan permasalahan serta isu strategis yang muncul membawa pada rangkaian isu strategis bidang ekonomi yang harus segera dipecahkan. Rangkaian isu strategis ini bukan isu yang berdiri sendiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari isu-isu yang lain dan saling terkait. Isu besar dalam pembangunan ekonomi kota Palangka Raya bukan lagi terletak pada pertumbuhan yang lambat, namun pada isu pemerataan pembangunan ekonomi baik antar sektor maupun antar wilayah.

Terkait dengan berbagai permasalahan dan isu yang melingkupi bidang ekonomi kota Palangka Raya, dalam perencanaan ke depan isu-isu berikut menjadi sangat strategis untuk dipecahkan:

1. Sektor pertanian yang berpusat di wilayah pedesaan terus mengalami kemerosotan. Untuk itu maka pengembangan sektor pertanian yang tepat sesuai dengan kapasitas lokal sangatlah diperlukan. Sektor ini selain sumber kehidupan sebagian penduduk, juga merupakan sumber pangan bagi semua penduduk.
2. Sektor perikanan yang dapat menjadi pemicu pembangunan sektor primer terhadap oleh persoalan turunnya kualitas lingkungan perairan. Sebagai daerah berbasis air, sangat strategis ketika kota ini mengembangkan perikanan darat. Tumbuh dan berkembangnya perikanan akan mampu menjadi pemicu berkembangnya sektor sektor lainnya, misalnya industri pengolah produk pertanian juga pariwisata berbasis air.
3. Sektor industri mengalami penurunan. Sektor perdagangan yang berkinerja baik menghadapi persoalan dalam mengembangkan pasar dunia. Pengembangan industri pengolahan berbasis produk lokal adalah pilihan yang tepat. Industri obat obatan, industri pengolah produk perikanan juga industri berbasis kayu adalah industri yang potensi permintaannya tidak akan pernah habis. Perkembangan industri ini harus didukung oleh kemampuan sektor perdagangan untuk menembus pasar dunia yang dapat menjadi pembuka permintaan yang tidak terbatas.
4. Sektor pariwisata belum mampu menjadi penghela pertumbuhan bagi sektor lainnya. Pengembangan pariwisata berbasis alam yang dikemas dalam balutan teknologi, tanpa meninggalkan budaya lokal adalah pilihan yang dapat diambil. Mengembangkan pariwisata memerlukan energi yang sangat besar, untuk itu maka fokus pada beberapa destinasi penting adalah pilihan cerdas agar energi tidak terbuang sia sia.
5. Untuk mendukung pengembangan sektor sektor riil tersebut, maka investasi diarahkan pada sektor sektor riil yang dibutuhkan. Untuk itu maka perencanaan investasi sangatlah strategis. Untuk menarik investasi maka upaya untuk menurunkan ICOR sangat diperlukan.
6. Kemampuan keuangan daerah masih rendah akibat dari pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal. Ke depan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, terutama untuk sumber penerimaan pajak dan retribusi harus mendapatkan prioritas utama.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

a. Isu Nasional

1) Pemindahan Ibukota

Isu pemberitaan pemindahan ibukota pemerintahan ke kawasan Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir ini telah membawa kota ini semakin dikenal luas secara regional, nasional, hingga Asia dan global. Kota Palangka Raya yang memiliki luas 2.853,52 Km² atau 285.351,28 Ha dengan wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 119,41 Km², Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah 641,47 Km², Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 Km², Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 603,16 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan dengan luas wilayah 1.101,95 Km² dengan total jumlah penduduk 267.757 jiwa (tahun 2016) telah berkembang menjadi kota yang cukup ramai dan tumbuh pusat-pusat pemukiman dan infrastruktur yang berkembang dengan pesat terutama di dua Kecamatan yaitu Pahandut dan Jekan Raya untuk memenuhi kebutuhan warga dan masyarakat yang berkunjung daerah ini.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada 2016 sebanyak 267.757 orang yang terdiri dari 125.000 jiwa (51,12 persen) laki-laki dan 119.500 jiwa (48,88 persen) perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 91 orang tiap Km². Sebaran penduduk Kota Palangka Raya tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya berjumlah masing-masing 93.894 jiwa (786,32/km² dan 139.312 jiwa (359,49 jiwa/km²) dan sisanya tersebar di Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit berjumlah masing-masing 17.398 jiwa atau 27,12 jiwa/km², 13.74 jiwa (22,79 jiwa/km²) dan 3.404 jiwa (3,09 jiwa/km²).

Posisi strategis kota ini tidak terlepas dari posisinya sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kemajuan kota akan akan menjadi barometer bagi kemajuan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Namun demikian, seiring dengan pesatnya pembangunan kota, disaat yang sama terus muncul berbagai persoalan yang menghambat perkembangan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Persoalan itu mulai dari terbatas anggaran pembangunan, lahan dan pembangunan perkantoran, dan persoalan-persoalan kota pada umumnya seperti pelayanan publik, tata ruang kota, pemukiman, persampahan, serta persoalan-persoalan sektoral lainnya seperti ekonomi kota, lingkungan hidup, kependudukan, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,

pendidikan, jalan lingkungan, perlindungan sosial, persoalan keamanan dan ketertiban, persoalan penataan kota, dan masalah urban.

Secara nasional Kota Palangka Raya telah ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Rencana pembangunan rel kereta api dari Palangka Raya – Banjarmasin – Batulicin telah dibuat kajian Kementerian Perhubungan.

2) Trend menuju Kota Cerdas

Perkembangan kota di masa kini dan masa depan telah mengalami perubahan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara perubahan itu adalah pembangunan kota harus menjadi kota cerdas (*smart city*).

Konsep *smart city* bukanlah sekedar kota dengan kecanggihan informasi teknologi namun lebih kepada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kota tersebut. Jadi, konsep kota cerdas adalah untuk mempercepat layanan publik serta meningkatkan produktivitas agar kota bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi cerdas (*smart economy*).

Kota cerdas diupayakan agar kota menjadi kota yang berkelanjutan dalam hal ekonomi yang cerdas (*smart economy*), sumber daya manusia yang cerdas, pemerintahan yang cerdas, mobilitas cerdas, dan tempat tinggal yang cerdas (*smart living*).

Konsep *smart economy* yang telah diarahkan oleh pemerintah dalam RPJMN (2015-2019) adalah *city branding* (meliputi produk unggulan, SDM, karakter sosial dan budaya), *e-business* (mengembangkan peran layanan sistem informasi industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian kota), meningkatkan kemampuan inovasi SDM dan kewirausahaan dan elektronifikasi (transaksi manual menuju ke transaksi *online*).

b. Isu Daerah

1) Pengembangan Kesenjangan Wilayah

Kota Palangka Raya memiliki ciri perkotaan kota dan pedesaan. Dari aspek kesenjangan antar wilayah terlihat, bahwa kondisi prasarana dan sarana penunjang antar wilayah sangat berbeda antara wilayah yang berada di pusat kegiatan dengan ciri perkotaan dengan wilayah yang berciri pedesaan. Implikasi dari kondisi tersebut terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk wilayah yang memiliki akses terbatas dengan pusat kota, maka tingkat kemiskinan antara kota juga terbatas.

Pada tabel 4.3 di bawah ini, memberikan gambaran kelurahan yang maju, berkembang, dan tertinggal.

Tabel 4.3 Kategori Kelurahan berdasarkan Tipologi Kawasan

Kecamatan	Cepat Tumbuh/Strategis Berkembang	Berkembang	Tertinggal/Miskin
PAHANDUT	Pahandut Langkai Pamarung		Tumbang Rungan Pahandut Seberang Tanjung Pinang
JEKAN RAYA	Menteng Bukit Tunggal Palangka		Petuk Katimpun
SABANGAU		Sabaru Kalampangan Kereng Bangkirai	Bereng Bengkel Kameloh Baru Danau Tundai
BUKIT BATU		Banturung Tangkiling Sei Gohong	Marang Kanarakan Tumbang Tahai Habaring Hurung
RAKUMPIT			Panjehang Mungku Baru Petuk Barunai Petuk Bukit Pager Gaung Baru Bukit Sua

Sumber: diolah dari kondisi lapangan

2) Kemampuan melakukan Inovasi

Kota-kota dimasa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi diperlukan sebagai bentuk kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Data menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai terobosan inovasi daerah. Namun dari 99 inovasi pelayanan publik tahun 2017, Kota Palangka Raya memang belum masuk di dalamnya. Oleh karena melalui inovasi daerah, tertuang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik;
- c. dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Karena keterbatasan APBD pemerintah daerah, dalam mencukupi kebutuhan perumahan bagi warganya dilakukan dengan mendorong *e-governance*, dimana pelayanan publik dibuka seluas mungkin aksesnya agar semua kebutuhan masyarakat kota dapat terpenuhi. Salah satu yang harus diupayakan adalah konsep *Public Private Partnership* (PPP) atau KPBU (Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha), dimana pihak swasta dan pemerintah daerah berkolaborasi bersama untuk memenuhi kebutuhan

warga kota. Contohnya, kebutuhan pemukiman bagi warga dilakukan oleh pihak swasta, namun menurut arahan dari pemerintah kota. Hal ini haruslah dijadikan kebiasaan pemerintah daerah ke depannya, untuk mencapai *smart economy* dan *smart governance*.

Pemerintah Kota Palangka Raya akan banyak memiliki banyak pekerjaan rumah, di antaranya bagaimana mengintegrasikan semua sistem informasi teknologi yang ada di semua unit (SOPD) kota, bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal layanan publik serta membuat regulasi yang baik agar dapat mengantisipasi bisnis *online* yang semakin menjamur, agar semua pelaku berada di level yang sama.

3) Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka pembangunan Kota Palangka Raya ke depan mesti memperhatikan komitmen untuk melaksanakan 17 tujuan tersebut, sekalipun tidak memiliki laut seperti tujuan ke empat belas tentang Ekosistem Laut.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Bertitik tolak dari gambaran permasalahan dengan analisis potensi keunggulan Kota Palangka Raya, maka disusunlah visi, misi, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk periode lima tahun ke depan.

“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” adalah menjadi kota yang teridentifikasi dalam 8 (delapan) aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek: pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun yang dimaksud dengan **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU** adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan meningkatnya daya beli masyarakat.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur dan teknologi informasi untuk menjadi kota yang cerdas.
3. Meningkatnya kemandirian ekonomi kota menuju kota jasa yang berkelanjutan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** adalah:

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.
5. Terwujudnya kesejahteraan lahir dan bahtin melalui upaya pemanfaatan potensi sumberdaya oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dengan membangun kebersamaan dalam semua dimensi kehidupan.



5.2. MISI

Berdasarkan uraian dari makna Visi tersebut dan untuk mewujudkannya dalam 5 (Lima) tahun ke depan disusunlah Misi sebagai berikut.

- 1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)**
Meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)**
Meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
- 3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)**
Meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1 Keterkaitan antara visi dan misi Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	Arah Misi
Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju	Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)	Pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Rukun	Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat <i>Smart Society</i> (masyarakat Cerdas)	Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Sejahtera	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)	Pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.



Tabel 5.2 Kesesuaian dan konsistensi antara Misi RPJMD Kota Palangka Raya dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023

No	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018-2023	MISI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA
1	Misi 1 : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Misi 1 : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
2	Misi 2 : Pengelolaan Infrastruktur	Misi 1 : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
3	Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai	Misi 1 : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
4	Misi 4 : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
5	Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 2 : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)
6	Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	Misi 2 : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas) Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
7	Misi 7 : Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Misi 1 : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
8	Misi 8 : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini dilakukan mengingat bilamana Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam Tujuan dan Sasaran, maka program Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalsikannya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang diuraikan secara umum berdasarkan Visi dan Misi yang ada sebagai berikut:

1. **Misi Satu: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)** meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi. Ditetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan dan 2 (dua) Sasaran Pembangunan adalah:

Tujuan 1: Meningkatkan Pemerataan pembangunan infrastruktur dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap (M1S1).

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S2).

2. **Misi Kedua: Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)** meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan. Dengan 2 (dua) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran Pembangunan:

Tujuan 3: Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)
2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan (M2S2)
3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)



Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik (M2S5)
3. Meningkatnya Kerukunan Masyarakat (M2S6)

- 3. Misi Tiga: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)** meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan. Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

Tujuan 5: Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi (M3S1)
2. Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan (M3S2)



Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Visi: Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Cerdas, Sejahtera, Dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN				Kondisi Akhir RPJMD
					2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1 Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas) (M1)	1 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur		Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	60.34					65.00
		1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap (M1S1)	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	60.34	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00
	2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.50					70.00
		2 Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S2)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.50	68.00	68.50	69.00	69.50	70.00
2 Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) (M2)	3 Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	79.70					80.20
		1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Angka Harapan Hidup	73.13	73.25	73.45	73.65	73.85	74.05
		2 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan (M2S2)	Harapan lama sekolah	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.10
		3 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.00	6.80	6.60	6.40	6.25	6.00

		4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi	C						B
				4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)	Nilai saki	CC	CC	CC	B	B	B	
						Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik (M2S5)	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	A	A	
				6	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat (M2S6)	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	6.00	5.90	5.80	5.75	5.60	5.55	
3	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi cerdas) (M3)	5	Meningkatkan Perekonomian Daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.96						7.2
1				Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi (M3S1)	PDRB Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi	4.996.506.106.000	5.630.391.209.000	6.264.276.312.000	6.898.161.415.000	7.532.046.518.000	8.165.931.621.000		
2				Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan (M3S2)	PDRB Sektor Industri Pengolahan	1.614.480.700.000	1.816.454.167.000	2.018.439.350.000	2.220.424.534.000	2.422.409.717.000	2.624.394.900.000		
					PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	372.202.500.000	398.163.750.000	424.125.000.000	450.086.250.000	476.047.500.000	502.008.750.000		



BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itu adalah berupa perumusan strategi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi Informasi.

Tabel 6.1 Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Berada Dalam Kota Palangka Raya

No.	Kawasan Strategis Nasional	Lokasi
1.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan
No.	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Lokasi
1.	KSP Pertumbuhan Ekonomi	Pusat Kegiatan Kota
a.	kawasan strategis Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1. Kecamatan Pahandut
b.	kawasan pengembangan lahan gambut (PLG)	2. Kecamatan Jekan Raya
c.	kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi	3. Kecamatan Sabangau
d.	pertanian lahan gambut budidaya	4. Kecamatan Bukit Batu
e.	kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia	1. Kecamatan Pahandut
f.	kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao)	2. Kecamatan Sabangau
g.	kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan	Kecamatan Sabangau
		Kecamatan Bukit Batu
		1. Kecamatan Bukit Batu
		2. Kecamatan Rakumpit
		Kecamatan Bukit Batu



2.	KSP Sosial Budaya Kawasan Pahewan Tabalien	Kecamatan Rakumpit
3.	KSP Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi Tinggi Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi	Kecamatan Bukit Batu
4.	KSP Perlindungan Keanekaragaman Hayati a. Cagar Alam Bukit Tangkiling b. Hutan Monumental Nyaru Menteng c. Danau Rawet d. Danau Tahai e. Pulau Kaja f. Danau Lewu g. Pahewan Tabalien h. Danau Tundai	Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Jekan Raya Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Rakumpit Kecamatan Sabangau

Tabel 6.2 Kawasan Strategis Kota Palangka Raya

No.	Kawasan Strategis Kota (KSK)	Lokasi
1.	KSP Pertumbuhan Ekonomi a. KSK Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata - Kawasan Wisata Sei Gohong - KSP Kawasan Wisata Danau Tahai - Kawasan Wisata Kereng Bangkirai - Kawasan Pengembangan Wisata Hutan dan Outbound; - Kawasan Pengembangan Wisata Tepi Air (<i>Waterfront City</i>)	Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Sabangau Kecamatan Pahandut Kecamatan Pahandut



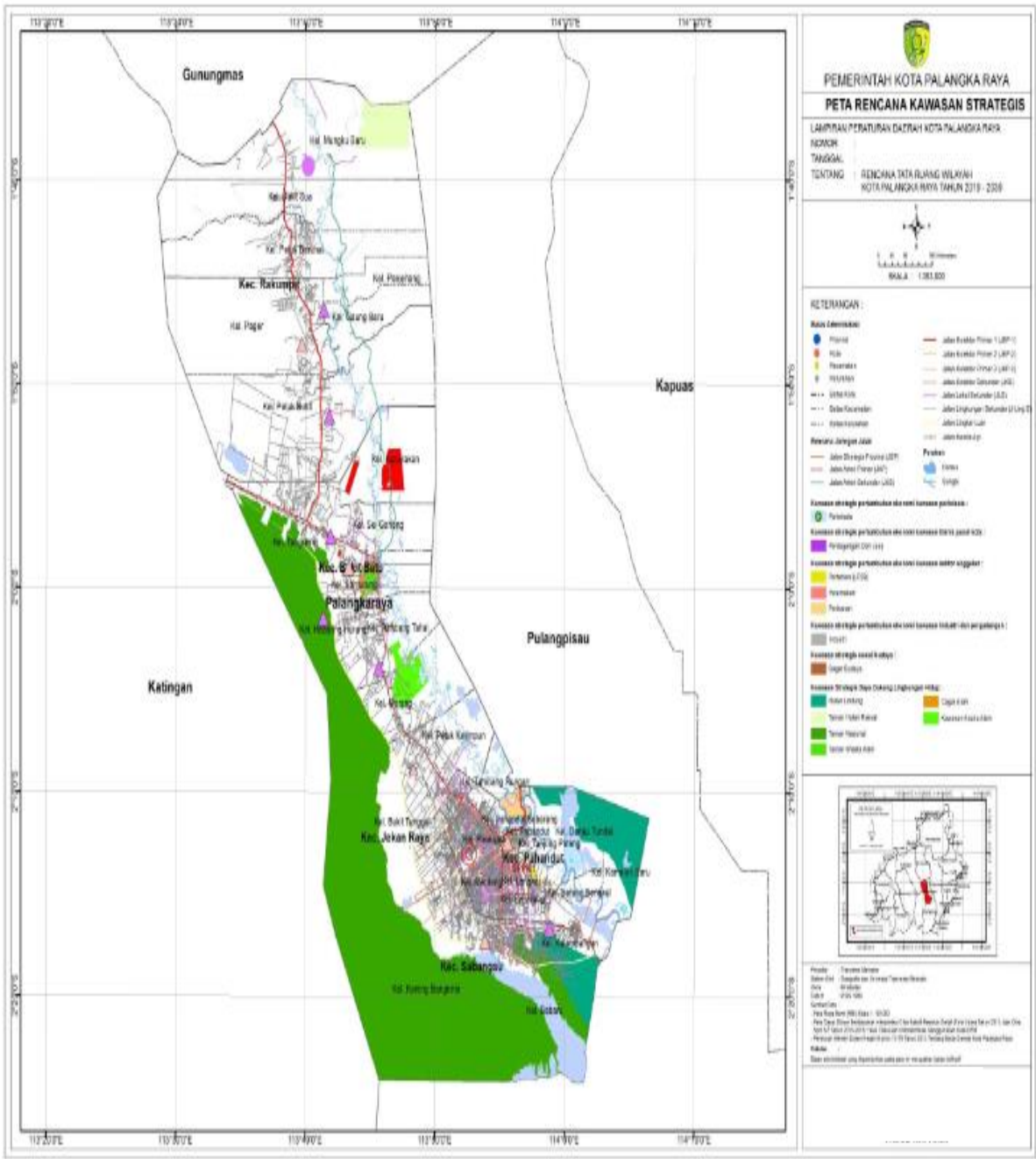
<p>b. KSK Pertumbuhan Ekonomi Pusat Kota</p> <ul style="list-style-type: none">- KSP kawasan pusat kota- kawasan perdagangan jasa pada koridor Jalan A.Yani dan Jalan S. Parman;- kawasan pusat bisnis dan perkantoran Jalan RTA Milono, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Tjilik Riwut- kawasan perdagangan jasa pada koridor Jalan Seth Adji dan Jalan Kristopel Mihing- kawasan perdagangan jasa pada koridor Jalan Rajawali- kawasan perdagangan jasa pada koridor Jalan Bukit Keminting- kawasan perdagangan jasa pada koridor Jalan Yos Sudarso dan Jalan Galaxy Raya- kawasan perdagangan jasa pada koridor Jalan Temanggung Tilung- kawasan pengembangan kawasan sentral bisnis dan ekonomi terpadu pada kawasan koridor Jalan Rungan, Jalan Tingang dan Jalan Mahir Mahar Raya- kawasan pengembangan kawasan sentra bisnis pada koridor Jalan Soekarno Hatta dan sekitarnya	<p>1. Kecamatan Pahandut 2. Kecamatan Jekan Raya Kecamatan Pahandut</p> <p>1. Kecamatan Pahandut 2. Kecamatan Jekan Raya</p> <p>Kecamatan Pahandut</p> <p>Kecamatan Jekan Raya</p> <p>Kecamatan Jekan Raya</p> <p>Kecamatan Jekan Raya</p> <p>Kecamatan Jekan Raya</p> <p>Kecamatan Jekan Raya</p>
---	--



	<p>c. KSK Pertumbuhan Sektor Unggulan Kota</p> <ul style="list-style-type: none">- KSN kawasan pengembangan ekonomi terpadu DAS Kahayan- KSP kawasan pertanian pangan- KSP kawasan pengembangan penggembalaan dan peternakan terpadu- kawasan pertanian hortikultura- KSP kawasan minapolitan	<p>DAS Kahayan</p> <p>Kecamatan Sabangau Kecamatan Bukit Batu</p> <p>Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu</p>
2.	<p>KSK Sosial Budaya</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kawasan Tajahan Tjilik Riwutb. Kawasan Pura Sali Pasabeau Batuc. Makam Kubah Kuningd. Sandung Bawi Kuwu	<p>Kecamatan Pahandut Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Sabangau Kecamatan Rakumpit</p>
3.	<p>KSK Daya Dukung Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none">a. kawasan perlindungan keanekaragaman hayati pada Taman Nasional Sabangaub. kawasan konservasi sumber daya air pada Sungai Sabangauc. KSP kawasan kubah gambut berkanal dan kubah gambut tidak berkanal dengan zona lindungd. kawasan pengembangan Wisata Rawa, Kecamatan Sabangaue. kawasan pengembangan wisata Danau Hanjalutung, Kecamatan Jekan Raya; dan	<p>1. Kecamatan Jekan Raya 2. Kecamatan Sabangau 3. Kecamatan Bukit Batu</p> <p>Kecamatan Sabangau</p> <p>1. Kecamatan Pahandut 2. Kecamatan Jekan Raya 3. Kecamatan Sabangau 4. Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Sabangau</p> <p>Kecamatan Jekan Raya</p>



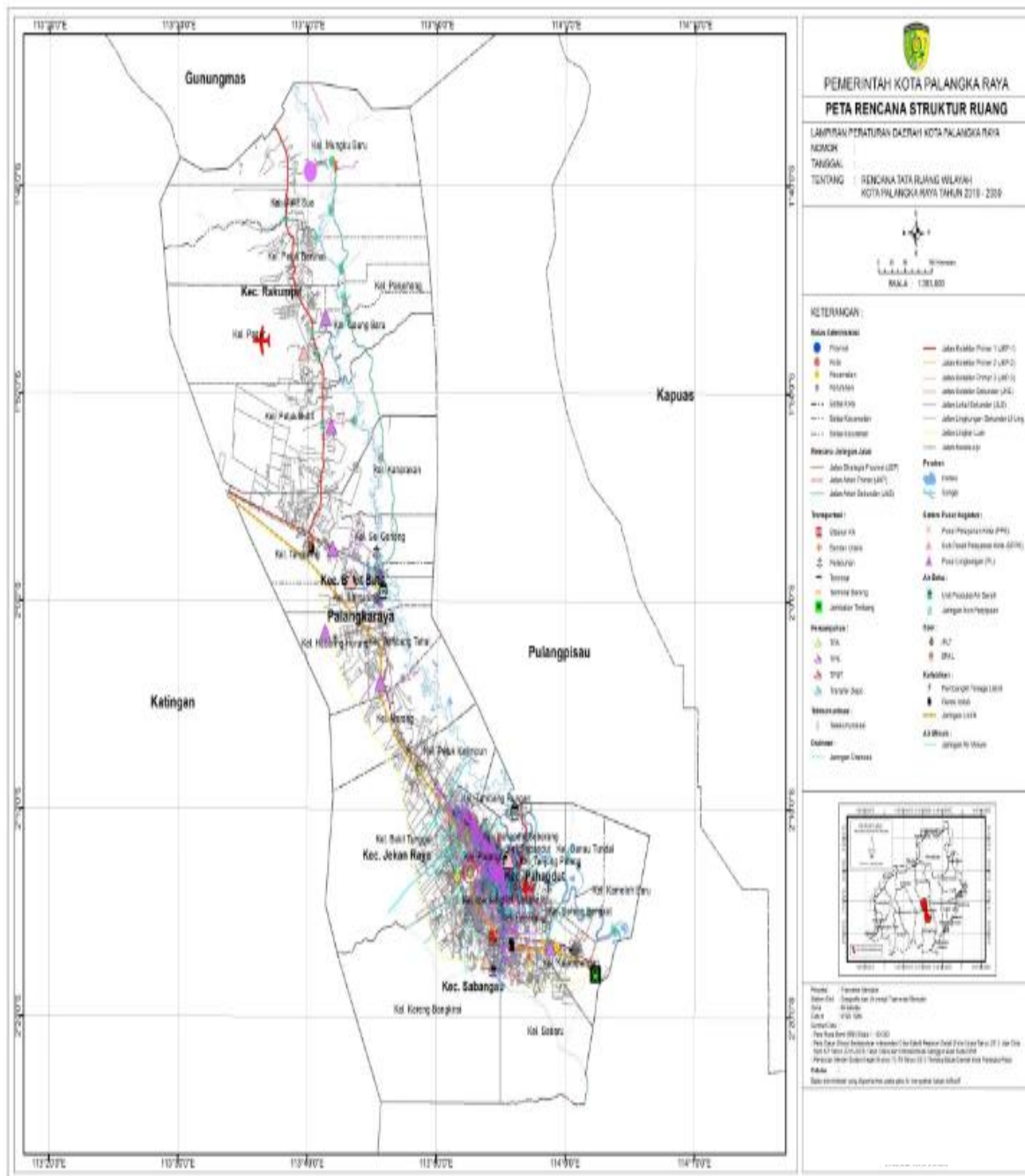
Gambar 6.1 Peta Kawasan Strategis Kota Palangka Raya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, 2019



Gambar 6.2 Peta Pusat Kegiatan Kota Palangka Raya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, 2019

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

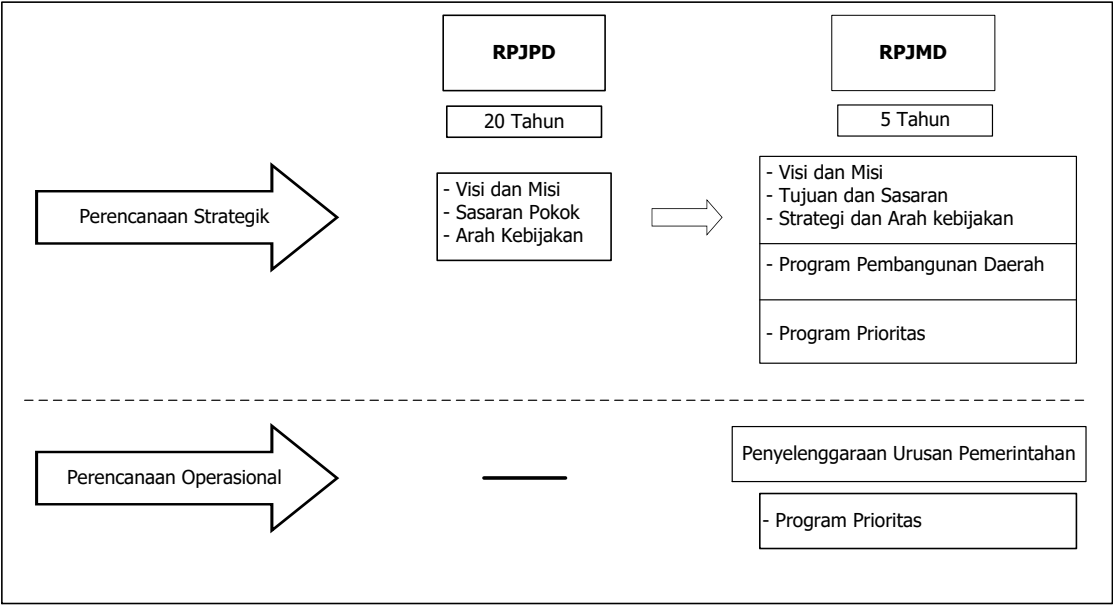
Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus merupakan budaya berpikir strategik. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Selain hal tersebut di atas, perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam gambar 6.3 berikut ini:

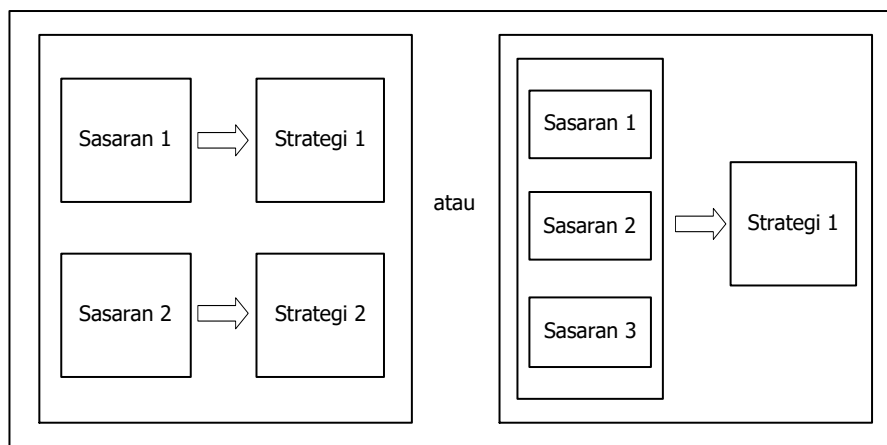
Gambar 6.3 Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional



Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana gambar pada 6.4 berikut ini:

Gambar 6.4 Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi

Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, beberapa strategi pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang mungkin dapat dilakukan yaitu terdiri dari 3 (tiga) Strategi, dimana setiap strategi yang ada akan terhubung dengan satu atau lebih sasaran, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut:



Tabel 6.3 Analisis SWOT Kota Palangka Raya

<div>SWOT</div>	Streght (S):	Kelemahan (W):
	<div><div>1. Sebagai pusat pemerintah provinsi dan kota</div><div>2. Posisi strategis bagi 13 kabupaten di Kalimantan Tengah</div><div>3. Aksesibilitas ke semua wilayah Kalimantan dan luar Kalimantan</div><div>4. Di bidang pendidikan, Kota Palangka Raya memiliki perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah tinggi, balai pelatihan kerja, dan berbagai komunitas pendidikan</div><div>5. Tersedianya lahan yang strategis untuk pengembangan industri yang mendorong perekonomian, investasi serta properti.</div><div>6. Pemerataan Infrastruktur Wilayah (infrastruktur jalan, jembatan, pasar modern dan tradisional, sekolah, kampus, sarana olah raga, sarana transportasi umum, terminal, jaringan pejalan kaki, jaringan listrik, prasarana telematika, dan jaringan air bersih yang memadai, akses cepat menuju bandar udara)</div><div>7. Memiliki sarana kesehatan yang memadai terdiri dari Rumah Sakit Umum, rumah sakit swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Apotik, Klinik KB, Balai Pengobatan, Rumah Obat, dan Laboratorium Medis yang didukung tenaga medis yang memadai</div><div>8. Terdapat media massa</div></div> <div><div>1. Tata ruang kota belum disahkan</div><div>2. Kesenjangan infrastruktur antar kecamatan</div><div>3. Investasi belum banyak ke sektor padat modal</div><div>4. Terbatasnya jenis dan jumlah sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung wisata</div><div>5. Kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan</div><div>6. Lahan tidur belum dimanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan hutan. Kondisi ini seperti di jalan lingkaran luar, jalan Tjilik Riwt terus ke arah Kasongan, Jln Mahir Mahar hingga arah menuju Pulang Pisau</div><div>7. Kota Palangka Raya, belum memiliki produk unggulan yang dipasarkan ke luar daerah, industri yang ada hanya skala kecil dan mikro dan cenderung lambat berkembang</div></div>	



	<p>yang cukup beragam, seperti koran, media online, radio dan televisi swasta</p> <p>9. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan meningkat</p> <p>10. Terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam</p> <p>11. Terdapat sarana pendukung pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran/rumah makan, agen atau biro perjalanan, money changer, situs-situs bernilai sejarah/heritage</p> <p>12. Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dan pendidikan keagamaan, forum, dan paguyuban masyarakat.</p> <p>13. Tersedianya tokoh-tokoh potensial (agama, seni, budaya, sosial politik)</p> <p>14. Kondisi ketertiban sosial Kota Palangka Raya yang kondusif bagi berjalannya pembangunan</p> <p>15. Rencana wilayah kota Palangka Raya sebagai alternatif ibukota pemerintahan Republik Indonesia</p>	
Opportunities (O):	Strategi (S+O)	Strategi (W-O)
<p>1. Akses dari dan menuju ke Kota Palangka melalui darat, sungai, laut (melalui kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau) dan udara</p> <p>2. Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang luas dan dinamis bagi Kota Palangka Raya untuk melaksanakan pembangunan</p> <p>3. Adanya berbagai Program Nasional</p>	<p>1. Memanfaatkan kebijakan</p> <p>2. otonomi daerah yang seluasluasnya dengan menggunakan SDM yang memadai</p> <p>3. Peningkatan Peran Tokoh Potensial Daerah dalam percepatan pembangunan.</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan terhadap bidang-bidang minat, bakat, dan ketrampilan khusus masyarakat</p> <p>5. Meningkatkan peran masyarakat dalam</p>	<p>1. Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat miskin</p> <p>3. Kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain (akademisi, LSM, swasta) dalam melaksanakan/menjalankan program/kegiatan.</p> <p>4. Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan</p> <p>5. Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi</p>



<p>beserta seluruh struktur pendukungnya yang menjangkau Kota Palangka Raya adalah peluang yang baik yang harus dimanfaatkan</p> <p>4. Adanya semangat kepemimpinan dari Walikota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya masa jabatan 2018-2023</p> <p>5. Kemajuan kota yang pesat membuat Kota Palangka Raya sebagai tujuan investasi sektor tersier.</p>	<p>menjaga ketertiban sosial</p> <p>6. Meningkatkan peran lembaga keagamaan/tokoh agama, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan</p> <p>7. Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan dan prestasi</p> <p>8. Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan</p> <p>9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan</p> <p>10. Peningkatan kesehatan sosial masyarakat</p> <p>11. Fasilitasi investasi pengembangan destinasi wisata, baik destinasi lama maupun baru</p> <p>12. Optimalisasi sentra wisata kreatif dan yang berbasis lingkungan</p> <p>13. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan revitalisasi pertanian.</p> <p>14. Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan legitimasi peraturan daerah</p> <p>15. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya local</p>	<p>untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus/staff</p> <p>6. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal</p> <p>7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik</p> <p>8. Meningkatkan pelaksanaan</p> <p>9. Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik</p> <p>10. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>11. Pengarusutamaan gender dan pengendalian pertumbuhan penduduk</p> <p>12. Peningkatan dan optimalisasi investasi skala besar, disertai kajian kemanfaatan dan resiko yang akan ditimbulkan</p>
ANCAMAN	S + T	W + T
<p>1. Arus Urbanisasi dan pendatang yang masuk ke Kota Palangka Raya semakin tinggi.</p> <p>2. Penetrasi kekuatan ekonomi pasar global dan perdagangan bebas.</p> <p>3. Krisis ekonomi global berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya</p> <p>4. Pertumbuhan sektor properti yang kurang terkendali, mengancam</p>	<p>1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan</p> <p>2. Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya</p> <p>3. Perluasan lapangan kerja</p> <p>4. Penggunaan alokasi</p>	<p>1. Penataan kawasan industri kecil menengah terpadu</p> <p>2. Optimalisasi peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan UKM</p> <p>3. Pengembangan sistem transportasi terpadu</p> <p>4. Peningkatan akses transportasi guna memperlancar aktivitas</p>



<p>tata ruang kota.</p> <p>5. Semakin berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>6. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi, berpotensi menimbulkan kemacetan dan menambah polusi udara.</p> <p>7. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi, menjadi beban kota dan memicu persoalan sanitasi, serta persoalan sosial</p>	<p>dana untuk pogram/kegiatan sesuai kebutuhan pembangunan</p> <p>5. Meningkatkan komunikasi untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pelaku pembangunan di Kota Palangka Raya</p> <p>6. Mengintensifkan promosi pemasaran produk-produk unggulan daerah</p> <p>7. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah</p>	<p>ekonomi industri</p> <p>5. Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</p> <p>6. Peningkatan pembangunan sarana pemukiman dan drainase</p> <p>7. Optimalisasi dan penyempurnaan penataan ruang</p> <p>8. Peningkatan pengendalian dan pengawasan program pembangunan terkait tata ruang</p> <p>9. Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna pembangunan</p> <p>10. Pengendalian dampak kewilayahan dari keberadaan industri berskala besar</p> <p>11. Optimalisasi kebudayaan tradisional Palangka Raya sebagai kekayaan daerah untuk menunjang sektor pariwisata</p> <p>12. Optimalisasi fungsi koperasi dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p>13. Peningkatan upaya guna menjamin keberlangsungan usaha yang layak bagi para pelaku usaha mikro</p> <p>14. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja industri</p> <p>15. Revitalisasi pasar tradisional</p>
---	--	---



Tabel 6.4 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

SASARAN		STRATEGI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap (M1S1)	Strategi (S1) Pemerataan Infrastruktur Wilayah				
2	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S2)					
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (M2S1)	Strategi (S2) Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan, dan Pelayanan Publik				
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan (M2S2)					
5	Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik (M2S3)					
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)					
7	Meningkatnya kualitas layanan kepada publik (M2S5)					
8	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat (M2S6)					
9	Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi (M3S1)	Strategi (S3) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah				
10	Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan (M3S2)					

Berdasarkan tabel 6.4 di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 6.3. di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Penjelasan ketujuh prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Strategi (S1) Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Strategi pertama yang akan dilakukan adalah Pemerataan Infrastruktur Wilayah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap (M1S1)
- 2. Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S2)



Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan dalam dan luar kota, jalan lingkungan, jembatan, perhubungan, penyediaan air bersih, sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat kota Palangka Raya. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktivitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.

Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Suksesnya peningkatan aksesibilitas sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi, baik daerah, nasional, maupun internasional.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang terkait dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang termasuk penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang terkait dengan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program. Diharapkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau.

Kota Palangka Raya merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, kota yang berkembang cepat sebagai kota transit, perdagangan, jasa, juga penghubung kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satu kebutuhan utama adalah alat transportasi. Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat karena terkait dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan sebagainya.

Strategi pembangunan melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang. Selain itu, Strategi ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian.

Pesatnya pembangunan akan mendorong pemanfaatan tambang di Kota Palangka Raya akan lebih besar lagi. Untuk itu dalam pembangunan perlu berorientasi pada kelestarian alam, memperhatikan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan,



meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil, meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah dan menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada. masih Terdapat pertambangan yang tanpa izin beroperasi di Kota Palangka Raya. Dengan demikian perusahaan yang ada kurang memiliki kesadaran tentang hukum, terutama untuk mengurus izin pertambangan.

2. Strategi (S2) adalah Peningkatan pelayanan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan, dan Pelayanan Publik.

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (M2S1)
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan (M2S2)
3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)
4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)
5. Meningkatnya kualitas layanan kepada publik (M2S5)
6. Meningkatnya Kerukunan Masyarakat (M2S6)

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara mendasar.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Untuk mengatasi masalah pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin akan dibantu dalam penyelesaian pendidikan minimal pada jenjang S1, serta pemberian bea siswa pendidikan kepada masyarakat miskin dan siswa berprestasi. Selain itu, guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur kelurahan, akan



dilakukan diklat-diklat teknis dan bimbingan teknis kepada aparatur kelurahan.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas prima diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.

Abad 21 disebut sebagai abad perkotaan (*the urban age*) yang menawarkan beragam peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi secara bijak. Kota pada dasarnya adalah permukiman dengan kompleksitas yang berbeda dan beragam, ciri lain dari kota adalah kebebasannya, menjadi global hampir tidak terkontrol oleh pemerintah pusat, terutama dalam kegiatan ekonomi, sehingga menjadikannya *economic city state*. Kota harus dipahami sebagai permukiman yang berkembang lanjut untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan warganya. Hanya di kota yang berkembang baik warga dapat memajukan diri karena dukungan sarana dan prasarana yang bermutu. Sebagian besar (dua pertiga) kota adalah perumahan dan permukiman, khususnya melayani penduduk lapis menengah ke bawah yang pada aspek rasa aman harus menjadi bagian penting dalam pembangunan Kota Palangka Raya

Kinerja tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya direpresentasikan oleh kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, kinerja pelayanan publik, kinerja akuntabilitas pemerintah daerah dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Implikasi dari capaian kinerja tata kelola pemerintahan yang digambarkan oleh kinerja reformasi birokrasi, kinerja pemerintah daerah dan kinerja pengelolaan keuangan daerah diatas adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan, transparansi dan akuntabilitas yang diberikan oleh penyelenggara dan pada akhirnya memunculkan opini/penilaian oleh masyarakat menyangkut baik atau buruk suatu pelayanan publik. Kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien, efektif dan akuntabel menjadi ukuran kinerja tata pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kota



Palangka Raya juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Strategi (S3) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Strategi pembangunan ketiga adalah peningkatan kemandirian ekonomi daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi (M3S1)
2. Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan (M3S2)

Keberlanjutan suatu proses pembangunan ditentukan oleh keterlibatan seluruh *stakeholder*. Untuk itu, pengembangan ekonomi Kota Palangka Raya diarahkan dengan corak ekonomi lokal (ekonomi rakyat dalam arti luas). Perdagangan, industri dan pertanian juga pariwisata dikembangkan dengan bertumpu pada pemberdayaan ekonomi lokal. Penarikan investasi dilakukan untuk sektor-sektor yang memang memiliki kemampuan untuk menjadi pendorong dan penarik pengembangan ekonomi lokal.

Strategi pembangunan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU No 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata). Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1) Destinasi; (2) Pemasaran; (3) Industri, dan (4) Kelembagaan. Destinasi pariwisata adalah lokasi atau tontonan atau event yang dapat menjadi obyek pariwisata. Pemasaran adalah upaya yang dilakukan oleh insan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata untuk memperkenalkan pariwisata dan upaya untuk menarik wisatawan datang ke daerah. Industri pariwisata adalah seluruh pendukung agar pariwisata dapat berkembang, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi hingga akomodasi dan konsumsi yang dibutuhkan oleh wisatawan. Kelembagaan terkait dengan manusia, aturan dan organisasi yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.



Strategi pembangunan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif dan potensi daerah ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berpiilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian.

Dalam upaya untuk memicu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah maka pengembangan kawasan di pedalaman juga harus diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur yang harus dipenuhi di masing-masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan komponen penggerak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga keuangan, perdagangan, dan lain-lain, perlu difasilitasi kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor.

6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan sebagaimana table 6.5 berikut ini:

Tabel 6.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur di Kota Palangka Raya	Optimalisasi pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya untuk mewujudkan lingkungan cerdas	Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakkan ekonomi untuk terwujudnya masyarakat ekonomi cerdas	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk terwujudnya masyarakat cerdas	Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera



Tabel 6.6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KOTA PALANGKA RAYA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Misi 1: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)															
		Tujuan 1: Meningkatkan Pemerataan pembangunan infrastruktur															
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap (M1S1)															
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terbangun	56.5	57	50,553,768,575	0	-	0	-	0	-	0	-	57	50,553,768,575	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terpelihara	44.88	45	12,418,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	45	12,418,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong Gorong	Persentase drainase yang terbangun	51	53	21,358,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	54	21,358,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	74.54	76	4,215,939,000	0	-	0	-	0	-	0	-	76	4,215,939,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengendali Banjir	Persentase pengendalian banjir kondisi baik	61.4	62	4,215,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	62	4,215,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan	49	50	175,224,200	0	-	0	-	0	-	0	-	50	175,224,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pembangunan lingkungan sehat perumahan	49	50	342,685,925	0	-	0	-	0	-	0	-	50	342,685,925	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase rencana tata ruang	68	70	2,354,010,850	0	-	0	-	0	-	0	-	70	2,354,010,850	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penyelenggaraan Jalan	0	0	-	59	78,702,250,000	61	81,002,250,000	63	83,002,250,000	65	85,002,250,000	65	85,002,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase pengelolaan sumber daya air	0	0	-	55	37,609,870,000	57	49,409,870,000	59	55,009,870,000	61	55,009,870,000	61	55,009,870,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase pengembangan infrastruktur permukiman	0	0	-	51	1,250,000,000	52	1,400,000,000	53	1,800,000,000	54	1,800,000,000	54	1,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Persentase rencana dan pemanfaatan ruang	0	0	-	72	6,170,000,000	74	6,590,000,000	76	6,660,000,000	78	6,660,000,000	78	6,660,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase pelayanan kebinamargaan	70	72	4,840,000,000	74	6,130,000,000	76	6,230,000,000	78	6,240,000,000	80	6,240,000,000	80	6,240,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	80	81	1,456,566,200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pembinaan Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	80	0	-	82	1,490,000,000	83	1,510,000,000	84	1,510,000,000	85	1,510,000,000	85	1,510,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah Layak Huni Terbangun	15,29	0.9	278,422,625	-	-	-	-	-	-	-	0.90	278,422,625.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan Lingkungan Terbangun	38,08	0.85	10,717,496,375	-	-	-	-	-	-	-	0.85	10,717,496,375.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Tertangani	66,49	85	6,156,613,910	-	-	-	-	-	-	-	85.00	6,156,613,910.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong	Drainase Dalam Kondisi Baik (km)	0	0.8	2,445,021,250	-	-	-	-	-	-	-	0.80	2,445,021,250.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Peningkatan Pelayanan Pemakaman Yang Dapat Berfungsi Optimal	46,50	0.9	312,867,975	-	-	-	-	-	-	-	0.90	312,867,975.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Pelayanan IPLT (%)	65	0.9	1,608,247,375	-	-	-	-	-	-	-	0.90	1,608,247,375.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat Air Bersih	60	0.9	2,278,544,190	-	-	-	-	-	-	-	0.90	2,278,544,190.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	34,45	0.9	458,306,750	-	-	-	-	-	-	-	0.90	458,306,750.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pada Tahun N	24,37	0.95	2,508,546,484	0.95	853,208,531	0.95	853,208,531	0.95	853,208,531	0.95	853,208,531	0.95	853,208,531	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n	51,58	0.9	12,626,205,500	-	-	-	-	-	-	-	0.90	12,626,205,500.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH dalam Kondisi Baik	64,52	0.85	5,366,123,650	-	-	-	-	-	-	-	0.85	5,366,123,650.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Fasilitas Umum	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	-	-	-	5.20%	30,151,359,332	5.20%	30,151,359,332	5.40%	30,151,359,332	5.60%	30,151,359,332	6%	30,151,359,332	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Misi 2: Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)															
		Tujuan 3: Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing															
		Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (M2S1)															
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Keluarga Sehat	22%	23,5%	165,475,000	-	-	-	-	-	-	-	23,5%	165,475,000.00	Dinas Kesehatan	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka gizi buruk	2	0	14,015,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,015,000.00	Dinas Kesehatan	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah Sehat	88.4%	90%	39,442,250	-	-	-	-	-	-	-	0.90	39,442,250.00	Dinas Kesehatan	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	27%	92%	87,579,700.00	-	-	-	-	-	-	-	0.92	87,579,700.00	Dinas Kesehatan	
			Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%	100%	424,949,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	424,949,000.00	Dinas Kesehatan	
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	87.16%	88%	24,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.88	24,155,000.00	Dinas Kesehatan	
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kasus keracunan makanan	N/A	0	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	Dinas Kesehatan	
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Ibu hamil/melahirkan dengan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	91.98%	80%	49,259,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.80	49,259,000.00	Dinas Kesehatan	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	43.90%	40%	1,004,673,700.00	-	-	-	-	-	-	-	0.40	1,004,673,700.00	Dinas Kesehatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	94.37%	100%		-	-	-	-	-	-	1.00	Dinas Kesehatan			
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Biaya obat per kapita per tahun (Rp)	7,795	8,000	2,607,912,599.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000	2,607,912,599.00	Dinas Kesehatan	
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk	3,87	3.80	6,312,545,796.00	-	-	-	-	-	-	-	3.80	6,312,545,796.00	Dinas Kesehatan	
		Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Cakupan akses layanan rujukan	36.40%	95%	8,663,303,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.95	8,663,303,000.00	Dinas Kesehatan	
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan penduduk terlindungi Jaminan kesehatan (UHC)	86.71%	95%	217,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.95	217,000,000.00	Dinas Kesehatan	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	22.49%	23,5%	16,816,822,422.57	25%	13,336,283,390	27,5%	14,492,305,360	30%	15,507,538,011	40%	16,514,747,910	40%	16,514,747,910	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	43.90%			40%		40%		40%		40%			Dinas Kesehatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan	94.37%			100%	33,591,039,999	100%	34,604,144,000	100%	38,234,358,409	100%	38,305,294,250	100%		38,305,294,250

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan keawatdaruratan di RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD	N/a			100%	33,337,000,000	100%	36,100,000,000	100%	37,750,000,000	100%	36,650,000,000	100%	36,650,000,000	Dinas Kesehatan	
				Indikator kinerja pelayanan RS (dirinci dalam RSB-RSUD)	N/a			RSB-RSUD		RSB-RSUD		RSB- RSUD		RSB- RSUD		RSB- RSUD			RSB-RSUD
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	100	100	124,735,575	100	352,157,575	100	352,157,575	100	352,157,575	100	352,157,575	100	352,157,575	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu			600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100	143,531,450	100	439,459,300	100	439,459,300	100	439,459,300	100	439,459,300	100	439,459,300	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu			25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14.49	14.71	2,248,920,000	15.15	2,361,920,000	15.63	2,361,920,000	16.13	2,361,920,000	16.67	2,361,920,000	16.67	2,361,920,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita	20	21		21		22		22		22					
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8	7.82		7.43		7.6		6.7		6.37					
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14.3	16.33		16.8		17.15		17.39		17.56					
				Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	71.48	73.82		76.16		78.86		81.98		85.5					

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90	90		90		90		90		90		90		
		Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	30	35		40		50		60		70		80		
		Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	5.92	5.68		5.44		5.17		4.91		4.67		4.43		
		Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75.5	76.5		77.5		78.5		80		81.5		82.5		
		Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75.5	76.5		77.5		78.5		80		81.5		82.5		
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri	10	11.5		12.5		14.5		15.5		17.5		20		
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	10	11.5	14,999,875	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	14,999,875	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang Mandiri			35,000,125	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,125		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	4.17	10	125,498,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	1 : 1		-		-		-		-		-		
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	1	1		-		-		-		-		-		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV	95.71	95.71	439,857,000	95.8	3,907,646,100	96	4,298,410,710	97	4,728,251,781	99	5,201,076,959	99	5,201,076,959	Dinas Pendidikan
				Persentasi guru telah mengikuti uji kompetensi guru	75	75		80		85		90		95		95		
				Rasio guru terhadap murid PAUD	754.54	754.6		754.8		754.9		755		755		755		
				Rasio guru terhadap murid SD/MI	462.47	462.6		462.75		462.85		462.9		463		10		
				Rasio guru terhadap murid SMP/MTS	552.97	553		533.2		553.5		553.75		554		554		
			Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Lapangan Olah Raga dan Sarana Prasaranannya	0	1	190,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas - Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Atlet Berprestasi	0	10	526,805,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas - Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	10	10	1,322,923,835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas - Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Pemberdayaan Pemuda Kota Palangka Raya	Cakupan Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Produktif	0	0	-	0.5	2,700,000,000	0.75	3,000,000,000	0.8	3,200,000,000	1	3,200,000,000	1	3,200,000,000	Dinas - Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Cakupan Pemuda yang berperan pada pembangunan	0	0	-	0.5	4,240,000,000	0.75	4,346,000,000	0.8	4,454,650,000	1	4,566,016,250	1	4,566,016,250	Dinas - Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Cakupan Peningkatan Pemuda yang berprestasi dalam Olah Raga	0	0	-	0.5	4,560,000,000	0.75	4,674,000,000	0.8	4,790,850,000	1	4,910,621,250	1	4,910,621,250	Dinas - Kepemudaan dan Olah Raga
			Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Kesadaran Masyarakat pada gaya hidup sehat	0	0	-	0.5	4,900,000,000	0.75	5,022,500,000	0.8	5,148,062,500	1	5,276,764,063	1	5,276,764,063	Dinas - Kepemudaan dan Olah Raga
			Sasaran 3: Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)															
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan program kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			859,015,000		821,431,650		821,431,650		821,431,650		821,431,650		821,431,650	Dinas Tenaga Kerja
			Program peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja			305,444,100		1,050,201,600	0	1,050,201,600	0	1,050,201,600	0	1,050,201,600	0	1,050,201,600	Dinas Tenaga Kerja
			Program perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan			62,639,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Tenaga Kerja
			Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan PMKS	41115	8223	594,625,000	8223	889,031,072	8223	889,031,072	8223	889,031,072	8223	889,031,072	8223	889,031,072	Dinas Sosial
			Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksanya Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	500	100	13,308,200	-	-	-	-	-	-	-	100	13,308,200		Dinas Sosial
			Pembinaan Anak Terlantar	Terbinanya Anak Terlantar	175	35	64,606,000	-	-	-	-	-	-	-	35	64,606,000		Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat & Eks Trauma	250	50	117,693,000	-	-	-	-	-	-	-	50	117,693,000	Dinas Sosial	
		Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat & Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya	250	50	275,549,200	-	-	-	-	-	-	-	50	275,549,200	Dinas Sosial	
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	26	5	212,449,197	5	145,086,200	5	145,086,200	5	145,086,200	6	145,086,200	6	145,086,200	Dinas Sosial
		Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	Terbinanya Anggota Tagana Kota Palangka Raya	100	100	91,447,500	-	-	-	-	-	-	-	100	91,447,500	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Rehabiliasi dan Rekontruksi	50	10	16,746,000.53	-	-	-	-	-	-	-	10	16,746,000.53	Dinas Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial	-	-	-	235	378,281,500	235	378,281,500	235	378,281,500	235	378,281,500	235	378,281,500	Dinas Sosial
		Program Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial	Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial	-	-	-	100%	222,193,100	100%	222,193,100	100%	222,193,100	100%	222,193,100	100%	222,193,100	Dinas Sosial
		Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik															
		Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)															
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	35 Kegiatan	5,241,060,375	-	-	-	-	-	-	-	35 Kegiatan	5,241,060,375	Sekretariat Daerah	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Administrasi Pimpinan, Manajemen Keuangan, Aset dan Kerumahtanggaan	-	32 Kegiatan	1,077,197,800	-	-	-	-	-	-	-	32 Kegiatan	1,077,197,800	Sekretariat Daerah	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya	-	B	216,607,806	B	299,000,000	A	307,000,000	A	315,000,000	A	323,000,000	A	323,000,000	Sekretariat Daerah
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	100%	1,607,022,550	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,607,022,550	Sekretariat Daerah	
		Program peningkatan kerjasama antar daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	-	11 Kegiatan	33,107,100	-	-	-	-	-	-	-	11 Kegiatan	33,107,100	Sekretariat Daerah	
		Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	-	100%	523,326,275	100%	529,000,000	100%	539,000,000	100%	549,000,000	100%	559,000,000	100%	559,000,000	Sekretariat Daerah
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan Kegiatan Pembinaan Korpri/ASN	-	300 ASN	180,857,225	-	-	-	-	-	-	-	300 ASN	180,857,225	Sekretariat Daerah	
		Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian	Cakupan Administrasi Perekonomian dan SDA	-	100%	663,562,550	-	-	-	-	-	-	-	100%	663,562,550	Sekretariat Daerah	
		Program Pengembangan Data Informasi	Kegiatan Pengembangan Data Informasi	-	100%	194,186,900	-	-	-	-	-	-	-	100%	194,186,900	Sekretariat Daerah	
		Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan	Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tinologi OPD	-	100%	87,550,875	100%	92,000,000	100%	98,000,000	100%	104,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	Sekretariat Daerah
		Program Penyelesaian Konflik pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus Tata Negara	-	76%	60,500,000	-	-	-	-	-	-	-	76%	60,500,000	Sekretariat Daerah	

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Program Peningkatan Pembinaan Kedamangan di Kota Palangka Raya	Koordinasi Pembibingan, Supervisi Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi	-	45 Kegiatan	135,776,794	-	-	-	-	-	-	45 Kegiatan	135,776,794	Sekretariat Daerah		
				Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Administrasi Kesra dan Kemasvarakatan	-	24 Kegiatan	11,450,831,337	-	-	-	-	-	-	24 Kegiatan	11,450,831,337	Sekretariat Daerah		
				Program Pengembangan Kewasdayaan	Kegiatan Pengembangan Keswadayaan	-	12 Kegiatan	286,432,487	-	-	-	-	-	-	12 Kegiatan	286,432,487	Sekretariat Daerah		
				Program Pembinaan Kemasvarakatan	Kegiatan Pembinaan Kemasvarakatan	-	38 Kegiatan	210,703,525	-	-	-	-	-	-	38 Kegiatan	210,703,525	Sekretariat Daerah		
				Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota	Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi dan Teknis Pemerintahan dan Pembangunan	-	100%	480,601,325	-	-	-	-	-	-	100%	480,601,325	Sekretariat Daerah		
				Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah	Persentase Koordinasi dan Penguatan Kualitas Regulasi/Kebijakan Pemerintah Daerah	-	100%	1,421,314,525	-	-	-	-	-	-	100%	1,421,314,525	Sekretariat Daerah		
				Program Pembakuan Nama Rupa Bumi	Peraturan Walikota Tentang Pembakuan Nama Rupabumi	-	75%	62,500,000	-	-	-	-	-	-	75%	62,500,000	Sekretariat Daerah		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah	Persentase Penggunaan E- Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	-	-	-	100%	3,645,000,000	100%	4,009,500,000	100%	4,410,450,000	100%	4,851,495,000	Sekretariat Daerah		
				Program Pembinaan Kesejahteraan dan Kemasvarakatan	Data Masyarakat Miskin	-	-	-	100%	1,386,470,400	100%	1,401,000,000	100%	1,416,500,000	100%	1,432,000,000	Sekretariat Daerah		
				Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Pelayanan Keagamaan	-	-	-	100%	13,531,901,100	100%	13,541,218,300	100%	13,550,718,300	100%	13,564,218,300	Sekretariat Daerah		
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	Nilai/Skor dan Tingkat/Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	-	-	-	Tinggi (Skor 2.8000)	1,382,650,000	Tinggi (Skor 2.9000)	1,867,138,300	Tinggi (Skor 3.0000)	1,217,113,000	Sangat Tinggi (Skor 3.1000)	1,429,710,000	Sangat Tinggi (Skor 3.1000)	Sekretariat Daerah	
				Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian dan Pengumpulan Data Informasi	Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya	-	-	-	100%	1,064,000,000	100%	1,109,000,000	100%	1,142,000,000	100%	1,170,000,000	100%	1,170,000,000	Sekretariat Daerah
					Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Meningkatnya Produk- produk Kebijakan	112%	80%	12,730,904,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
		Program Pengkajian, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Persidangan dan Humas	Meningkatnya Produk Hukum Daerah	-	-	-	80%	5,494,071,520	85%	5,581,976,664	90%	5,671,288,291	95%	5,762,028,904	95%	5,762,028,904	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya Fasilitasi Persidangan, Risalah dan Humas	-	-	-	90%		90%		90%		95%		95%		
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	-	-	-	80%	10,073,451,064	85%	10,234,626,281	90%	10,398,380,302	95%	10,664,754,386	95%	10,664,754,386	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD	-	-	-	90%		90%		90%		95%		95%		
			Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	80%		85%		90%		95%		95%		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Assesment sesuai dengan jabatan	50%	55%	1,868,556,150	60%	3,392,720,300	70%	3,477,538,308	80%	3,564,476,765	90%	3,653,588,684	90%	3,653,588,684	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	465,090,175	100%	285,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Tercapai Hasil Kajian Penelitian	0	3	800,000,000	3	4,000,000,000	3	4,000,000,000	3	5,940,000,000	3	8,212,000,000	3	8,212,000,000	Badan Penelitian dan Peneembangan
		Program Penguatan Kelitbangan	Hasil Kelitbangan dalam Pelaksanaan Pembangunan	0	1	785,036,925	1	2,812,922,175	1	2,877,922,175	1	3,017,922,175	1	3,017,922,175	1	3,017,922,175	Badan Penelitian dan Peneembangan
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	2,187,706,973	100	2,256,557,630	100	2,432,213,393	100	2,625,434,732	100	3,242,450,490	100	3,242,450,490	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	100		100		100		100		100				
			Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	-	-		100		100		100		100				
		Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	100	100	439,237,300	-	-	-	-	-	-	-	100	439,237,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan lintas	100	100	844,802,325	-	-	-	-	-	-	-	100	844,802,325	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA	100	100	303,928,125	-	-	-	-	-	-	-	100	303,928,125	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100	100	121,355,000	-	-	-	-	-	-	-	100	121,355,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100	100	611,398,125	-	-	-	-	-	-	-	100	611,398,125	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air	-	-	-	100	1,518,538,120	100	1,670,391,932	100	1,837,431,125	100	2,021,174,238	100	2,223,291,661	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program perencanaan pembangunan ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pengendalian	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan	-	-	-	100	1,241,384,293	100	1,365,522,722	100	1,502,074,995	100	1,652,282,494	100	1,652,282,494	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Capaian Program Pembangunan Daerah Sesuai Target	-	-	100	100		100		100						
		Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah	Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B	30%	75%	479,900,000	80%	287,540,000	85%	316,294,000	90%	347,923,400	90%	382,715,740	90%	382,715,740	Inspektorat
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Jumlah Tindak Lanjut Temuan	1221	1233	1,136,950,000	1245	1,530,435,000	1257	1,683,478,500	1269	1,851,826,350	1281	2,037,008,985	1281	2,037,008,985	Inspektorat
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Terhadap Pengaduan Masyarakat	80%	0.8	185,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat	
		Program Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3 DC	3	-	3	660,000,000	3	726,000,000	3	798,600,000	3	878,460,000	3	878,460,000	Inspektorat
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	6,947,669,475	WTP	7,295,052,949	WTP	7,295,052,949	WTP	7,659,805,596	WTP	7,659,805,596	WTP	7,659,805,596	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah	85	85	1,638,813,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah	75	75	130,800,000	75	482,200,000	80	512,200,000	85	542,200,000	90	572,200,000	90	572,200,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah	75	75	6,070,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
		Program Penggalian dan Peningkatan sumber-sumber PAD	Terpenuhinya capaian target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	75	2,595,600,000	80	2,610,835,000	85	2,841,584,000	90	2,967,897,400	90	2,967,897,400	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Program Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	75	634,600,000	80	698,060,000	85	767,866,000	90	844,652,600	90	844,652,600	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Program Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pelayanan bagi Wajib Pajak Daerah	-	-	-	75	1,350,000,000	80	1,485,000,000	85	1,633,500,000	90	1,796,850,000	90	1,796,850,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
				Sasaran 5: Meningkatnya kualitas layanan kepada publik (M2S5)															
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dengan Baik	0.50	0.60	1,492,413,085	0.70	1,641,654,394	0.80	1,805,819,833	0.90	1,986,401,816	1.00	2,185,041,998	1.00	2,185,041,998	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Sarana Pencatatan Sipil	0.40	0.50	351,604,050	0.60	386,764,455	0.70	425,440,901	0.80	467,984,991	1.00	514,783,490	1.00	514,783,490	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan E- KTP	75%	80%	470,247,900	85%	517,272,690	90%	568,999,959	95%	625,899,955	955%	688,489,950	1.00	688,489,950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	236,997,200	B	260,696,920	B	286,766,612	A	315,443,273	A	346,987,601	A	346,987,601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi (Milyard)	-	585.65	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN	303	50	216,306,500	50	745,000,000	75	895,000,000	75	1,040,000,000	75	1,150,000,000	75	1,150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)		2597.66	200	225		255		295		350		350				
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	16.50%	25%	43,507,000	35%	190,000,000	45%	235,000,000	60%	290,000,000	65%	380,000,000	65%	1,138,507,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan	7.69%	75%	142,455,000	80%	207,000,000	83%	245,000,000	85%	290,000,000	90%	350,000,000	90%	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	81.98	292,380,000	82.96	270,000,000	83.95	490,000,000	84.95	650,000,000	85.96	735,000,000	85.96	735,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.72	0.77	316,715,500	0.83	402,180,000	0.88	439,180,000	0.94	429,180,000	1	454,180,000	1	454,180,000	Kecamatan Pahandut
				Presentase PKK aktif	100%	100%	100%		100%		100%		100%						
				Persentase Posyandu Aktif	60%	70%	80%		90%		100%		100%						

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	4,309,361,463	70%	2,389,000,000	80%	2,423,000,000	90%	2,453,000,000	100%	2,535,000,000	100%	2,535,000,000	Kecamatan Pahandut
		Program Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk di Wilayah Kec. Pahandut yang wajib memiliki dokumen kependudukan	80%	83%	40,064,250	86%	60,000,000	92%	70,000,000	94%	70,000,000	96%	75,000,000	98%	75,000,000	Kecamatan Pahandut
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	3,385,800,000	1	3,724,380,000	1	4,126,818,000	1	4,506,499,800	1	4,987,149,780	1	4,987,149,780	Kecamatan Bukit Batu
			Presentase PKK aktif	100%	100%				100%		100%		100%		100%		
			Persentase Posyandu Aktif	100%	100%				100%		100%		100%		100%		
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	417,279,850	70%	459,007,835	80%	504,908,619	90%	555,399,480	100%	610,939,428	100%	672,033,371	Kecamatan Bukit Batu
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk di Wilayah Kec. Bukit Batu yang wajib memiliki dokumen kependudukan	65%	75%	55,320,000	85%	60,852,000	95%	66,937,200	100%	73,630,920	100%	80,994,012	100%	80,994,012	Kecamatan Bukit Batu
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.72	0.77	1,777,764,225	0.83	1,777,764,225	0.88	1,777,764,225	0.94	1,777,764,225	1	1,777,764,225	1	1,777,764,225	Kecamatan Jekan Raya
			Presentase PKK aktif	100%	100%				100%		100%		100%		100%		
			Persentase Posyandu Aktif	50%	60%				70%		80%		90%		100%		
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	1,945,718,932	70%	1,978,950,000	80%	2,010,450,000	90%	2,054,450,000	100%	2,117,950,000	100%	2,117,950,000	Kecamatan Jekan Raya
		Program Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk di Wilayah Kec. Jekan Raya yang wajib memiliki dokumen kependudukan	94.60%	95%	4,608,750	95.50%	66,500,000	96%	70,000,000	96.50%	73,000,000	97%	75,000,000	97%	75,000,000	Kecamatan Jekan Raya
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,64	0,71	198,409,850	0,78	305,887,140	0,85	335,811,273	0,92	392,182,964	1	482,435,408	1	482,435,408	Kecamatan Sabangau
			Presentase PKK aktif	100%	100%				100%		100%		100%		100%		
			Persentase Posyandu Aktif	100%	100%				100%		100%		100%		100%		
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	3,099,623,000	70%	1,002,176,000	80%	1,009,647,250	90%	1,048,880,762	100%	1,127,251,741	100%	1,048,880,762	Kecamatan Sabangau
		Program Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pendataan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sabangau	100%	100%	28,600,000	100%	295,500,000	100%	30,600,000	100%	30,600,000	100%	32,400,000	100%	32,400,000	Kecamatan Sabangau

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	-	70%	10,276,000	80%	10,276,000	90%	10,276,000	100%	10,276,000	100%	10,276,000	Kecamatan Rakumpit
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.75	0,78	2,785,468,890	0,80	154,779,600	0,90	115,351,450	0,95	166,771,900	1	163,898,500	1	163,898,500	Kecamatan Rakumpit
				Presentase PKK aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Posyandu Aktif	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	917,030,225	70%	1,012,764,000	80%	1,052,764,000	90%	1,092,764,000	100%	1,132,764,000	100%	1,132,764,000	Kecamatan Rakumpit
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	25%	40%	1,410,440,000	-	0	-	0	-	0	-	0	40%	1,410,440,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	56%	56%		-		-		-		-		56%		
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	27%	40%	168,461,000	-	0	-	0	-	0	-	0	40%	168,461,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	20%	20%		-		-		-		-		20%		
				Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	70%		-		-		-		-		70%		
			Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media	-	20%	120,649,500	-	0	-	0	-	0	-	0	20%	120,649,500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	C		-		-		-		-		C		
			Program Aplikasi dan Informatika	Persentase Sub Domain Yang Dikelola	40%	45%	53,001,700	-	0	-	0	-	0	-	0	45%	53,001,700	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	0	C	3,050,280,000	C	3,355,980,000	B	3,626,887,750	B	3,868,010,700	B	3,868,010,700	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan	73.11	2	2,248,306,000	2.3	2,600,946,800	2.5	2,600,946,800	2.5	2,600,946,800	3	2,600,946,800	3	2,600,946,800	Dinas Perpustakaan dan Pernustakaan
		Program Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	22.22%	13.88	147,063,400	13.89	1,048,750,000	13.89	1,048,750,000	13.89	1,048,750,000	22.23	1,048,750,000	22.23	1,048,750,000	Dinas Perpustakaan dan Pernustakaan
		Sasaran 6: Meningkatnya Kerukunan Masyarakat (M2S6)															
		Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya tingkat keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota palangka Raya			622,200,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	622,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan			1,307,938,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1,307,938,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tercapainya tingkat pemahaman politik masyarakat			1,278,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1,278,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan	380		-	2340	1,590,000,000	2850	1,720,000,000	3360	1,960,000,000	3880	2,020,000,000	3880	2,020,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya	95		-	151	1,440,000,000	158	1,550,000,000	165	1,700,000,000	172	1,850,000,000	172	1,850,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi				53	340,000,000	57	400,000,000	62	500,000,000	67	600,000,000	67	600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Pendidikan Politik	Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi memilih mengikuti Pemilu	145			82	170,000,000	92	220,000,000	102	280,000,000	190	1,330,000,000	190	1,330,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penegakan Perda	90%	90%	790,122,500	92%	948,147,000	92%	1,137,776,400	94%	1,365,331,680	96%	1,638,398,016	96%	1,638,398,016	Satuan Polisi Pamong Praja
			Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0.6	1.2		1.8		2.4		3		3				
			Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	7.84	8.04		8.24		8.43		8.63		8.82				
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90	92		92		94		96		96		96		
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Pos Kamling per RT	0,44	0.45	1,537,430,000	0.47	921,080,123	0.48	2,698,720,458	0.5	84,235,379	0.51	1,342,556,914	0.51	1,342,556,914	Satuan Polisi Pamong Praja
			Cakupan rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	0	1		2		3		4		5				

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Misi 3: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi cerdas)															
		Tujuan 5: Meningkatkan perekonomian daerah															
		Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi (M3S1)															
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Nilai dan Kekayaan Budaya	Indeks Pengembangan dan pengelolaan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya	4 Pagelaran / Festival dan 6 BCB	4	1,008,000,000	4	1,008,000,000	4	2,256,000,000	4	1,008,000,000	4	2,256,000,000	4	2,256,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Palangka Raya Wisnus : Wisman :	Wisnus: 197.400 dan Wisman: 2.600	467,236,000	1,600,000,000	Wisnus: 206.500 dan Wisman: 3.500	216.400 dan Wisman: 3.600	1,350,000,000	Wisnus: 226.300 dan Wisman: 3.700	1,600,000,000	Wisnus: 236.200 dan Wisman: 3.800	1,350,000,000	Wisnus: 236.200 dan Wisman: 3.800	1,350,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	0.6			0.7			0.8		0.9		1			1.2
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	INDEKS PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN DESTINASI PARIWISATA	34 Lokasi	2	3,624,514,000	2	7,500,000,000	2	7,500,000,000	2	7,500,000,000	2	7,500,000,000	2	7,500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kemitraan	INDEKS KEMITRAAN PARIWISATA	341 Orang + 20 lembaga	20 orang + 2 lembaga	418,150,000	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Fasilitas Peningkatan Promosi Bagi IKM	Meningkatnya jumlah IKM yang difasilitasi menikuti pameran	95	109	138,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya persentase penanganan pengaduan konsumen, Jumlah alat UTTP yang ditera ulang, Jumlah Pasar yang dibangun/Revitalisasi	50	54	2,138,479,676.61	58	230	3,735,458,698	64	3,790,458,698	68	3,850,958,698	68	3,850,958,698	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				200	210		220			-		1		-			1
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor perdagangan (%) Dan Kontribusi retribusi sektor perdagangan terhadap PAD (it)	10,52	10,92	406,356,000	11,32	11,72	505,560,000	12,12	556,116,000	12,52	611,727,600	12,52	611,727,600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				950	988		1.026			1.064		1.102		1.140			1.140
		Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri	Penurunan tingkat inflasi (%)	6,45	6,25	1,492,621,000	6,05	1,492,621,000	5,85	1,641,883,100	5,65	1,806,071,410	5,45	1,986,678,551	5,45	1,986,678,551	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	1	2	70,600,000	-	-	-	-	-	-	-	2	70,600,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	0.2	0.1	81,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.1	81,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri	4,38	4,55	9,500,000	-	-	-	-	-	-	-	4,55	9,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	-	-	3	1,735,000,000	4	1,908,500,000	5	2,099,350,000	6	2,309,285,000	6	2,309,285,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	-	-	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1				
		Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri.	-	-	4,72		4,89		5,06		5,23		5,23				
		Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan (M3S2)															
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	22%	24%	389,631,250	28%	579,556,250	30%	713,300,000	32%	847,043,750	34%	980,787,500	34%	980,787,500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan perluasan sumber pembiyaan	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,5%	2,7%	42,536,125	3%	118,300,000	3,5%	145,600,000	3,7%	172,900,000.00	4%	200,200,000	4%	200,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneneah
			Presentase UKM BPR/LKM Aktif	44,7%	46%		47%		49%		52%		55%		55%		
		Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	94%	95%	402,210,229	96%	629,873,373	97%	775,228,766	98%	920,584,160	99%	1,065,939,554	99%	1,065,939,554	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnyaproduktivitas tanaman pertanian	20 Kw/ ha	1 Tahun	1,904,418,500	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1,904,418,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian)	Terpenuhinya dokumen/ data NTP	115	12 Bulan	29,000,000	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	29,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Keterlibatan dalam Kegiatan Pekan Daerah	-	1 kegiatan	101,680,000	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	101,680,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Nilai Tukar Petani	115	3 Kelompok Tani	56,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3 Kelompok Tani	56,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tercapainya Petani/ Pekebun yang Mendapat Pelatihan/ Sosialisasi Perkebunan	-	30 Orang	15,575,000	-	-	-	-	-	-	-	30 Orang	15,575,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Terpenuhinya dokumen/ data NTP	115	3 Dokumen	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	36,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Perlindungan Kebun dan Tanaman	Meningkatnya luas perkebunan rakyat	115	5 Kecamatan	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5 Kecamatan	13,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan				-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan	1.125 ton	3 Kelompok Tani	35,240,000	-	-	-	-	-	-	-	3 Kelompok Tani	35,240,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya Skor PPH	90	90.1	164,469,850	90.2	1,144,216,233	90.4	1,343,144,550	90.6	1,489,815,813	90.8	1,604,376,934	90.8	1,604,376,934	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				-		-		-		-		-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Meningkatkan Kompetensi penyuluh	-	17 Penyuluh	36,130,000		-		-		-		-	17 Penyuluh	36,130,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian				-		-		-		-		-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pternakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan	1.200 Dosis	4 ULIB	76,600,000	-	-		-		-		-	4 ULIB	76,600,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi (ton)	1.102,2 Ton	Kawasan rusa, RPH, Vaksin Hewan	1,062,800,000	1.215,2 Ton	1,862,662,500	1.275,9 Ton	2,047,750,000	1.339,7 Ton	2,339,912,500	1.406,7 Ton	2,675,899,375	1.406,7 Ton	2,675,899,375	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Hewan tervaksin	6.000 dosis	1 Tahun	278,750,000	-	-		-		-		-	1 Tahun	278,750,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pternakan	Bantuan Kelompok Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pternakan	115	10 Dokumen	22,000,000	-	-		-		-		-	10 Dokumen	22,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang dibina	-	-	-	80%	5,998,000,000	85%	6,792,000,000	90%	7,340,800,000	95%	7,897,667,500	95%	7,897,667,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veterener, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pternakan	Hewan tervaksin	-	-	-	7.000 Dosis	953,962,500	7.500 Dosis	1,071,056,875	8.000 Dosis	1,073,556,875	8.500 Dosis	1,191,015,406	8.500 Dosis	1,191,015,406	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Bidang Pertanian	Nilai Tukar Petani	-	-	-	104.75	3,192,640,275	104.78	3,092,810,969	104.78	3,491,107,814	104.78	3,892,886,486	104.78	3,892,886,486	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan, Peningkatan dan Pemasaran Bidang Perkebunan	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	-	-	-	63,282	1,769,384,575	63,282	1,955,161,500	63,500	2,072,885,725	63,505	2,329,868,584	63,505	2,329,868,584	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	16772.79	19025	944,967,500	21278.21	2,005,173,150	23531.42	2,329,971,300	25784.7	2,639,269,450	28037.9	3,058,067,600	28037.86	3,058,067,600	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3150	3200	389,809,250	3250	1,105,000,000	3300	1,235,000,000	3350	1,010,000,000	3400	2,275,000,000	3400	2,275,000,000	Dinas Perikanan

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan (Perairan Umum)	13	0	-	3	813,773,200	5	860,650,500	6	932,215,500	6	998,937,000	6	998,937,000	Dinas Perikanan
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	35.27	37.0335	718,498,125	38.885175	807,000,000	40.829434	871,200,000	42.8709	942,700,000	45.0145	991,800,000	45.014451	991,800,000	Dinas Perikanan



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya dijalankan dengan kebijakan umum yang berfokus pada upaya mengatasi permasalahan pembangunan, pemerataan pembangunan, fokus pada pendidikan, pariwisata dan jasa, dengan optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah serta berlandaskan pada Budaya Betang dan berwawasan lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam program-program prioritas dan disesuaikan dengan program yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Urusan atau program prioritas atau strategis dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding program operasional, sehingga dalam penganggarnya, diprioritaskan terlebih dahulu, mengingat suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan karena pengaruhnya yang sangat luas dan sangat urgent untuk dilaksanakan. Program pendukung (belanja rutin) pada RPJMD Tahun 2018-2023 dicantumkan, hal ini didasarkan bahwa berfungsi belanja rutin sebagai pendukung terhadap program prioritas pembangunan daerah.

Sebagai tahapan awal dalam pembangunan, perencanaan pembangunan perlu disinergikan dengan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitasnya. Sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan, perencanaan jangka menengah perlu didukung dengan kebijakan program pembangunan untuk pengimplementasiannya. Kebijakan yang dirumuskan dalam bab ini merupakan kebijakan umum dan program pembangunan, meskipun di dalam tindak lanjut penjabaran visi dan misi telah diuraikan strategi dan arah kebijakannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian materi tersebut kedalam 4 (empat) bidang urusan, berikut kami tampilkan melalui tabel 7.1 dan tabel 7.2:



Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Kota Palangka Raya

No	Kapabilitas Riil / Belanja	Proyeksi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Belanja Tidak Langsung	532.465.661.995,24	590.397.798.997,58	657.902.197.750,75	668.749.195.621,37	684.619.981.448,92	700.887.536.922,17	727.561.781.282,25
	Belanja Pegawai	492.806.656.984,13	524.379.473.478,48	615.408.714.611,94	634.831.433.102,24	650.702.218.929,79	666.969.774.403,04	683.644.018.763,12
	Belanja Bunga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
	Belanja Subsidi							
	Belanja bantuan sosial	9.565.262.000,00	11.830.563.000,00	13.255.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00
	Belanja Hibah	26.324.698.267,00	46.518.717.775,00	15.991.717.775,00	15.868.717.775,00	15.868.717.775,00	15.868.717.775,00	25.868.717.775,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.249.044.744,11	1.399.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13
	Belanja Tidak Terduga		4.750.000.000,00	10.477.720.619,68	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
B	Belanja Langsung	607.102.234.982,67	581.880.768.361,05	519.787.447.457,12	771.803.773.460,98	813.537.544.996,47	849.042.436.631,47	886.751.528.994,76
	Belanja Pegawai	77.870.257.607,49	84.838.977.227,31	95.547.361.925,80	95.547.361.925,80	95.547.361.925,80	95.547.361.925,80	95.547.361.925,80
	Belanja Barang dan Jasa	293.465.219.000,26	252.315.152.729,74	224.638.286.137,32	426.529.773.131,18	463.263.544.666,67	478.768.436.301,67	502.477.528.664,96
	Belanja Modal	191.918.311.085,62	244.726.638.404,00	199.601.799.394,00	249.726.638.404	254.726.638.404	274.726.638.404	288.726.638.404
C	Pembiayaan	93.220.441.238,84	27.394.350.692,08	27.200.512.807,29	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
	Penerimaan Pembiayaan	83.596.912.617,92	15.551.155.329,55	33.700.512.807,29	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	9.623.528.620,92	11.843.195.362,53	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00



Tabel 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	7,522,782,200	100	8,275,060,420	100	9,102,584,462	100	10,012,823,108	100	10,012,823,108	Dinas Pendidikan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	3,917,163,000	-	-	-	-	-	-	-	100	3,917,163,000	Dinas Pendidikan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	600,211,000	-	-	-	-	-	-	-	100	600,211,000	Dinas Pendidikan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	1,566,890,000	-	-	-	-	-	-	-	100	1,566,890,000	Dinas Pendidikan	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	302,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	302,000,000	Dinas Pendidikan	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	111.10	115	36,294,875,500	117	60,786,500,000	120	66,865,150,000	125	73,551,665,000	128	80,906,831,500	128	80,906,831,500	Dinas Pendidikan
			APM SD/MI	97.13	97.15		97.18		97.2		98		98.1		98.1		
			APS SD/MI	971.30	971.50		971.8		972.01		980.00		981		981		
			Menurunnya angka putus sekolah SD/MI	0.02	0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		
			Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS	0.11	0.10		0.10		0.09		0.09		0.08		0.08		
			APK SMP/MTs	103.9	104.1		104.1		104.5		104.7		105		105		
			APM SMP/MTs	94.56	94.6		94.8		95		95.1		95.2		95.2		
			APS SMP/MTs	945.60	946.01		948		950.00		951.01		952		952		
			Angka kelulusan SD/MI	100	100		100		100		100		100		100		
			Angka kelulusan SMP/MTS	99.98	99.99		100		100		100		100		100		
			Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	47.71	47.73		47.75		47.77		47.79		47.81		47.81		
			Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS	44.18	44.25		44.50		44.72		44.74		44.80		44.80		
		Program Pendidikan Non Formal	APK PAUD	59.73	59.8	4,217,030,000	59.9	6,684,892,500	60	7,353,381,750	60.5	8,088,719,925	60.75	8,897,591,918	60.75	8,897,591,918	Dinas Pendidikan
			APM PAUD	33.37	37.40		37.80		40		40.20		40.50		75		
			APS PAUD	373.7	374.01		378		400.00		402.01		405		405		
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV	95.71	95.71	439,857,000	95.80	3,907,646,100	96	4,298,410,710	97	4,728,251,781	99	5,201,076,959	99	5,201,076,959	Dinas Pendidikan
			Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru	75	75		80		85		90		95		95		
			Rasio guru terhadap murid PAUD	754.54	754.60		754.80		754.90		755		755		755		
			Rasio guru terhadap murid SD/MI	462.47	462.60		462.8		462.85		462.90		463		10		
			Rasio guru terhadap murid SMP/MTS	552.97	553		553.20		553.50		553.75		554		554		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Kesehatan															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100%	15,984,300,000	100%	15,747,530,000	100%	16,745,880,000	100%	17,867,168,300	100%	17,867,168,300	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	82.8%	100%	2,559,188,140.00	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,559,188,140.00	Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	64.6%	100%	58,740,850.00	-	-	-	-	-	-	-	100%	58,740,850.00	Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	2%			-	-	-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	8%	77%	2,027,891,110.00	-	-	-	-	-	-	-	77%	2,027,891,110.00	Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	61.41%	65%	27,757,400.00	-	-	-	-	-	-	-	65%	27,757,400.00	Dinas Kesehatan	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Keluarga Sehat	22%	23,5%	165,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka gizi buruk	2	0	14,015,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah Sehat	88.4%	90%	39,442,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	27%	92%	87,579,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
			Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%	100%	424,949,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	87.16%	88%	24,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kasus keracunan makanan	N/A	0	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Ibu hamil/melahirkan dengan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	91.98%	80%	49,259,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	43.90%	40%	1,004,673,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	94.37%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Biaya obat per kapita per tahun (Rp)	7,795	8,000	2,607,912,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk	3,87	3.80	6,312,545,796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Cakupan akses layanan rujukan	36.40%	95%	8,663,303,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan penduduk terlindungi Jaminan kesehatan (UHC)	86.71%	95%	217,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	22.49%	23,5%	16,816,822,422.57	25%	13,336,283,390	27,5%	14,492,305,360	30%	15,507,538,011	40%	16,514,747,910	40%	16,514,747,910	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	43.90%			40%	33,591,039,999	40%		40%	38,234,358,409	40%	38,305,294,250	40%	38,305,294,250	Dinas Kesehatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan	94.37%	-	-	100%		100%	34,604,144,000	100%		100%		100%		
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan kegawatdaruratan di RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD	N/a	-	-	100%	33,337,000,000	100%		100%	37,750,000,000	100%	36,650,000,000	100%	36,650,000,000	Dinas Kesehatan
				Indikator kinerja pelayanan RS (dirinci dalam RSB-RSUD)	N/a	-	-	RSB-RSUD		RSB-RSUD		RSB-RSUD		RSB-RSUD		RSB-RSUD		Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	6,299,800,000	100	6,313,300,000	100	6,478,300,000	100	6,478,300,000	100	6,478,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	4,826,142,507	-	-	-	-	-	-	-	100	4,826,142,507	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	2,479,500,000	-	-	-	-	-	-	-	100	2,479,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	217,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	217,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	308,076,000	-	-	-	-	-	-	-	100	308,076,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	29,081,500	-	-	-	-	-	-	-	100	29,081,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terbangun	56.5	57	50,553,768,575	-	-	-	-	-	-	-	57	50,553,768,575	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terpelihara	44.88	45	12,418,000,000	-	-	-	-	-	-	-	45	12,418,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	Persentase drainase yang terbangun	51	53	21,358,000,000	-	-	-	-	-	-	-	53	21,358,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	74.54	76	4,215,939,000	-	-	-	-	-	-	-	76	4,215,939,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pengendali Banjir	Persentase pengendalian banjir kondisi baik	61.4	62	4,215,000,000	-	-	-	-	-	-	-	62	4,215,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan	49	50	175,224,200	-	-	-	-	-	-	-	50	175,224,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pembangunan lingkungan sehat perumahan	49	50	342,685,925	-	-	-	-	-	-	-	50	342,685,925	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase rencana tata ruang	68	70	2,354,010,850	-	-	-	-	-	-	-	70	2,354,010,850	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penyelenggaraan Jalan	-	-	-	59	78,702,250,000	61	81,002,250,000	63	83,002,250,000	65	85,002,250,000	65	85,002,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase pengelolaan sumber daya air	-	-	55	37,609,870,000	57	49,409,870,000	59	55,009,870,000	61	55,009,870,000	61	55,009,870,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase pengembangan infrastruktur permukiman	-	-	51	1,250,000,000	52	1,400,000,000	53	1,800,000,000	54	1,800,000,000	54	1,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Persentase rencana dan pemanfaatan ruang	-	-	72	6,170,000,000	74	6,590,000,000	76	6,660,000,000	78	6,660,000,000	78	6,660,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase pelayanan kebinamargaan	70	72	4,840,000,000	74	6,130,000,000	76	6,230,000,000	78	6,240,000,000	80	6,240,000,000	80	6,240,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	80	81	1,456,566,200	-	-	-	-	-	-	-	81	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembinaan Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	80	-	82	1,490,000,000	83	1,510,000,000	84	1,510,000,000	85	1,510,000,000	85	1,510,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	100	62,617,647,929	100	62,617,647,929	100	62,617,647,929	100	62,617,647,929	100	62,617,647,929	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	16,002,492,259	-	-	-	-	-	-	100	16,002,492,259	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	36,674,126,743	-	-	-	-	-	-	100	36,674,126,743	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	160,000,000	-	-	-	-	-	-	100	160,000,000	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	253,847,192	-	-	-	-	-	-	100	253,847,192	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah Layak Huni Terbangun	15,29	0.9	278,422,625	-	-	-	-	-	-	0.9	278,422,625	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan Lingkungan Terbangun	38,08	0.85	10,717,496,375	-	-	-	-	-	-	0.85	10,717,496,375	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Tertangani	66,49	85	6,156,613,910	-	-	-	-	-	-	85	6,156,613,910	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Drainase Dalam Kondisi Baik (km)	0	0.8	2,445,021,250	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2,445,021,250	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Peningkatan Pelayanan Pemakaman Yang Dapat Berfungsi Optimal	46,50	0.9	312,867,975	-	-	-	-	-	-	-	0.9	312,867,975	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaanan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Pelayanan IPLT (%)	65	0.9	1,608,247,375	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1,608,247,375	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat Air Bersih	60	0.9	2,278,544,190	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2,278,544,190	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	34,45	0.9	458,306,750	-	-	-	-	-	-	-	0.9	458,306,750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pada Tahun N	24,37	0.95	2,508,546,484	0.95	853,208,531	0.95	853,208,531	0.95	853,208,531	0.95	853,208,531	1	853,208,531	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n	51,58	0.9	12,626,205,500	-	-	-	-	-	-	-	0.9	12,626,205,500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH dalam Kondisi Baik	64,52	0.85	5,366,123,650	-	-	-	-	-	-	-	0.85	5,366,123,650	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Fasilitas Umum	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	-	-	-	5.20%	30,151,359,332	5.20%	30,151,359,332	5.40%	30,151,359,332	5.60%	30,151,359,332	6%	30,151,359,332	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kualitas dan Infrastruktur Lingkungan	IKM Pelayanan Pemakaman	-	-	-	0,9	24,531,528,800	0,95	24,531,528,800	0,95	24,531,528,800	0,95	24,531,528,800	1	24,531,528,800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n	-	-	-	0,9	24,531,528,800	0,95	24,531,528,800	0,95	24,531,528,800	0,95	24,531,528,800	1	24,531,528,800	
				Rasio RTH dalam Kondisi Baik	-	-	-	0,85	24,531,528,800	0,85	24,531,528,800	0,9	24,531,528,800	0,95	24,531,528,800	1	24,531,528,800	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah	Persentase Sampah Yang Tertangani	-	-	-	90%	9,593,500,542	90%	9,593,500,542	90%	9,593,500,542	90%	9,593,500,542	90%	9,593,500,542	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	1,871,000,000	100	2,100,000,000	100	2,300,000,000	100	2,440,000,000	100	2,440,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1,016,671,200	-	-	-	-	-	-	-	100	1,016,671,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	391,520,000	-	-	-	-	-	-	-	100	391,520,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur			-	-	-	-	-	-	-	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	32,623,750	-	-	-	-	-	-	-	-	100	32,623,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota palangka Raya			622,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-		622,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan			1,307,938,000	-	-	-	-	-	-	-	-		1,307,938,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tercapainya tingkat pemahaman politik masyarakat			1,278,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		1,278,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan	380	-	2340	1,590,000,000	2850	1,720,000,000	3360	1,960,000,000	3880	2,020,000,000	741	2,020,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya	95	-	151	1,440,000,000	158	1,550,000,000	165	1,700,000,000	172	1,850,000,000	741	1,850,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi			53	340,000,000	57	400,000,000	62	500,000,000	67	600,000,000	239	600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Peningkatan Pendidikan Politik	Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi memilih mengikuti Pemilu	145		82	170,000,000	92	220,000,000	102	280,000,000	190	1,330,000,000	611	1,330,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	7,165,008,169	100	8,598,009,803	100	10,317,611,764	100	12,381,134,116	100	14,857,360,940	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	57	100	4,445,564,041	-	-	-	-	-	-	-	100	4,445,564,041	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	69	90	770,370,000	-	-	-	-	-	-	-	90	770,370,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	243,663,600	-	-	-	-	-	-	-	100	243,663,600	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	32.7	32.7	383,050,000	-	-	-	-	-	-	-	32.7	383,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	28	95	128,192,500	-	-	-	-	-	-	-	95	128,192,500	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penegakan Perda	90%	90%	790,122,500	92%	948,147,000	92%	1,137,776,400	94%	1,365,331,680	96%	1,638,398,016	96%	1,966,077,619	Satuan Polisi Pamong Praja
			Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0.6	1.2		1.8		2.4		3		3				
			Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	7.84	8.04		8.24		8.43		8.63		8.82		8.82		
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90	92		92		94		96		96		96		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp			
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Pos Kamling per RT	0,44	0.45	1,537,430,000	0.47	921,080,123	0.48	2,698,720,458	0.5	84,235,379	0.51	1,342,556,914	0.51	1,342,556,914	Satuan Polisi Pamong Praja			
			Cakupan rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	0	1			2		3		4		5		5					
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah			100		2,605,894,100	100		2,927,394,100	100		3,007,394,100	100		3,202,394,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	100		1,707,326,806	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya sarana dan prasarana aparatur yg lebih baik	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	100		17,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terukurnya kinerja instansi pemerintah dan terarahnya pembangunan kesejahteraan sosial	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	100		34,814,670	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terhindarnya kota Palangka Raya dari Bahaya Bencana	100	100		232,586,250	-	-	-	-	-	-	-	100		232,586,250	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Penanggulangan fisik pasca bencana	-	-	-	100		540,000,000	100		540,000,000	100		540,000,000	100		540,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Bencana	100	100		346,602,982	100		150,000,000	100		200,000,000	100		150,000,000	100		150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Terhindarnya Kota Palangka Raya dari bencana kebakaran hutan dan lahan	100	100		860,948,125	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana	-	-	-	100		5,000,000,000	100		5,000,000,000	100		6,000,000,000	100		6,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100		4,789,864,078	100		4,335,727,282	100		4,837,227,282	100		4,646,038,646	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100		2,481,357,128	-	-	-	-	-	-	-	-	100		2,481,357,128	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100		32,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100		32,750,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		-	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100		20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100		20,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100		107,646,251	-	-	-	-	-	-	-	-	100		107,646,251	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	0.65	0.65	740,000,125	70	6,585,000,000	80	6,729,000,000	90	6,850,000,000	100	6,980,000,000		6,980,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Peningkatan Penyelamatan (Rescue) dan Evakuasi Korban	Tingkat Layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban dan yang terdampak	0.35	-	-	0.4	1,350,000,000	0.5	1,100,000,000	0.6	1,100,000,000	0.7	1,100,000,000	70%	1,100,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Kebakaran	persentase jumlah masyarakat yang tanggap pencegahan kebakaran	40%	-	-	45%	750,000,000	50%	775,000,000	60%	805,000,000	70%	835,000,000	70%	835,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
		Sosial															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	1,380,162,430	100	1,380,162,430	100	1,380,162,430	100	1,380,162,430	100	1,380,162,430	Dinas Sosial
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	831,014,600	-	-	-	-	-	-	-	100	831,014,600	Dinas Sosial	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	635,610,949	-	-	-	-	-	-	-	100	635,610,949	Dinas Sosial	
		Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	41,867,226	-	-	-	-	-	-	-	100	41,867,226	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	83,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	83,000,000	Dinas Sosial	
		Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	100,350,500	-	-	-	-	-	-	-	100	100,350,500	Dinas Sosial	
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan PMKS	41115	8223	594,625,000	8223	889,031,072	8223	889,031,072	8223	889,031,072	8223	889,031,072	41115	889,031,072	Dinas Sosial
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksanya Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	500	100	13,308,200	-	-	-	-	-	-	-	100	13,308,200	Dinas Sosial	
		Pembinaan Anak Terlantar	Terbinanya Anak Terlantar	175	35	64,606,000	-	-	-	-	-	-	-	35	64,606,000	Dinas Sosial	
		Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat & Eks Trouma	250	50	117,693,000	-	-	-	-	-	-	-	50	117,693,000	Dinas Sosial	
		Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat & Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya	250	50	275,549,200	-	-	-	-	-	-	-	50	275,549,200	Dinas Sosial	
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	26	5	212,449,197	5	145,086,200	5	145,086,200	5	145,086,200	6	145,086,200	26	145,086,200	Dinas Sosial
		Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	Terbinanya Anggota Tagana Kota Palangka Raya	100	100	91,447,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Rehabiliasi dan Rekontruksi	50	10	16,746,000.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial	-	-	-	235	378,281,500	235	378,281,500	235	378,281,500	235	378,281,500	235	378,281,500	Dinas Sosial
		Program Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial	Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial	-	-	-	100%	222,193,100	100%	222,193,100	100%	222,193,100	100%	222,193,100	100%	222,193,100	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,203,104,140	100	2,203,104,140	100	2,203,104,140	100	2,203,104,140	100	2,203,104,140	Dinas Tenaga Kerja
		Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran	100	100	1,256,006,690	-	-	-	-	-	-	-	100	1,341,562,890	Dinas Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	726,727,500	-	-	-	-	-	-	-	100	530,465,650	Dinas Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Program arn Peningkatan aparatur	60	100	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			40,000,000	-	-	-	-	-	-	-		138,545,600	Dinas Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30,000,000	-	-	-	-	-	-	-		132,530,000	Dinas Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan program kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			859,015,000		821,431,650		821,431,650		821,431,650		821,431,650		821,431,650	Dinas Tenaga Kerja
		Program peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja			305,444,100		1,050,201,600	0	1,050,201,600	0	1,050,201,600	0	1,050,201,600	0	1,050,201,600	Dinas Tenaga Kerja
		Program perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan			62,639,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Tenaga Kerja
		Komunikasi dan Informatika															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	1,726,868,043	100	1,761,552,404	100	1,796,900,452	100	1,832,925,461	100	1,832,925,461	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1,001,382,295	-	-	-	-	-	-	-	100 %	1,001,382,295	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	63,875,000	-	-	-	-	-	-	-	100 %	63,875,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	22,947,000	-	-	-	-	-	-	-	100 %	22,947,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	25%	40%	1,410,440,000	-	-	-	-	-	-	-	0	1410440000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
				Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	56%	56%		-	-	-	-	-	-	0.56				
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	27%	40%	168,461,000	-	-	-	-	-	-	-	40%	168461000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
				persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	20%	20%		-	-	-	-	-	-	0.2				
				Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	70%		-	-	-	-	-	-	0.7				
			Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media	-	20%	120,649,500	-	-	-	-	-	-	-	20%	120649500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
				IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	C		-	-	-	-	-	-	C				
			Program Aplikasi dan Informatika	Persentase Sub Domain Yang Dikelola	40%	45%	53,001,700	-	-	-	-	-	-	-	0.45	53001700	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	C	3,050,280,000	C	3,355,980,000	B	3,626,887,750	B	3,868,010,700	B	3,868,010,700	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	-	-			60%		70%		80%		100%		100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media	-	-			40%		60%		80%		100%		100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-			75%		85%		95%		100%		100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	-	-			40%		60%		80%		100%		100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	-	-	-	45%	9,580,000,000	60%	9,580,000,000	80%	8,680,000,000	100%	8,730,000,000	100%	8,730,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	-			75%		85%		95%		100%		100%	
				Persentase Sub Domain Yang Dikelola	-	-			65%		75%		80%		100%		100%	
			Statistik															
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Sistem Data dan statistik Yang Terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	780,500,000	Ada	890,000,000	Ada	960,000,000	Ada	1,025,000,000	Ada	1,025,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Buku Statistik "Kota Palangka Raya "	-	-			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pengembangan Data/Informasi	Buku Statistik "Kota Palangka Raya "	1 Dokumen	101,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	101,375,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada		-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada				
		Persandian															
		Program Penguatan Kelembagaan Siber dan Persandian	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	42%	42%	37,100,000	-	-	-	-	-	-	-	42%	37,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	-	-	-	10%	825,500,000	25%	2,849,000,000	35%	1,484,000,000	50%	1,774,000,000	50%	1,774,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	-	-	45%		60%		70%		100%	100%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Koperasi Usaha Kecil dan Menengah															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,063,294,379	100	2,539,439,235	100	3,015,584,092	100	3,491,728,948	100	3,491,728,948	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1,152,028,192	-	-	-	-	-	-	-	100	1,152,028,192	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Program Peningkatan Sarana Prasarana	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	435,972,705	-	-	-	-	-	-	-	100	435,972,705	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	68,375,000	-	-	-	-	-	-	-	100	68,375,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	79,800,000	-	-	-	-	-	-	-	100	79,800,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	35,930,000	-	-	-	-	-	-	-	100	35,930,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	22%	24%	389,631,250	28%	579,556,250	30%	713,300,000	32%	847,043,750	34%	980,787,500	34%	980,787,500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan perluasan sumber pembiayaan	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,5%	2,7%	42,536,125	3%	118,300,000	3,5%	145,600,000	3,7%	172,900,000.00	4%	200,200,000	4%	200,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Presentase UKM BPR/LKM Aktif	44,7%	46%		47%		49%		52%		55%		55%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	94%	95%	402,210,229	96%	629,873,373	97%	775,228,766	98%	920,584,160	99%	1,065,939,554	99%	1,065,939,554	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Penanamanan Modal															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	3,225,000,000	100	3,699,000,000	100	4,195,400,000	100	4,959,440,000	100	4,959,440,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,557,846,437.34	-	-	-	-	-	-	-	100	1,557,846,437.34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	260,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	260,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	45,970,200	-	-	-	-	-	-	-	100	45,970,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi (Milyard)	-	585.65	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN	303	50	216,306,500	50	745,000,000	75	895,000,000	75	1,040,000,000	75	1,150,000,000	618	1,150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	2597.66	200		225		255		295		350		3923		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	16.50%	25%	43,507,000	35%	190,000,000	45%	235,000,000	60%	290,000,000	65%	380,000,000	65%	380,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan	7.69%	75%	142,455,000	80%	207,000,000	83%	245,000,000	85%	290,000,000	90%	350,000,000	90%	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	81.98	292,380,000	82.96	270,000,000	83.95	490,000,000	84.95	650,000,000	85.96	735,000,000	85.96	735,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Kepemudaan dan Olah Raga															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,173,137,500	100	2,271,715,938	100	2,368,011,728	100	2,455,667,500	100	2,455,667,500	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	25	40	1,145,688,325	-	-	-	-	-	-	-	100	1,145,688,325	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	25	40	290,870,000	-	-	-	-	-	-	-	100	290,870,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	25	40	182,503,414	-	-	-	-	-	-	-	100	182,503,414	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	25	40	95,443,720	-	-	-	-	-	-	-	100	95,443,720	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Lapangan Olah Raga dan Sarana Prasarananya	0	1	190,750,000	-	-	-	-	-	-	-	1	190,750,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Atlet Berprestasi	0	10	526,805,000	-	-	-	-	-	-	-	10	526,805,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	10	10	1,322,923,835	-	-	-	-	-	-	-	10	1,322,923,835	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Pemberdayaan Pemuda Kota Palangka Raya	Cakupan Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Produktif	-	-	-	0.5	2,700,000,000	0.75	3,000,000,000	0.8	3,200,000,000	1	3,200,000,000	1	3,200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Cakupan Pemuda yang berperan pada pembangunan	-	-	-	0.5	4,240,000,000	0.75	4,346,000,000	0.8	4,454,650,000	1	4,566,016,250	1	4,566,016,250	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Cakupan Peningkatan Pemuda yang berprestasi dalam Olah Raga	-	-	-	0.5	4,560,000,000	0.75	4,674,000,000	0.8	4,790,850,000	1	4,910,621,250	1	4,910,621,250	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Kesadaran Masyarakat pada gaya hidup sehat	-	-	-	0.5	4,900,000,000	0.75	5,022,500,000	0.8	5,148,062,500	1	5,276,764,063	1	5,276,764,063	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Perpustakaan															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah			100	1,182,040,790	100	1,196,232,040	100	1,196,232,040	100	1,205,313,290	100	1,205,313,290	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	780,861,800	-	-	-	-	-	-	-	100	780,861,800	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	38,850,000	-	-	-	-	-	-	-	100	38,850,000	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	14,960,000	-	-	-	-	-	-	-	100	14,960,000	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	24,400,000	-	-	-	-	-	-	-	100	24,400,000	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan	73.11	2	2,248,306,000	2.3	2,600,946,800	2.5	2,600,946,800	2.5	2,600,946,800	3	2,600,946,800	85.41	2,600,946,800	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan
		Kearsipan															
		Program Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	22.22%	13.88	147,063,400	13.89	1,048,750,000	13.89	1,048,750,000	13.89	1,048,750,000	22.23	1,048,750,000	100	1,048,750,000	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan
		Lingkungan Hidup															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	1,332,628,316	100	1,599,153,979	100	1,918,984,774	100	2,302,781,729	100	2,311,421,729	Dinas Lingkungan Hidup
		Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	873,375,888	-	-	-	-	-	-	-	100	873,375,888	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	76,860,000	-	-	-	-	-	-	-	100	76,860,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pembinaan disiplin aparatur	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Peningkatan Penembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	114,454,375	-	-	-	-	-	-	-	100	114,454,375	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Layanan Persampahan Skala Perkotaan	20	20	50,100,000	25	1,485,120,000	30	1,507,144,000	35	1,546,572,800	40	1,588,887,360	40	1,588,887,360	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup	71.65	75	179,874,375	75	2,147,600,050	75	2,115,120,060	75.5	2,206,144,072	75.5	2,358,372,886	75.5	2,358,372,886	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
				Persentase suatu usaha / Kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	-	-	60		60		60		60		60			
				Ketersediaan data sumber - sumber pencemar air	-	-	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		4 Dok			
				Persentase Kesadaran Masyarakat dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan	-	-	20		20		20		20		20			
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi SDA yang dilakukan	7	6 Lokasi	82,829,000	75	1,106,422,000	75	1,183,706,400	75	1,216,447,680	75	1,260,737,216	75	1,260,737,216	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Pengendalian Konservasi SDA	Tidak Ada	3 Sungai	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3 Sungai	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Tersedianya Kawasan Hutan yang dapat memperbaiki dan mempertahankan kelestarian lingkungan		50 Ha	31,685,000	-	-	-	-	-	-	-	50 Ha	31,685,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data/ Informasi SDA dan LH	1	2 Dokumen	156,593,625	70	1,262,508,000	70	1,855,009,600	70	1,396,011,520	70	2,867,213,824	70	2,867,213,824	Dinas Lingkungan Hidup
			Program peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	76.6	75	857,557,000	75	2,210,092,350	75	2,282,110,820	75	2,483,532,984	75	2,540,239,581	75	2,540,239,581	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	4.1	7 Lokasi	114,130,000	-	-	-	-	-	-	-	7 Lokasi	114,130,000	Dinas Lingkungan Hidup	
Administrasi Kependudukan Capil																		
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	4,102,902,306	100	4,513,192,536	100	4,964,511,790	100	5,460,962,969	100	5,460,962,969	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	86,90%	90	2,502,016,725	-	-	-	-	-	-	-	90	2,502,016,725	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	87,54%	90	62,358,300	-	-	-	-	-	-	-	90	62,358,300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Seragam PNS	93,73%	95	94,500,000	-	-	-	-	-	-	-	95	94,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur	90,58%	93	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	93	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan	99,54%	70%	116,218,025	-	-	-	-	-	-	-	70%	116,218,025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Program Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Sarana Pencatatan Sipil	0.40	0.50	229,525,375	0.60	386,764,455	0.70	425,440,901	0.80	467,984,991	1.00	514,783,490	1.00	514,783,490	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan E-KTP	75%	80%	170,213,125	85%	517,272,690	90%	568,999,959	95%	625,899,955	955%	688,489,950	1.00	688,489,950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	175,396,000	B	260,696,920	B	286,766,612	A	315,443,273	A	346,987,601	A	346,987,601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dengan Baik	0.50	0.60	1,256,563,048	0.70	1,641,654,394	0.80	1,805,819,833	0.90	1,986,401,816	1.00	2,185,041,998	1.00	2,185,041,998	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penduduk di Wilayah Kec. Pahandut yang wajib memiliki dokumen kependudukan	80%	83%	40,064,250	86%	60,000,000	92%	70,000,000	94%	70,000,000	96%	75,000,000	98%	75,000,000	Kecamatan Pahandut
				Persentase penduduk di Wilayah Kec. Bukit Batu yang wajib memiliki dokumen kependudukan	65%	75%	55,320,000	85%	60,852,000	95%	66,937,200	100%	73,630,920	100%	80,994,012	100%	80,994,012	Kecamatan Bukit Batu
				Persentase penduduk di Wilayah Kec. Jekan Raya yang wajib memiliki dokumen kependudukan	94.60%	95%	4,608,750	95.50%	66,500,000	96%	70,000,000	96.50%	73,000,000	97%	75,000,000	97%	75,000,000	Kecamatan Jekan Raya
				Terlaksananya Pendataan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sabangau	100%	100%	28,600,000	100%	295,500,000	100%	30,600,000	100%	30,600,000	100%	32,400,000	100%	32,400,000	Kecamatan Sabangau
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	1,925,993,650	100	1,925,993,650	100	1,925,993,650	100	1,925,993,650	100	1,925,993,650	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85	100	1,335,890,210	-	-	-	-	-	-	-	100	1,335,890,210	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	85	100	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	85	100	20,300,000	-	-	-	-	-	-	100	20,300,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	85	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	85	100	62,882,669	-	-	-	-	-	-	100	62,882,669	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
				Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14.49	14.71	2,248,920,000	15.15	2,361,920,000	15.63	2,361,920,000	16.13	2,361,920,000	16.67	2,361,920,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
			Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita		20	21	21											22	22	22	22
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)		8	7.82	7.43											7.6	6.7	6.37	6.37
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		14.3	16.33	16.8											17.15	17.39	17.56	17.56
			Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-40 tahun		71.48	73.82	76.16											78.86	81.98	85.5	85.5
			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		90	90	90											90	90	90	90
			Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja		30	35	40											50	60	70	80
			Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I		5.92	5.68	5.44											5.17	4.91	4.67	4.43
			Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		75.5	76.5	77.5											78.5	80	81.5	82.5
			Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		75.5	76.5	77.5											78.5	80	81.5	82.5

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- <i>UP Meeting</i>	10	11.5		12.5		14.5		15.5		17.5		20		
			Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	4.17	10	125,498,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan		
				Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	1 : 1			-	-	-	-	-	-					
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang	1	1			-	-	-	-	-	-					
				Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0.6347	1			-	-	-	-	-	-					
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	4.17	-	-	-	461,376,800	50	461,376,800	70	461,376,800	100	461,376,800	100	461,376,800	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	-			-	1 : 1		1 : 1		1 : 1					
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang	1	-			-	1		1		1					
				Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0.6347	1			-	1		1		1					
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	10	11.5	14,999,875	-	-	-	-	-	-	-	11.5	14,999,875	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang Mandiri	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa		35,000,125		-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,125	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak														
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	100	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	100	124,735,575	100	352,157,575	100	352,157,575	100	352,157,575	100	352,157,575	100	352,157,575	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	100	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	143,531,450	100	439,459,300	100	439,459,300	100	439,459,300	100	439,459,300	100	439,459,300	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Perhubungan														
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	100	3,542,104,858	100	3,522,104,858	100	3,547,104,858	100	3,557,104,858	100	3,557,104,858	Dinas Perhubungan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	1,619,976,001.02	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,619,976,001.02	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aperatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	996,549,637	-	-	-	-	-	-	-	-	100	996,549,637	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	110,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	110,550,000.00	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aperatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	90,525,500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	90,525,500	Dinas Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	61,516,500	-	-	-	-	-	-	-	100	61,516,500	Dinas Perhubungan	
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	104,029	65,770,220	-	-	-	-	-	-	-	104,029	-	Dinas Perhubungan	
			Program Peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	104,029	50,000,000	104,029	1,337,070,000	104,029	1,337,070,000	104,029	1,337,070,000	104,029	1,337,070,000	1,337,070,000	Dinas Perhubungan	
				Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10,099	10,099		10,299		10,399		10,499		10,599				
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	(151 x 100.000)/275.667 = 54,77	(151 x 100.000)/275.667 = 54,77	1,768,000,000	(149 x 100.000)/275.667 =54,05	3,337,770,220	(146 x 100.000)/275.667 = 52,96	3,437,770,220	(145 x 100.000)/275.667 = 52.59	3,437,770,220	(144 x 100.000)/275.667 = 52,23	(140 x 100.000)/275.667 = 50,78	3,437,770,220	Dinas Perhubungan	
			Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	(151 x 100.000)/275.667 = 54,77	(151 x 100.000)/275.667 = 54,77	2,632,846,279.49	(149 x 100.000)/275.667 =54,05	3,631,128,879	(146 x 100.000)/275.667 = 52,96	3,651,128,879	(145 x 100.000)/275.667 = 52.59	3,671,128,879	(144 x 100.000)/275.667 = 52,23	(140 x 100.000)/275.667 = 50,78	3,691,128,879	Dinas Perhubungan	
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10,099	10,099	345,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10,099	-	Dinas Perhubungan	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	104,029	1,017,000,000	104,029	1,248,740,000	104,029	1,191,740,000	104,029	1,196,740,000	104,029	1,206,740,000	1,206,740,000	Dinas Perhubungan	
			Kebudayaan															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	3,065,269,092	100	3,065,269,092	100	3,065,269,092	100	3,065,269,092	3,065,269,092	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian tahunan pelayanan perkantoran unit kerja internal SKPD	WTP	WTP	1,702,226,525	-	-	-	-	-	-	-	WTP	1,702,226,525	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian tahunan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	WTP	WTP	72,000,000	-	-	-	-	-	-	-	WTP	72,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Aparatur yang mentaati peraturan pemerintah	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	-	-	WTP	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pendidikan Daya Aparatur	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	-	-	WTP	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Ketepatan dalam Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan	WTP	WTP	263,669,000	-	-	-	-	-	-	-	WTP	263,669,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Nilai dan Kekayaan Budaya	Indeks Pengembangan dan pengelolaan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya	4 Pagelara n/ Festival dan 6 BCB	4	1,008,000,000	4	1,008,000,000	4	2,256,000,000	4	1,008,000,000	4	2,256,000,000	4	2,256,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pangan															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	3,635,282,500	100	3,848,853,540	100	4,397,431,571	100	5,027,546,307	100	5,027,546,307	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	2,240,116,025	-	-	-	-	-	-	-	100	2,240,116,025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja SOPD	100	100	684,414,800	-	-	-	-	-	-	-	100	684,414,800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur SOPD	-	100	56,700,000	-	-	-	-	-	-	-	100	56,700,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur ASN	-	100	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	100	100	65,812,000	-	-	-	-	-	-	-	100	65,812,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya Skor PPH	90	90.1	164,469,850	90.2	1,144,216,233	90.4	1,343,144,550	90.6	1,489,815,813	90.8	1,604,376,934	90.8	1,604,376,934	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Urusan Pilihan															
		Perikanan															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	1,831,049,295	100	1,784,201,735	100	1,989,161,785	100	2,073,119,825	100	2,073,119,825	Dinas Perikanan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1,282,719,375	-	-	-	-	-	-	-	100	1,282,719,375	Dinas Perikanan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	205,190,000	-	-	-	-	-	-	-	100	205,190,000	Dinas Perikanan	
		Program Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Dinas Perikanan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Dinas Perikanan	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	80	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Dinas Perikanan	
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	16772.8	19025	944,967,500	21278	2,005,173,150	23531.4	2,329,971,300	25785	2,639,269,450	28038	3,058,067,600	1E+05	3,058,067,600	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3150	3200	389,809,250	3250	1,105,000,000	3300	1,235,000,000	3350	1,010,000,000	3400	2,275,000,000	16500	2,275,000,000	Dinas Perikanan
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan (Perairan Umum)	13	0	-	3	813,773,200	5	860,650,500	6	932,215,500	6	998,937,000	22	998,937,000	Dinas Perikanan
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	35.27	37.034	718,498,125	38.89	807,000,000	40.8294	871,200,000	42.871	942,700,000	45.01	991,800,000	204.6	991,800,000	Dinas Perikanan
		Pariwisata															
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Palangka Raya Wisnus : Wisman :	Wisnus: 197.400 dan Wisman: 2.600	Wisnus: 196.600 dan Wisman : 3.400	467,236,000	Wisnus: 206.500 dan Wisman: 3.500	1,600,000,000	Wisnus: 216.400 dan Wisman: 3.600	1,350,000,000	Wisnus : 226.300 dan Wisman: 3.700	1,600,000,000	Wisnus: 236.200 dan Wisman: 3.800	1,350,000,000	Wisnus: 236.200 dan Wisman: 3.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp						
				Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	0.6	0.7		Rp	0.8		0.9		1		Rp	1.2		1.2		Rp				
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	INDEKS PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN DESTINASI PARIWISATA	34 Lokasi	2		3,624,514,000	2		7,500,000,000	2		7,500,000,000	2		7,500,000,000	2		7,500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
			Program Pengembangan Kemitraan	INDEKS KEMITRAAN PARIWISATA	341 Orang + 20 lembaga	20 orang + 2 lembaga		418,150,000	20 orang + 2 lembaga		1,265,000,000	20 orang + 2 lembaga		1,265,000,000	20 orang + 2 lembaga		1,265,000,000	20 orang + 2 lembaga		1,265,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
			Pertanian																					
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnyaproduktivitas tanaman pertanian	20 Kw/ ha	1 Tahun		1,904,418,500	-		-	-		-	-		-	1 Tahun		1,904,418,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian)	Terpenuhinya dokumen/ data NTP	115	12 Bulan		29,000,000	-		-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Keterlibatan dalam Kegiatan Pekan Daerah	-	1 kegiatan		101,680,000			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Nilai Tukar Petani	115	3 Kelompok Tani		56,000,000			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tercapainya Petani/ Pekebun yang Mendapat Pelatihan/ Sosialisasi Perkebunan	-	30 Orang		15,575,000			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Terpenuhinya dokumen/ data NTP	115	3 Dokumen		36,000,000			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					-			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Perlindungan Kebun Dan Tanaman	Meningkatnya luas perkebunan rakyat	115	5 Kecamatan		13,000,000			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Pembangunan Kehutanan Dan Perkebunan					-			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan	1.125 ton	3 Kelompok Tani		35,240,000			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					-			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Menigkatkan Kompetensi penyuluh	-	17 Penyuluh		36,130,000			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian					-			-	-		-	-		-	-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan	1.200 Dosis	4 ULIB		76,600,000	-	-		-	-		-	-		-	-		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi (ton)	1.102,2 Ton	Kawasa n rusa, RPH, Vaksin Hewan		1,062,800,000	1.215, 2 Ton		1,862,662,500	1.275,9 Ton		2,047,750,000	1.339,7 Ton		2,339,912,500	1.406, 7 Ton		2,675,899,375	1.406, 7 Ton		2,675,899,375	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Hewan tervaksin	6.000 dosis	1 Tahun	278,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Bantuan Kelompok Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peternakan	115	10 Dokumen	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang dibina	-	-	-	80%	5,998,000,000	85%	6,792,000,000	90%	7,340,800,000	95%	7,897,667,500	95%	7,897,667,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veterener, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Hewan tervaksin	-	-	-	7.000 Dosis	953,962,500	7.500 Dosis	1,071,056,875	8.000 Dosis	1,073,556,875	8.500 Dosis	1,191,015,406	8.500 Dosis	1,191,015,406	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Bidang Pertanian	Nilai Tukar Petani	-	-	-	104.8	3,192,640,275	104.78	3,092,810,969	104.78	3,491,107,814	104.8	3,892,886,486	104.8	3,892,886,486	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengelolaan, Peningkatan dan Pemasaran Bidang Perkebunan	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	-	-	-	63,282	1,769,384,575	63,282	1,955,161,500	63,500	2,072,885,725	63,505	2,329,868,584	63,505	2,329,868,584	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Perdagangan															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	1,269,159,375	100	1,396,075,313	100	1,535,682,844	100	1,689,251,128	100	1,689,251,128	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	100	817,929,610	-	-	-	-	-	-	-	100	817,929,610	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	67	100	122,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	122,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis	60	100	46,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	46,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya laporan kinerja dan keuangan yang baik	80	100	79,200,000	-	-	-	-	-	-	-	100	79,200,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya persentase penanganan pengaduan konsumen, Jumlah alat UTTP yang ditera ulang, Jumlah Pasar yang dibangun/Revitalisasi	50	54	-	58	60	64	-	68	-	68	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					200	210	2,138,479,676.61	220	3,685,458,698	230	3,735,458,698	240	3,790,458,698	250	3,850,958,698	250		
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor perdagangan (%) Dan Kontribusi retribusi sektor perdagangan terhadap PAD (jt)	10,52	10,92	406,356,000	11,32	11,72	12,12	505,560,000	12,52	556,116,000	12,52	611,727,600	12,52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					950	988	-	1.026	1.064	1.102	-	1.140	-	1.140	-	-		
			Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri	Penurunan tingkat inflasi (%)	6,45	6,25	1,492,621,000	6,05	1,492,621,000	5,85	1,641,883,100	5,65	1,806,071,410	5,45	1,986,678,551	5,45	1,986,678,551	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Perindustrian															
		Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM	Meningkatnya jumlah IKM yang difasilitasi mengikuti pameran	95	109	138,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	1	2	70,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	0.2	0.1	81,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri	4,38	4,55	9,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	-	-	-	3	1,735,000,000	4	1,908,500,000	5	2,099,350,000	6	2,309,285,000	6	2,309,285,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	-	-	-	0.1		0.1		0.1		0.1		0.7		
			Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri	-	-	-	4,72		4,89		5,06		5,23		5,23		
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
		Administrasi Pemerintahan															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	10,685,506,424	100	9,268,023,327	100	9,416,311,700	100	9,566,972,687	100	9,566,972,687	Sekretariat DPRD
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	80%	85%	9,203,067,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	9,203,067,000	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	80%	85%	1,558,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	1,558,000,000	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	80%	85%	574,212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	574,212,000	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemomaaan kapasitas sumber daya	80%	85%	632,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	632,960,000	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	80%	85%	78,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	78,430,000	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Meningkatnya Produk-produk Kebijakan	112%	80%	12,730,904,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
		Program Pengkajian, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Persidangan dan Humas	Meningkatnya Produk Hukum Daerah	-	-	-	80%	5,494,071,520	85%	5,581,976,664	90%	5,671,288,291	95%	5,762,028,904	95%	5,762,028,904	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya Fasilitasi Persidangan, Risdalah dan Humas	-	-	-	90%		90%		90%		95%		95%		Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	-	-	-	80%	10,073,451,064	85%	10,234,626,281	90%	10,398,380,302	95%	10,664,754,386	95%	10,664,754,386	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD	-	-	-	90%		90%		90%		95%		95%		
			Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	80%		85%		90%		95%		95%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	28,653,500,000	100	28,724,500,000	100	28,745,500,000	100	28,817,500,000	100	28,817,500,000	Sekretariat Daerah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	100%	9,234,649,431	-	-	-	-	-	-	-	100%	9,234,649,431	Sekretariat Daerah	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	-	100%	10,324,797,350	-	-	-	-	-	-	-	100%	10,324,797,350	Sekretariat Daerah	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	-	356 ASN	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	356 ASN	50,000,000	Sekretariat Daerah	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	-	100%	452,366,101	-	-	-	-	-	-	-	100%	452,366,101	Sekretariat Daerah	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	-	90%	183,707,080	-	-	-	-	-	-	-	90%	183,707,080	Sekretariat Daerah	
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	35 Kegiatan	5,241,060,375	-	-	-	-	-	-	-	35 Kegiatan	5,241,060,375	Sekretariat Daerah	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Administrasi Pimpinan, Manajemen Keuangan, Aset dan Kerumahtanggaan	-	32 Kegiatan	1,077,197,800	-	-	-	-	-	-	-	32 Kegiatan	1,077,197,800	Sekretariat Daerah	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya	-	B	216,607,806	B	299,000,000	A	307,000,000	A	315,000,000	A	323,000,000	A	323,000,000	Sekretariat Daerah
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	100%	1,607,022,550	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Sekretariat Daerah	
		Program peningkatan kerjasama antar daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	-	11 Kegiatan	33,107,100	-	-	-	-	-	-	-	11 Kegiatan	-	Sekretariat Daerah	
		Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	-	100%	523,326,275	100%	529,000,000	100%	539,000,000	100%	549,000,000	100%	559,000,000	100%	559,000,000	Sekretariat Daerah
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan Kegiatan Pembinaan Korpri/ASN	-	300 ASN	180,857,225	-	-	-	-	-	-	-	300 ASN	-	Sekretariat Daerah	
		Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian	Cakupan Administrasi Perekonomian dan SDA	-	100%	663,562,550	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Sekretariat Daerah	
		Program Pengembangan Data Informasi	Kegiatan Pengembangan Data Informasi	-	100%	194,186,900	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Sekretariat Daerah	
		Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan	Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tipologi OPD	-	100%	87,550,875	100%	92,000,000	100%	98,000,000	100%	104,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	Sekretariat Daerah
		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus Tata Negara	-	76%	60,500,000	-	-	-	-	-	-	-	76%	-	Sekretariat Daerah	
		Program Peningkatan Pembinaan Kedamangan di Kota Palangka Raya	Koordinasi Pembibingan, Supervisi Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi	-	45 Kegiatan	135,776,794	-	-	-	-	-	-	-	45 Kegiatan	-	Sekretariat Daerah	
		Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	-	24 Kegiatan	11,450,831,337	-	-	-	-	-	-	-	24 Kegiatan	-	Sekretariat Daerah	
		Program Pengembangan Kewadayaan	Kegiatan Pengembangan Keswadayaan	-	12 Kegiatan	286,432,487	-	-	-	-	-	-	-	12 Kegiatan	-	Sekretariat Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	-	38 Kegiatan	210,703,525	-	-	-	-	-	-	-	38 Kegiatan	-	Sekretariat Daerah	
			Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota	Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi dan Teknis Pemerintahan dan Pembangunan	-	100%	480,601,325	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Sekretariat Daerah	
			Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah	Persentase Koordinasi dan Penguatan Kualitas Regulasi/Kebijakan Pemerintah Daerah	-	100%	1,421,314,525	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Sekretariat Daerah	
			Program Pembakuan Nama Rupa Bumi	Peraturan Walikota Tentang Pembakuan Nama Rupabumi	-	75%	62,500,000	-	-	-	-	-	-	-	75%	-	Sekretariat Daerah	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah	Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	-	-	-	100%	3,645,000,000	100%	4,009,500,000	100%	4,410,450,000	100%	4,851,495,000	100%	4,851,495,000	Sekretariat Daerah
			Program Pembinaan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	Data Masyarakat Miskin	-	-	-	100%	1,386,470,400	100%	1,401,000,000	100%	1,416,500,000	100%	1,432,000,000	100%	1,432,000,000	Sekretariat Daerah
			Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Pelayanan Keagamaan	-	-	-	100%	13,531,901,100	100%	13,541,218,300	100%	13,550,718,300	100%	13,564,218,300	100%	13,564,218,300	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	Nilai/Skor dan Tingkat/Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	-	-	-	Tinggi (Skor 2.8000)	1,382,650,000	Tinggi (Skor 2.9000)	1,867,138,300	Tinggi (Skor 3.0000)	1,217,113,000	Sangat Tinggi (Skor 3.1000)	1,429,710,000	Sangat Tinggi (Skor 3.1000)	1,429,710,000	Sekretariat Daerah
			Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian dan Pengumpulan Data Informasi	Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya	-	-	-	100%	1,064,000,000	100%	1,109,000,000	100%	1,142,000,000	100%	1,170,000,000	100%	1,170,000,000	Sekretariat Daerah
				Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE	-	-	-	100%		100%		100%		100%				
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	3,980,000,000	100	1,986,000,000	100	2,103,500,000	100	2,252,000,000	100	2,252,000,000	Kecamatan Pahandut
			Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	674,721,681	-	-	-	-	-	-	-	100%	674,721,681	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	65%	72%	636,400,000	-	-	-	-	-	-	-	72%	636,400,000	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	90%	92%	-	-	-	-	-	-	-	-	92%	-	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kualitas dan Kuantitas SDM	74%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	-	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	50,542,725	-	-	-	-	-	-	-	100%	50,542,725	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.72	0.77	316,715,500	0.83	402,180,000	0.88	439,180,000	0.94	429,180,000	1	454,180,000	1	454,180,000	Kecamatan Pahandut
				Presentase PKK aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Posyandu Aktif	60%	70%		80%		90%		100%		100%				
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	4,309,361,463	70%	2,389,000,000	80%	2,423,000,000	90%	2,453,000,000	100%	2,535,000,000	100%	2,535,000,000	Kecamatan Pahandut

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,097,040,670	100	2,261,744,737	100	2,442,919,211	100	2,642,211,132	100	2,642,211,132	Kecamatan Bukit Batu				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	864,450,150	-	-	-	-	-	-	-	100%	864,450,150	Kecamatan Bukit Batu					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	65%	72%	971,436,400	-	-	-	-	-	-	-	72%	971,436,400	Kecamatan Bukit Batu					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	58%	68%	34,000,000	-	-	-	-	-	-	-	68%	34,000,000	Kecamatan Bukit Batu					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	34,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	34,000,000	Kecamatan Bukit Batu					
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	43,423,150	-	-	-	-	-	-	-	100%	43,423,150	Kecamatan Bukit Batu					
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa	1	1	3,385,800,000	1	3,724,380,000	1	4,126,818,000	1	4,506,499,800	1	4,987,149,780	1	4,987,149,780	Kecamatan Bukit Batu				
			Presentase PKK aktif	100%	100%													100%	100%	100%	100%
			Persentase Posyandu Aktif	100%	100%													100%	100%	100%	100%
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	417,279,850	70%	459,007,835	80%	504,908,619	90%	555,399,480	100%	610,939,428	100%	610,939,428	Kecamatan Bukit Batu				
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,517,250,000	100	2,118,500,000	100	2,185,000,000	100	2,046,500,000	100	2,046,500,000	Kecamatan Jekan Raya				
		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	952,546,997	-	-	-	-	-	-	-	100%	952,546,997	Kecamatan Jekan Raya					
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	65%	72%	224,625,000	-	-	-	-	-	-	-	72%	224,625,000	Kecamatan Jekan Raya					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	74%	80%	87,130,000	-	-	-	-	-	-	-	80%	87,130,000	Kecamatan Jekan Raya					
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	66,781,507	-	-	-	-	-	-	-	100%	66,781,507	Kecamatan Jekan Raya					
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.72	0.77	1,777,764,225	0.83	1,777,764,225	0.88	1,777,764,225	0.94	1,777,764,225	1	1,777,764,225	1	1,777,764,225	Kecamatan Jekan Raya				
			Presentase PKK aktif	100%	100%													100%	100%	100%	100%
			Persentase Posyandu Aktif	50%	60%													70%	80%	90%	100%
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	1,945,718,932	70%	1,978,950,000	80%	2,010,450,000	90%	2,054,450,000	100%	2,117,950,000	100%	2,117,950,000	Kecamatan Jekan Raya				
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,417,885,460	100	2,057,683,403	100	1,714,436,216	100	1,734,612,342	100	1,734,612,342	Kecamatan Sabangau				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	725,154,452	-	-	-	-	-	-	-	100%	725,154,452	Kecamatan Sabangau					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	65%	72%	1,080,975,000	-	-	-	-	-	-	-	72%	1,080,975,000	Kecamatan Sabangau					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur		90%	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	90%	36,000,000	Kecamatan Sabangau					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sabangau				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	44,527,300	-	-	-	-	-	-	-	100%	44,527,300	Kecamatan Sabangau	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,64	0,71	198,409,850	0,78	305,887,140	0,85	335,811,273	0,92	392,182,964	1	482,435,408	1	482,435,408	Kecamatan Sabangau
				Presentase PKK aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Posyandu Aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	3,099,623,000	70%	1,002,176,000	80%	1,009,647,250	90%	1,048,880,762	100%	1,127,251,741	100%	1,127,251,741	Kecamatan Sabangau
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,394,085,400	100	2,385,884,400	100	2,310,130,850	100	2,265,132,123	100	2,265,132,123	Kecamatan Rakumpit
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kebutuhan Administrasi SOPD Kec. Rakumpit	95%	100%	601,606,785	-	-	-	-	-	-	-	100%	601,606,785	Kecamatan Rakumpit	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja	65%	72%	1,331,352,000	-	-	-	-	-	-	-	72%	1,331,352,000	Kecamatan Rakumpit	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang taat terhadap peraturan kerja	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rakumpit	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang profesional dibidang tugasnya	75%	80%	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	80%	36,000,000	Kecamatan Rakumpit	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Perencanaan, Kinerja, Keuangan, dan Akuntabilitas SOPD	100%	100%	14,643,200	-	-	-	-	-	-	-	100%	14,643,200	Kecamatan Rakumpit	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.75	0,78	2,785,468,890	0,80	154,779,600	0,90	115,351,450	0,95	166,771,900	1	163,898,500	1	163,898,500	Kecamatan Rakumpit
				Presentase PKK aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Posyandu Aktif	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembaneuan Kelurahan	50%	60%	917,030,225	70%	1,023,040,000	80%	1,063,040,000	90%	1,103,040,000	100%	1,143,040,000	100%	1,143,040,000	Kecamatan Rakumpit
			Pengawasan															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,205,179,264	100	2,468,597,190	100	2,715,456,909	100	2,987,002,600	100	2,987,002,600	Inspektorat
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	70	75	1,932,752,000	-	-	-	-	-	-	-	75	1,932,752,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	60	65	253,880,000	-	-	-	-	-	-	-	65	253,880,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	60	65	39,000,000	-	-	-	-	-	-	-	65	39,000,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	70	75	66,200,000	-	-	-	-	-	-	-	75	66,200,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah	Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B	30%	75%	479,900,000	80%	287,540,000	85%	316,294,000	90%	347,923,400	90%	382,715,740	90%	382,715,740	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Jumlah Tindak Lanjut Temuan	1221	1233	1,136,950,000	1245	1,530,435,000	1257	1,683,478,500	1269	1,851,826,350	1281	2,037,008,985	1281	2,037,008,985	Inspektorat
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Terhadap Pengaduan Masyarakat	80%	0.8	185,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
			Program Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3 DC	3	-	3	660,000,000	3	726,000,000	3	798,600,000	3	878,460,000	3	878,460,000	Inspektorat
			Perencanaan															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	4,758,540,560	100	4,084,894,616	100	4,462,634,078	100	4,962,897,486	100	5,439,201,234	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	2,038,226,016	-	-	-	-	-	-	-	100	2,038,226,016	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	757,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	757,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	80	58,000,000	-	-	-	-	-	-	-	80	58,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	80	80	411,500,000	-	-	-	-	-	-	-	80	411,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	46,492,675	-	-	-	-	-	-	-	100	46,492,675	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	2,187,706,973	100	2,256,557,630	100	2,432,213,393	100	2,625,434,732	100	3,242,450,490	100	3,242,450,490	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	100		100		100		100		100				
				Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	-	-		100		100		100		100				
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	100	100	439,237,300	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan lintas sektoral	100	100	844,802,325	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA	100	100	303,928,125	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100	100	121,355,000	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100	100	611,398,125	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air	-	-	-	100	1,518,538,120	100	1,670,391,932	100	1,837,431,125	100	2,021,174,238	100	2,223,291,661	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program perencanaan pembangunan ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pengendalian	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan	-	-	-	100	1,241,384,293	100	1,365,522,722	100	1,502,074,995	100	1,652,282,494	100	1,817,510,743	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Capaian Program Pembangunan Daerah Sesuai Target	-	-	100	100		100		100						
			Keuangan															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	5,105,030,044	100	5,105,030,044	100	5,360,281,546	100	5,360,281,546	100	5,360,281,546	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Administ rasi perkantoran berjalan	0.9	4,055,760,875	-	-	-	-	-	-	-	0.9	4,055,760,875	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	Nyaman	0.85	389,940,000	-	-	-	-	-	-	-	0.85	389,940,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Baik	Baik	125,397,500	-	-	-	-	-	-	-	Baik	125,397,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	Baik	15 orang	62,000,000	-	-	-	-	-	-	-	15 orang	62,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Tersedia Dokumen LRA, Neraca, CALK, LAKIP, RKA, DPA, RO, RKPA, DPPA	9 jenis dokumen	228,835,000	-	-	-	-	-	-	-	9 jenis dokumen	228,835,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	6,947,669,475	WTP	7,295,052,949	WTP	7,295,052,949	WTP	7,659,805,596	WTP	7,659,805,596	WTP	7,659,805,596	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	6,030,894,500	100	6,333,396,575	100	6,649,939,404	100	6,981,461,374	100	6,981,461,374	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	4,668,278,250	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	4,668,278,250	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun	1,443,550,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1,443,550,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	115 Stell	115 Stell	157,550,000	-	-	-	-	-	-	-	115 Stell	157,550,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	10 Orang	10 Orang	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10 Orang	210,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	216,050,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	216,050,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
			Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah	85	85	1,638,813,500	-	-	-	-	-	-	-	85	1,638,813,500	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah	75	75	130,800,000	75	482,200,000	80	512,200,000	85	542,200,000	90	572,200,000	90	572,200,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masvarakat	Kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah	75	75	6,070,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
			Program Penggalian dan Peningkatan sumber-sumber PAD	Terpenuhinya capaian target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	75	2,595,600,000	80	2,610,835,000	85	2,841,584,000	90	2,967,897,400	90	2,967,897,400	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	75	634,600,000	80	698,060,000	85	767,866,000	90	844,652,600	90	844,652,600	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pelayanan bagi Wajib Pajak Daerah	-	-	-	75	1,350,000,000	80	1,485,000,000	85	1,633,500,000	90	1,796,850,000	90	1,796,850,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Kepegawaian															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,190,830,510	100	1,975,926,215	100	2,001,469,227	100	2,027,698,263	100	2,027,698,263	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,759,002,760	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,759,002,760	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Aparatur yang memadai	95%	100%	100,775,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	100,775,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	95%	95%	28,180,000	-	-	-	-	-	-	-	95%	28,180,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis Terkait dengan Tugas dan Fungsi	0	5	1,497,679,375	-	-	-	-	-	-	-	5	1,497,679,375	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SOPD	BB	BB	53,929,050	-	-	-	-	-	-	-	BB	53,929,050	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	465,090,175	100%	285,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Pendidikan dan Pelatihan															
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Assesment sesuai dengan jabatan	50%	55%	1,868,556,150	60%	3,392,720,300	70%	3,477,538,308	80%	3,564,476,765	90%	3,653,588,684	90%	3,653,588,684	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Penelitian dan Pengembangan															
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	2,387,142,505	100	4,227,142,505	100	4,237,142,505	100	4,513,142,505	100	4,513,142,505	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1,545,593,905	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,545,593,905	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	87,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	87,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	125,416,600	-	-	-	-	-	-	-	-	100	125,416,600	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	244,639,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	244,639,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Tercapai Hasil Kajian Penelitian	0	3	800,000,000	3	4,000,000,000	3	4,000,000,000	3	5,940,000,000	3	8,212,000,000	15	8,212,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
																		Badan Penelitian dan Pengembangan
			Program Penguatan Kelitbangan	Hasil Kelitbangan dalam Pelaksanaan Pembangunan	0	1	785,036,925	1	2,812,922,175	1	2,877,922,175	1	3,017,922,175	1	3,017,922,175	5	3,017,922,175	Badan Penelitian dan Pengembangan
																		Badan Penelitian dan Pengembangan
			JUMLAH				519,787,447,457.14		771,803,773,460.98		813,537,544,996.47		849,042,436,631.47		886,751,528,994.76			



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kebijakan umum dan pogram pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (*efek*langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.



Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ditampilkan pada Tabel 8.1 dan 8.2 di bawah ini:

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00
3	Angka Harapan Hidup	73,25	73,45	73,65	73,85	74,05
4	Harapan lama sekolah	11,04	11,05	11,06	11,07	11,10
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,80	6,60	6,40	6,25	6,00
6	Nilai sakin	CC	CC	B	B	B
7	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A	A
9	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	5,90	5,80	5,75	5,60	5,55
10	PDRB Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi	5.630.391.209.000	6.264.276.312.000	6.898.161.415.000	7.532.046.518.000	8.165.931.621.000
11	PDRB Sektor Industri Pengolahan	1.816.454.167.000	2.018.439.350.000	2.220.424.534.000	2.422.409.717.000	2.624.394.900.000
12	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	398.163.750.000	424.125.000.000	450.086.250.000	476.047.500.000	502.008.750.000



Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	6,96	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20	7,20
2	Laju inflasi	4,00	3,90	3,85	3,80	3,7	3,65	3,65
3	Indeks Gini	0,330	0,327	0,325	0,322	0,320	0,318	0,318
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,47	3,45	3,43	3,40	3,38	3,35	3,35
5	IPM		79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	80,20
6	Angka usia harapan hidup	73,13	73,20	73,25	73,30	73,33	73,35	73,35
7	Persentase PAD terhadap pendapatan	14,05	14,15	14,25	14,35	14,40	14,50	14,50
8	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,1	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8
10	Nilai tukar petani	104,86	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78	104,78
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib Dasar							
	Pendidikan							
1	APK PAUD	59,73	59,80	59,90	60	60,50	60,75	60,75
2	APM PAUD	37,37	37,40	37,80	40	40,20	40,50	40,50
3	APS PAUD	373,70	374,01	378,01	400,00	402,01	405,01	405,01
4	APK SD/MI	111,10	115	117	120	125	128	128
5	APM SD/MI	97,13	97,15	97,18	97,20	98	98,10	98,10
6	APS SD/MI	971,30	971,50	971,80	972,01	980,00	981,01	981,01
7	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8	Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
9	APK SMP/MTs	103,90	104,1	104,1	104,5	104,7	105	105
10	APM SMP/MTs	94,56	94,60	94,80	95	95,10	95,20	95,20
11	APS SMP/MTs	945,60	946,01	948,01	950,00	951,01	952,01	952,01
12	Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka kelulusan SMP/MTs	99,98	99,99	100	100	100	100	100
14	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	47,71	47,73	47,75	47,77	47,79	48	48
15	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	44,18	44,28	44,50	44,72	44,74	44,80	44,80
16	Rasio guru terhadap murid PAUD	754,54	754,60	754,80	754,90	755	755	755
17	Rasio guru terhadap murid SD/MI	462,47	462,60	462,75	462,85	462,90	463	463
18	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	552,97	553	553,20	553,50	553,75	554	554
19	Persentase guru berkualifikasi S1/DIV	95,71	95,71	95,80	96	97	99	99
20	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	75	75	80	85	90	95	95
	Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup	1,78	7	7	6	5	4	4



2	Angka Kematian Ibu per -100.000 Kelahiran hidup	79,07	75	70	65	60	55	55
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	2,17	6	5	4	3	3	3
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	55.5	57	59	61	63	65	65
2	Drainase dalam kondisi baik	51	53	55	57	59	61	61
3	Irigasi dalam kondisi baik	74,54	76	77	78	79	80	80
4	Ketaatan terhadap RTRW	0	71	72	73	74	75	75
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1	Rasio rumah layak huni	0.13667	0.13729	0.13776	0.13823	0.13870	0.13870	0.13870
2	Rasio permukiman layak huni	0.14066	0.14129	0.14178	0.14227	0.14275	0.14275	0.14275
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0.06379	0.06406	0.06422	0.06445	0.06468	0.06468	0.06468
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0.06379	0.06406	0.06422	0.06448	0.06468	0.06468	0.06468
5	Rasio permukiman yang tertata	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153
6	Rasio lingkungan permukiman kumuh	0.00031	0.00049	0.00067	0.00085	0.00104	0.00104	0.00104
7	Rasio luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.25412	0.83325	1.41238	1.99151	2.57064	2.57064	2.57064
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0.00542	0.00525	0.00508	0.00491	0.00475	0.00475	0.00475
9	Rasio Rumah ber IMB	18.293	18.293	18.2931	18.2931 ₄	18.2931 ₄	18.2931 ₄	18.29314
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Penegakan Perda	90%	90%	92%	92%	94%	96%	96%
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3	3
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	7,84	8,04	8,24	8,43	8,63	8,82	8,82
4	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90%	90%	91%	93%	95%	97%	97%
5	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	0	30	35	40	45	50	200
6	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	8	20	30	40	50	60	200
7	Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0	1	2	3	4	5	5
8	Rasio Pos Kamling Per Jumlah RT	0,44	0,45	0,47	0,48	0,5	0,51	0,51
9	Persentase Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	64	64	68	72	76	80	80
10	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	80	76	72	64	60	60
11	Persentase jumlah infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi	-	-	60	72	76	80	80
12	Persentase Kelurahan Siaga Bencana	6,67	16,67	33,33	50	66,67	83,33	83,33
13	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
14	Cakupan pelayanan penyelamatan kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
15	Cakupan pelayanan pencegahan kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
16	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama		46	46	50	55	60	257
17	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan		92%	94%	96%	97%	99%	99%
18	Tingkat partisipasi pemilih	66%	70%	73%	-	-	75%	75%



19	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini		30	35	40	45	50	200
20	Indeks Toleransi	16	43	10	10	10	10	10
	Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	500	100	100	100	100	500	100%
2	Persentase PMKS yang tertangani	41115	8223	8223	8223	8223	8223	100%
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	41115	8223	8223	8223	8223	8223	100%
4	Persentase Rumah Tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	275	55	55	55	55	55	275
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	26	5	5	5	5	6	26
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2	1	1	1	1	1	7
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	250	50	50	50	50	50	250
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
	Tenaga Kerja							
1	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	208	48	80	100	120	200	756 orang
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	1.216	96	120	160	180	200	1.972 orang
3	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan wirausaha	60	20	20	20	20	20	160 orang
4	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	1000	1500	2000	2500	3000	3000 orang
5	Jumlah tenaga kerja yang terserap	535	500	500	500	2535	3035	3035 orang
6	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	5,12%	5,11%	5,10%	5,09%	5,08%	5,07%	5,07%
7	Rasio ketergantungan	0,43	0,36	0,28	0,21	0,16	0,10	0,10
8	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 kasus	0	2	3	4	5	19 kasus
9	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS tiap tahun	6.342	6.500	6.900	7.300	7.700	8.342	43.084 orang
10	Jumlah pemeriksaan perusahaan	377 perush	0	100	150	200	300	1.127 perush
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14,49	14,71	15,15	15,63	16,13	16,67	16,67
2	Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita	20	21	22	22	22	22	22



3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) %	8	7,82	7,43	7,60	6,70	6,37	6,37
4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %	14,3%	16,33%	16,8%	17,15%	17,39%	17,56%	17,56%
5	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	71,48	73,82	76,16	78,86	81,98	85,50	85,50
6	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90	90	90	90	90	90	90
7	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	30	35	40	50	60	70	80
8	Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	5,92	5,68	5,44	5,17	4,91	4,67	4,43
9	Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75,5	76,5	77,5	78,5	80	81,5	82,5
10	Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75,5	76,5	77,5	78,5	80	81,5	82,5
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri	10	11,5	12,5	14,5	15,5	17,5	20
12	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	4,17%	10%	30%	50%	75%	100%	100%
13	Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1	1	1
15	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0,6347	1	1	1	1	1	1
	Pangan							
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,1	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8
	Lingkungan Hidup							
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	70	70	70	70	70	70	70
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	75	75	75	75	75	75	75
3	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	25	25	25	25	25	25	25
4	Penegakan Hukum Lingkungan	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	B	B	A	A	A
2	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.00
3	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	1.00
4	Rasio Pasangan yang berakte Nikah	0.40	0.50	0.55	0.65	0.85	1.00	1.00
5	Ketersediaan databade kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
8	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat							
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Jekan Raya	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	1
2	Persentase PKK aktif Kec. Jekan Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Posyandu aktif Kec. Jekan Raya	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan	1	1	1	1	1	1	1



	lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Bukit Batu							
5	Persentase PKK aktif Kec.Bukit Batu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Posyandu aktif Kec. Bukit Batu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Pahandut	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	1
8	Persentase PKK aktif Kec. Pahandut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	PersentasePosyandu aktif Kec.Pahandut	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
10	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Rakumpit	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	1
11	Persentase PKK aktif Kec. Rakumpit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	PersentasePosyandu aktif Kec.Rakumpit	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
13	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Sabangau	0.64	0.71	0.78	0.85	0.92	1	1
14	Persentase PKK aktif Kec. Sabangau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	PersentasePosyandu aktif Kec. Sabangau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	IKM Kecamatan	B	B	B	B	B	A	A
	Perhubungan							
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10.099	10.099	10.299	10.399	10.499	10.599	10.599
2	Jumlah Orang melalui dermaga/terminal per tahun	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029
3	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	54,77	54,77	54,05	52,96	52.59	52,23	50,78
	Komunikasi dan Informatika							
1	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	C	C	C	B	B	B
2	Persentase akses jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	25%	40%	45%	60%	80%	100%	100%
3	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	70%	75%	85%	95%	100%	100%
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	27%	40%	60%	70%	80%	100%	100%
5	Persentase informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media	-	20%	40%	60%	80%	100%	100%
6	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan perangkat daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	56%	75%	85%	95%	100%	100%
7	Persentase penanganan pengaduan pelayanan publik	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
8	Persentase Sub Domain yang dikelola	40%	45%	65%	75%	80%	100%	100%
	Statistik							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku Statistik Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Persandian							
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	42%	42%	45%	60%	70%	100%	100%
2	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	-	-	10%	25%	35%	50%	50%
	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
1	Presentase Koperasi Aktif	22%	24%	28%	30%	32%	34%	34%



2	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,5%	2,7%	3%	3,5%	3,7%	4%	4%
3	Presentase UKM BPR/LKM Aktif	44,7%	46%	47%	49%	52%	55%	55%
4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	94%	95%	96%	97%	98%	99%	99%
	Penanaman Modal							
1	Jumlah Investor (PMDN)	303	50	50	75	75	75	628
2	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	2.597,66	200	225	255	295	350	3.922,66
3	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	16,50%	25%	35%	45%	60%	65%	65%
4	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	7,69%	75%	80%	83%	85%	90%	90%
5	Survey Kepuasan Masyarakat	81,01	81,98	82,96	83,95	84,95	85,96	85,96
	Kepemudaandan Olah Raga							
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam pembangunan	16	16	20	25	30	35	40
2	Jumlah Prestasi Olah Raga	na.	-	5	7	9	15	20
	Perpustakaan							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	73,11	2	2,3	2,5	2,5	3	85,41%
	Kearsipan							
1	Persentase Pengelolaan Arsip secara baku/baik	22,22 %	13,88%	13,89%	13,89%	13,89%	22,23%	100%
	Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2	2	10
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	1	2	1	1	1	6
	Layanan Urusan Pilihan							
	Pariwisata							
1	Kunjungan Wisata	Wisnus: 169.531 dan Wisman: 3.253	Wisnus: 197.400 dan Wisman: 2.600	Wisnus: 207.300 dan Wisman: 2.700	Wisnus: 217.200 dan Wisman: 2.800	Wisnus: 227.100 dan Wisman: 2.900	Wisnus: 237.000 dan Wisman: 3.000	Wisnus: 1.086.000 dan Wisman: 14.000
2	Lama kunjungan wisata	-	1	1.2	1.4	1.6	1.8	7
	Pertanian							
1	produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (ton/ha)	2,56	2,56	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
2	Populasi ternak sapi (ekor)	2.036	2.118	2.203	2.290	2.406	2.525	2.525
3	Produksi daging sapi (ton)	1.102,2	1.157,3	1.215,2	1.275,9	1.339,7	1.406,7	1.406,7
4	Nilai Tukar Petani	104,86	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78	104,78
5	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	1.125,40	1.125,4	63.282	63.282	63.500	63.505	63.505
6	Persentase kelompok tani yang dibina	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
7	Hewan tervaksin	6.000 dosis	6.500 dosis	7.000 dosis	7.500 dosis	8.000 dosis	8.500 dosis	8.500 dosis
8	Surveillance Avian Influenza	600 sampel	600 sampel	625 sampel	650 sampel	675 sampel	700 sampel	700 sampel
9	Sampel Produk Asal Ternak	150 sampel	150 sampel	175 sampel	200 sampel	225 sampel	250 sampel	250 sampel
	Perdagangan							
1	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) (IKU)	10,52 %	10,92 %	11,32 %	11,72 %	12,12 %	12,52 %	12,52 %
2	Peningkatan Kontribusi Retribusi Sektor Perdagangan Terhadap PAD (juta)	950 jt	988 jt	1.026 jt	1.064 Jt	1.102 Jt	1.140 Jt	1.140 jt
3	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen (Kasus)	50 %	54 %	58 %	62 %	66 %	70 %	70 %
4	Peningkatan jumlah alat UTTP yang ditera Ulang (Unit)	200	210	220	230	240	250	250
	Perindustrian							
1	Pertumbuhan usaha Industri Kecil Menengah (Unit)	228	10	10	10	10	10	278
2	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Industri (%) (IKU)	4,38	4,55	4,72	4,89	5,06	5,23	5,23



3	Persentase tenaga terlatih dalam industri Kecil dan Menengah (orang)	35 %	41,53 %	43,38 %	45,56 %	48,20 %	51,40 %	51,40 %
	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	16,772.79	19,025.00	21,278.21	23,531.42	25,784.65	28,037.86	117,657.14
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3,150.00	3,200.00	3,250.00	3,300.00	3,350.00	3,400.00	16,500.00
3	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan	2	4	6	8	10	12	12
4	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	35.27	37.03	38.89	40.83	42.87	45.01	204.63
	Penunjang Urusan							
	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	-	-	-	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	-	-	-	-	Ada
4	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keuangan							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	3,26 %	5 %	7 %	8 %	9 %	10 %	10 %
4	Persentase Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	66,72 %	70 %	72 %	75 %	75 %	78 %	78 %
5	Persentase Jumlah Piutang Pajak Daerah Tertagih	NA	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	75 %
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
1	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	2.012 Orang	2.148	2.284	2.420	2.556	2.692	2.692 Orang
2	Presentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%
3	Presentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Penelitian dan pengembangan							
1	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengawasan							
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	73%	74%	75%	76%	77%	78%	78%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja SOPD memperoleh B	30%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
3	Level Kapabilitas APIP	3DC	3	3	3	3	3	3
	Sekretariat Dewan							
1	Persentase Produk Hukum Daerah (Legislasi)	113 %	80 %	85%	85 %	90 %	95 %	95 %
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



	Tahunan (RKPD)							
4	Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Sekretariat Daerah							
1	Nilai LPPD	T	T	T	T	ST	ST	ST



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023. RPJMD Kota Palangka Raya ini disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 menjabarkan perencanaan strategis dalam rangka menentukan arah pembangunan Kota Palangka Raya, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah strategis apa yang dilakukan agar tujuan dapat tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down bottom-up*, partisipatif, serta pendekatan politis, dengan melibatkan seluruh *stakeholders* atau pemangku kepentingan di Kota Palangka Raya. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kota Palangka Raya ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum serta prioritas program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- 3) Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Untuk terciptanya koordinasi, keberlanjutan program, efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka



Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2018-2023 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kota Palangka Raya akan menjadi kota yang aman, sejahtera, dan bermartabat.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ini disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN